



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN
KETUA UMUM GABUNGAN PENGUSAHA MAKANAN MINUMAN
INDONESIA (GAPMMI), KETUA PRESIDUM HIMPUNAN INDUSTRI
MEBEL DAN KERAJI INDONESIA (HIMKI), KETUA UMUM PERSATUAN
PERUSAHAAN KOSMETIKA INDONESIA (PERKOSMI), KETUA UMUM
PERHIMPUNAN PERUSAHAAN DAN ASOSIASI KOSMETIKA INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPRRI dengan 1. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) 2. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) 3. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) 4. Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 24 Januari 2022
Waktu	: 10.00 s.d 14.44 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt.1. Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Martin Manurung, S.E., M.A, Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
Acara	: Mendapatkan Masukan dari Asosiasi dan Perhimpunan terkait dengan Bidang masing-masing
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
Hadir	: A. Anggota DPRRI: 41 dari 54 orang anggota dengan rincian : 1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 9 dari 12 orang Anggota 1. Aria Bima 2. Darmadi Durianto 3. Rieke Diah Pitaloka 4. ST. Ananta Wahana, S.H. 5. I Nyoman Parta, S.H

6. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 7. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 8. dr. H. Mufti A. N. Anam.
 9. Ir. Haris Turino, M.Si, M.M.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
1. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
 2. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 3. Nusron Wahid
 4. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H
 5. Ir. Moh. Ichsan Firdaus
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Khilmi
 3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 4. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M. M.B.A.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 5 orang Anggota
1. Martin Manurung, S.E., M.A.
 2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
 3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 4. Muhammad Rapsel Ali
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
1. Ir. H. Nasim Khan
 2. Tommy Kurniawan
 3. Marwan Ja'far
 4. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M,Si.
 2. Muhammad Dhevy Bijak
 3. Hj. Melani Leimena Suharli
 4. Putu Supadma Rudana
 5. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Nevi Zuairina
 2. Rafli
 3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
 2. Abdul Hakim Bafagih
 3. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
 4. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang ANggota
 1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
 2. Elly Rachmat Yasin

10. UNDANGAN:
 1. Ketua Umum GAPMMI
 2. Ketua Presidium HIMKI
 3. Ketua Umum PERKOSMI
 4. Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E.,M.A./WAKIL KETUA):

Salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom
Om swastiastu
Namo Buddhaya
Salam kebajikan.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI,
Juga selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI),
Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Rahmat
Hidayat,**

**Juga Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Bapak Abdul Sobur,
Juga Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi),**

Bapak siapa Pak?
Ibu?

KETUA UMUM PERKOSMI:

Ibu Selly.

KETUA RAPAT:

Selly ya Ibu Selly ya, saya catat. Ibu Selly.

Dan Ketua Umum Perhimpunan Persatuan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia Bapak Solihin Sofian,

KETUA UMUM PPAK:

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Juga tentu beserta jajaran,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita ditengah seluruh tantangan dan kondisi yang ada saat ini dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPRRI dengan GAPMMI, HIMKI, Perkosmi, dan juga Perhimpunan Perusahaan Asosiasi Kosmetika Indonesia, ini singkatannya apa Pak ini? Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika ini? Oh PPAK.

Pertama-tama saya bacakan dulu ketentuan-ketentuan rapat kita sehubungan dengan pandemi Covid-19, maka ketentuan rapat dilakukan sebagai berikut, kehadiran fisik dan virtual pada rapat-rapat Komisi memperhatikan rapat hasil rapat konsultasi pengganti Bamus 8 November 2021 tentang Tata Cara Rapat Komisi atau Badan pada Masa Tatanan Normal Baru. Juga ketentuan mengenai kehadiran fisik mitra kerja pada rapat-rapat DPRRI sama, secara fisik dan virtual dengan memperhatikan kapasitas tempat duduk. Kemudian peliputan pelaksanaan rapat Komisi VI dilakukan oleh TV Parlemen secara *live streaming* dan media cetak, media elektronik lainnya mendapatkan berita dari TV Parlemen. Lalu berdasarkan Pasal 249 Ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 daftar hadir dilakukan secara fisik dan virtual melalui aplikasi zoom.

Pada saat rapat berlangsung diharapkan anggota dan kita semua menjaga ketenangan karena detail suara akan terdengar oleh seluruh peserta rapat yang akan berpotensi mengganggu jalannya rapat. Apabila belum diberi kesempatan oleh pimpinan untuk berbicara maka mohon peserta rapat mematikan *microphone* dan yang virtual membuat posisi *mute*. Rapat dilaksanakan dengan durasi 2 jam dan bila perlu diperpanjang hanya 30 menit, oke. Interupsi diadakan selama rapat kecuali kalau yang sifatnya informatif ya. Alur rapat kita laksanakan sebagai berikut, pembukaan yang sekarang sedang berlangsung, nanti presentasi singkat oleh tamu-tamu kita, dan kemudian pertanyaan atau pendalaman, dan kemudian tanggapan dari tamu-tamu kita, dan terakhir penutupan. Presentasi awal karena ini ada berapa asosiasi empat asosiasi mungkin bisa dilakukan selama lima sampai tujuh menit, jadi supaya nanti ada waktu untuk melakukan tanya jawab, dan kepada Bapak/Ibu Anggota yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan mohon dapat diberikan waktu selambat-lambatnya 3 menit. Kalau penting sekali mau lebih panjang nanti izin dulu kepada Pimpinan.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPRRI Rapat Dengar Pendapat Umum ini ditandatangani oleh 26 orang dari 54 Anggota Komisi VI yang terdiri atas 9 fraksi. Dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Sebelum saya membuka rapat ini kita sepakati dulu bahwa rapat akan kita akhiri pada pukul sekarang 11, 12, 12.30 Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

12.30 ya.

Baik karena itu tanpa memperpanjang waktu izinkan saya membuka rapat dengar pendapat umum pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL: 10.43 WIB)

Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh tamu kami yang hadir. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan agenda rapat pada hari ini untuk mendengarkan penjelasan dari GAPMMI, HIMKI, Perkosmi, dan juga PPAK yang telah hadir dihadapan kita, terkait dengan masukan dibidangnya masing-masing.

Bapak/Ibu sekalian,

Sebagaimana kita ketahui pandemi Covid-19 sekarang ini telah mengubah secara drastis tatanan ekonomi sosial masyarakat, yang berpengaruh juga

terhadap kondisi ekonomi di negara kita dan di dunia, yang sekarang sampai sekarang ini masih kita rasakan. Kita bersyukur bahwa kondisi yang sulit sekarang ini dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah, dukungan politik DPR, semua lembaga negara, dan dukungan komponen bangsa sampai saat ini kita masih mampu untuk melalui masa-masa sulit ini. Bahkan kalau menurut penilaian dari berbagai lembaga di dunia Indonesia termasuk negara yang cukup berhasil melewati masa-masa sulit baik secara ekonomi maupun kesehatan. Tentunya ini juga tidak terlepas dari kerja keras dan juga kesatuan tekad dari seluruh komponen bangsa, termasuk para pelaku ekonomi yaitu Bapak/Ibu sekalian juga yang ada di ruangan ini.

Ke depan kita perlu melihat bagaimana strategi bangkit dari pandemi ini, bagaimana strategi yang inovatif dan membutuhkan kebijakan politik khususnya bagi para pelaku usaha baik UKM, UMKM, dan juga tentunya pelaku industri. Mengingat permasalahan ini maka Komisi VI DPRRI sebagai lembaga yang memberikan keputusan politik perlu mendengarkan permasalahan dan masukan dari asosiasi atau perhimpunan pelaku usaha dan industri yang ada di negara kita termasuk Bapak/Ibu sekalian yang ada di depan. Sebagai informasi juga Komisi VI DPRRI ini bermitra kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri Investasi Kepala BKPM, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, juga mungkin yang terkait dengan Bapak/Ibu sekalian ada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), juga Badan Sertifikasi Nasional (BSN), juga di Kementerian Perdagangan itu ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi, tentu masukan dari Bapak/Ibu sekalian akan kami jadikan bahan juga dalam rapat-rapat kami. Jadi, kalau istilah gampangnya adalah kami sekarang ingin belanja masalah dari Bapak/Ibu sekalian untuk bisa kemudian dalam rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja kami nanti kami jadikan masukan untuk kami, kita carikan bersama, kalau memang ada solusi-solusi politik yang perlu untuk kita perjuangkan.

Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari rapat ini. Untuk itu saya persilakan pemaparannya dari masing-masing mungkin dimulai dari GAPMMI dulu. Iya silakan Pak.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Baik terima kasih.

Yang kami hormati dan kami muliakan Pimpinan Komisi VI DPRRI beserta semua Anggota Dewan Anggota Komisi VI DPRRI yang hadir baik secara daring ya saat ini secara fisik, secara luring dan juga secara daring,

Terima kasih telah mengundang kami dari Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia untuk menyampaikan beberapa masukan, terkait

industri makanan minuman yang biasa kami singkat Mamin Pak, kepada Komisi VI DPRRI.

Perkenalkan saya Rahmat Hidayat membantu Ketua Umum kami Bapak Adi Lukman dibidang kebijakan publik. Saya bersama enam anggota kami disini, di sini ada Ibu Karina, ada Ibu Ribut, ada Ibu Krisma, ada Ibu Gebi, dan ada Pak Barli di sini. Makasih Pak karena waktu kami tujuh menit saya akan dengan cepat dan ringkas kami sedang mengirimkan bahannya mohon bisa ditampilkan.

KETUA RAPAT:

Ini karena *zoom* memang agak lebih lama Pak, dia harus lewat aplikasi dulu.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Iya Pak siap.

Baik silakan ditampilkan *slide show*. Baik *next slide*, kami akan bagi presentasi ini menjadi tiga bagian besar. Pertama kami meng-*update*

Para Anggota Dewan Komisi VI DPR RI yang terhormat,

Mengenai situasi industri Mamin saat ini. Kemudian, kami akan sampaikan mengenai beberapa hal terkait dengan regulasi yang ada dan juga terkait dengan perdagangan internasional yang terjadi saat ini.

Lanjutkan Mas *next slide please*, iya lanjut-lanjut, lanjut.

Iya ini sekilas saja Bapak/Ibu Anggota Dewan, perusahaan industri mamin memainkan peranan yang cukup penting ya. Dalam hal ini sepertiga dari kebutuhan masyarakat itu kami penuhi melalui industri mamin, lanjutkan. Dan juga kalau kita lihat di sini dan kami lanjutkan di *slide* berikutnya. Dari struktur ekonomi kita juga kita tahu bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga yang hampir 60% dan konsumsi rumah tangga itu 50% lebih itu disumbang oleh konsumsi mamin. Jadi, kira-kira begitu gambarannya dan pertumbuhan kita juga relatif cukup bagus ya dibanding pertumbuhan ekonomi, memang kita terpukul karena Covid, lanjutkan. Dari sisi penanaman modal juga kita bersyukur dalam situasi sulit 2020 kita masih bisa tumbuh investasinya. Memang kalau kita lihat yang tumbuhnya luar biasa adalah *domestic direct, foreign direct investment* alias PMA itu sampai 75% kemarin. Sementara, dari PNDN memang sedikit di bawah ya minus 14,92% tapi itu tumbuh lebih baik dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya, bisa dilanjutkan.

Ini membuktikan bahwa investor asing itu punya optimisme dengan industri mamin di Indonesia, lanjutkan, dan juga industri domestik, lanjutkan

lanjut Pak. Nah, ini sekilas pengaruh Covid, ini salah satu indikatornya adalah PMI (*Purchasing Manager Index*) ini menunjukkan aktifitas industri *manufacturing* mamin itu *ngedrop* luar biasa di bulan Juli 2021. Kita tahu itu varian delta luar biasa tingginya saat itu tapi kemudian dia naik lagi dan menuju ke arah sebelumnya lagi, lanjutkan.

ANGGOTA KOMISI VI:

Pak ini coba ke grafik yang sebelumnya ya, informatif Pak.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Iya.

ANGGOTA KOMISI VI:

Itu kan *peak*-nya 2 Oktober 2021 ya? bener kan?

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Betul-betul Pak.

ANGGOTA KOMISI VI:

Itu mencapai puncak lagi Oktober 2021, kalau dibandingkan sebelum Covid itu sudah nyampe atau masih?

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Sebelum Covid kita memang belum, kita belum bisa menyamai periode sebelum Covid.

ANGGOTA KOMISI VI:

Berapa persen sekarang?

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Sekarang mungkin angkanya di sekitar 70-an% Pak, lanjut.

Dari kinerja ekspor kita bersyukur industri mamin adalah salah satu penyumbang terbesar ekspor dari republik ini. Jadi, itu juga kita syukuri dan kita juga berterima kasih kepada pemerintah maupun DPR yang terus menciptakan iklim yang kondusif bagi industri ini, lanjutkan, iya 23,71% kita tumbuh kemarin. Dari sisi perdagangan internasional memang kita punya PR ya, kita masih neraca perdagangan kita masih negatif, itu artinya lebih banyak kita impor

daripada ekspor. Tapi, kalau kita sorotin hanya dengan empat negara mitra dagang kita negatif tapi sisanya itu kita positif surplus. Dan kita juga patut ketahui bersama memang industri makanan dan minuman membutuhkan bahan baku yang sebagian memang harus diimpor. Jadi, itu juga salah satu faktornya, lanjutkan.

ANGGOTA KOMISI VI:

Izin Pimpinan

Interaktif sedikit Pak yang negatif empat negara mana saja Pak tadi Pak?

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Itu Thailand, kemudian India, selanjutnya itu ada Laos Laos, sama Cina, lanjut.

Silakan ini sama kita *skip* saja yang ini, lanjut Pak.

Ini saya *skip* saja ini hanya menunjukkan negara tujuan ekspor kita yang terbesar itu adalah dalam hal ini masih Amerika Serikat ya, kemudian Filipina, dan seterusnya, lanjut. Dan negara impor kita yang terbesar di tahun kemarin itu ya Brazilia, Thailand, Argentina, dan seterusnya.

Lanjut, lanjutkan. Ini menunjukkan kami ingin menyampaikan di sini bahwa ada berbagai aspek yang menjadi tantangan industri mamin, mulai dari masalah tarif perdagangan, masalah kualitas ya, masalah *food waste*, *food loss* kemudian juga inovasi, masalah *food safety*, masalah logistik, masalah *ethnics* dan *habits* ya itu semua berkontribusi terhadap kemampuan kami menciptakan daya saing untuk memberikan nilai tambah dan juga menciptakan profitabilitas.

Lanjutkan. Ini kita lanjut saja. Nah, jadi Covid ini Pak, Bapak/Ibu sekalian yang terhormat, menciptakan krisis multi dimensi. Jadi, memang awalnya adalah krisis kesehatan tapi itu memicu kepada krisis ekonomi, krisis logistik, kemudian krisis komoditi, dan juga krisis energi dan ini menekan luar biasa kepada industri mamin dan kami menurut hemat kami menekan kepada semua industri *manufacturing* di Indonesia. Lanjutkan.

Jadi, ada beberapa hal yang kami sampaikan di sini, ini kendala ya yang kami alami, masalah regulasi, masalah kebijakan pemerintah misalkan saja sinkronisasi peraturan perundangan di pusat dan daerah maupun antar lembaga pemerintah misalkan saja implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja, implementasi dari *online single submission*, *risk base assessment*. Jadi, ini kebijakan terobosan luar biasa dari pemerintah, membuat semuanya berbasis digital tapi ini mengakibatkan kendala karena tidak sinkron antar lembaga satu dengan lembaga lain, dan antara pemerintah pusat dan daerah, dan ujungnya jadi membuat kendala buat industri kami. Terus juga masalah ke *supply* energi yang kompetitif buat industri dalam hal ini energi itu adalah energi listrik dan gas alam, kemudian juga *supply* kontinuitas dari bahan baku, terus juga masalah

logistik. Logistik Indonesia kita semua paham ya Indonesia masih memiliki biaya logistik tertinggi mungkin di, mungkin di Asia. Kita masih ada dikisaran 23% dari produk domestik bruto kita dibandingkan tetangga kita Malaysia, Thailand, Filipina mereka sudah ada dikisaran 15, kalau negara maju seperti Cina itu sudah di angka 10-an. Nah, itu target pemerintah luar biasa, Bu Sri Mulyani tahun 2020 menyampaikan dari 23% PDB target pemerintah adalah menurunkannya menjadi sama dengan Malaysia, Filipina dalam waktu lima tahun, berarti tahun 2025 jadi waktu kita sedikit lagi ini. Cuma memang kendalanya adalah masalah *transportation cost*, masalah logistik misalkan saja kebijakan mengenai odol yang akan ditegakan di Januari 2023 itu juga PR buat kita semua. Terus juga akses pembiayaan terutama buat pelaku industri yang UMKM, karena kita tahu memang sekarang biaya-biaya modal masih sangat tinggi di Indonesia, lanjutkan semoga waktu saya masih sisa satu dua menit lagi.

Jadi, ini beberapa kendala tantangan yang kami sampaikan tadi, masalah perpajakan kita tahu ya PPN naik nanti bulan April jadi 11% dan *next yearsnya* akan jadi 12%, terus kemudian insentif pajak itu kita bersyukur pemerintah sangat apa *break thru* ya membuat terobosan tapi memang belum banyak yang bisa memanfaatkan, karena mungkin implementasinya yang perlu dibikin lebih simpel lagi oleh pemerintah. Rencana kenaikan tarif dasar listrik mengenai peraturan ketenagakerjaan yang kita masih menunggu karena ada keputusan MK, jadinya semuanya di-*freezing* lagi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terus kemudian kerja sama *G to G halal* kita sangat apresiasi komitmen dari Kepala BPJPH dengan membuat terobosan hubungan diplomatik itu menjadi dasar yang minimum untuk perjanjian apa kesepakatan sertifikasi halal dengan negara lain dan juga fasilitasi UMKM, serta kebijakan mengenai limbah ini beberapa contoh.

Lanjutkan, lanjut saja ini saya *skip, skip, skip* lagi ini tentang Covid saja lanjut, lanjutkan, terus lanjut lagi, lanjutkan lagi, silakan lanjutkan lagi tolong, makasih, lanjut, lanjutkan lagi, lanjutkan, silakan dilanjutkan lagi Mas, lanjut lagi, lagi, lagi, *next, yes*. Cukup di sini makasih.

Jadi, pada intinya tugas kami industri adalah bagaimana kami bisa memberikan nilai tambah bagi industri hulu kami ya agro dan agro itu adalah industri hulu kami. Terus bagaimana kami bisa bertahan, bagaimana kami bisa memberikan produk yang bisa dijangkau oleh segala masyarakat, dan bagaimana kami punya daya saing di dalam *global value chain* dunia. Untuk itu kami sangat membutuhkan keberlanjutan keberlangsungan *supply* dari bahan baku kami. Nah, tentu ini didapat dari lokal kalau di lokal itu tidak ada atau kurang maka kami bisa mendapatkannya dari impor, kami butuh itu dukungan dari pemerintah. Nah, ini berarti kaitannya nanti dengan kebijakan misalkan impor bahan baku, bahan penolong, ini kami sangat membutuhkan iklim ataupun situasi yang kondusif dari itu.

Kemudian mengenai situasi, atmosfer, regulasi, dan *policy* yang kondusif. Jadi, kami sangat berharap pemerintah agar kami bisa bangkit setelah terpukul Covid ini kami sangat mengharapkan dukungan dari sisi kebijakan, regulasi, *policy*, maupun peraturan perundangan yang kondusif. Berikutnya adalah inovasi dan teknologi, ini juga kita tidak bisa menghindar, kita harus terus bisa menjangkau itu dan melakukan itu dan pemerintah telah memberikan terobosan *supertext deduction* untuk yang melakukan inovasi. Tapi, sekali lagi belum bisa belum banyak yang memakai karena masih butuh disimplifikasi lagi implementasinya. Kesiapan sumber daya manusia, ini juga wajib dan ini menjadi PR semua unsur dari republik ini untuk mencapainya. Berikutnya terakhir adalah pilar infrastruktur dan logistik. Tadi, kami sudah sampaikan bahwa logistik ini PR yang berat buat pemerintah karena kita masih jauh tertinggal, *cost* kita masih sangat tinggi itu yang ingin kami sampaikan, lanjutkan.

Dan ini adalah *slide* kami terakhir. Jadi, kalau hal-hal itu bisa ya, katakanlah bisa mendekati apa yang dicita-citakan, maka kita berharap ya ekonomi ini akan menjadi lebih baik nanti konsumsi akan mendekati normal lagi. Kita punya generasi millennial yang mereka memiliki apa pandangan-pandangan baru yang kita harus *grab* itu, terus juga masyarakat kita pendapatan menengah, kecil dan menengah itu akan naik kesejahteraannya karena industrinya bangkit dan masyarakat yang menengah atas akan kembali kepercayaannya untuk belanja untuk *consume* lagi. Jadi, kita memiliki keyakinan ekonomi kita akan tumbuh sesuai yang dicita-citakan pemerintah ya kisarannya ada di sekitar 4,5% mungkin sampai 5%. Terus kemudian kita memiliki keyakinan mamini ini bisa tumbuh 5%-an ya dan ekonomi kita akan tumbuh sekitar 5 sampai 5,5% dan kita yakin mamini akan bisa tumbuh di tahun 2022 5 sampai 7% dan itu merupakan cita-cita bersama.

Saya rasa terima kasih saya sudah mencapai tujuh menit ya Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya betul Pak.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Nanti kami berharap kita bisa berdiskusi dengan lebih banyak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Selanjutnya saya persilakan dari Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia.

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Bapak Pimpinan sidang Pak Martin dan juga para Anggota Dewan yang saya hormati yang saya muliakan, selamat pagi
Juga buat rekan-rekan semua yang hadir di ruangan ini,**

Semoga sehat selalu.

Izinkan kami memperkenalkan diri saya nama Abdul Sobur didampingi disebelah saya adalah wakil saya bidang regulasi Bu Herlinali, kemudian di belakang saya ada Pak Ebmun Ketua HIMKI DKI, di sampingnya Pak Iman adalah memang bendahara kami yang mengurus uang Pak dan mengelola, dan satu lagi Pak Sekjen sama satu didampingi oleh eksekutif kami.

Jadi, HIMKI ini sebenarnya Bapak dan Ibu umurnya belum lama kurang lebih baru 6 tahun. Jadi, dulu ada dua asosiasi besar yaitu Asosiasi Mebel dan Kerajinan (HAMKRI) dan juga ada ASMINDO, kemudian tahun 2016 itu Pak Jokowi berkenan mempersatukan kami dua asosiasi agar menjadi satulah supaya solid, kuat, dan satu bahasa supaya tidak ada perbedaan nanti di lapangan katanya itu. Dan kami diresmikan pada saat itu beliau restui di Istana Negara mungkin ada beberapa foto yang bisa kita tunjukan di sini ada beberapa memori. Nah, ini, ini tanggalnya tanggal berapa itu 29 ya Juli itu sebagai data otentik bahwa mungkin bisa di *full screen*. Jadi, data ini menunjukkan bahwa kami betul-betul satu asosiasi sekarang ya. Dengan kurang lebih anggota 2.500 Pak Martin ya

ANGGOTA KOMISI VI:

Marger Pak?

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Marger Pak ya karena presiden kan minta ya apa boleh buat. Presiden nanti pulang kampungnya ke mana masa milih salah satu asosiasi katanya, sudah satu asosiasi saja nanti.

Nah, Bapak dan Ibu sekalian mohon nanti *full screen* ya itunya presentasinya supaya lebih jelas terlihat. Dari anggota kami yang 2.500 ini Bapak Pimpinan sidang, kami tahun ini mendapatkan pertumbuhan ekspor yang mungkin paling fantastis sepanjang sejarah berdiri industri ini ya itu di angka pertumbuhan mohon maaf Pak, lebih daripada mamim Pak kami ya, di 26 kurang lebih Pak pertumbuhannya di tahun ini. Mungkin industri yang apa namanya, kenapa demikian Bapak dan Ibu, ini barangkali ada hikmah yang kami dapat ambil dari sulitnya Cina masuk ke Amerika ya orang mengatakan perang dagang gitu ya. Jadi, kalau tahun 2019 Cina masih kurang lebih sekitar \$38 miliar ekspor ke Amerika, lalu di 2020 dia mengalami penurunan yang sangat mendalam sekali ya kurang lebih hanya tinggal \$9,3 miliar, jadi ada \$24 miliar yang kosong. Nah, memang negara yang terkuat yang mau masuk ke sana adalah Vietnam Pak, kurang lebih sampai hari ini sudah mencapai angka kurang lebih antara kurang lebih \$12 miliar ya, kami sendiri kan baru mencapai \$3,3 miliar ya jadi hanya seperempat dari Vietnam kurang lebih seperti itu.

Jadi, sebetulnya ada ruang yang cukup besar yang bisa kami dorong untuk kemudian ke Amerika khususnya bisa membuat pertumbuhan lebih besar ya. Jadi, kita bisa lihat tunjukkan kenapa Amerika nanti grafiknya bisa kita lihat bahwa sampai 2024 ya itu di Amerika itu masih mengalami pertumbuhan Pak, di sana ada semacam *time up* bisa ditunjukkan grafiknya Pak Saiful Bahri. Jadi, momentum itu akan kita gunakan bahwa kita sangat mungkin mengalami pertumbuhan di tahun depan ya. Kami mengharapkan pertumbuhan sebetulnya di rata-rata 16%, Bapak Pimpinan sidang. Jadi, kalau kami pernah diberikan target oleh pemerintah dalam hal ini untuk bisa mencapai angka \$5 miliar untuk gabungan mebel dan kerajinan di tahun 2024 sebenarnya cukup dengan mengalami pertumbuhan 16% Bapak dan Ibu. Dan kalau kami mencapai angka \$5 miliar mungkin Vietnam sudah mencapai angka \$20 miliar barang kali negara yang hanya seperenam dari kita.

Lalu beberapa kasus yang mungkin kami ingin sampaikan di sini kalau tadi Bapak Pimpinan sidang minta ada data belanja yang diharapkan. Persoalan yang mendasar dari industri kami itu adalah di *supply* bahan baku. Mungkin kalau di mamim tadi ya tidak terlalu persoalan, di industri mebel dan kerajinan itu kita punya hutan terluas tapi ada masalah di bahan baku ya. Itu bisa saya tegaskan karena mungkin dengan pertumbuhan omset hari ini ya bisa kita lihat tren pertumbuhannya tadi sudah muncul terus hilang lagi nanti grafiknya itu. Itu memang Bapak dan Ibu, bahan baku yang menjadi krusial dan belakangan terutama rotan sepertinya jadi hilang dipermukaan itu ya. Jadi rotan data, data kami menunjukkan walaupun permintaan pasar cukup tinggi bahan bakunya sulit Pak. Kalau kayu tahun ini sudah mulai guncang memang ada kesulitan tapi masih bisa *support* dengan hutan rakyat. Kalau dari Perhutani dan lain-lain itu sangat terbatas ininya ya. Jadi, saya bisa mengatakan kalau industri kita mau kuat tumbuh dan bisa menjadi eksportir terkuat di kawasan ASEAN katakanlah atau mungkin bisa mengalahkan Vietnam maka yang pertama adalah *supply*

bahan baku yang harus aman ya. Tata niaga bahan baku mungkin harus kita perbaiki nomor satu Pak. Kemudian yang nomor dua barangkali ada satu hal yang kita sinyalir di dalam teknologi tepat guna Pak.

Bapak dan Ibu sekalian kalau saya lihat kalau untuk ngomong percepat industrialisasi suka atau nggak suka negara harus membantu kami mungkin mensubsidi sejumlah teknologi supaya bisa kejar percepatan yang terjadi di Vietnam ya. Nah, jadi mungkin itu yang point kedua. Yang ketiganya mau nggak mau di dalam riset itu ya desain *development* juga harus dikembangkan, karena industri mebel ini seperti industri *fashion*. Di mana, memang desain itu menjadi penentu. Kalau di tempat makanan minuman mungkin ya rasa ya Pak ya, mutu itu ya di antaranya ya. Tapi, di kami itu sebetulnya desain itu menjadi sangat krusial. Jadi, istilahnya kalau tidak ada desain yang bagus atau baru, aah nggak ada pasar, pertempurannya begitu ketat sekali begitu ya dan mungkin kegiatan-kegiatan pameran. Kami sendiri nanti bulan Maret rencananya Bapak Pimpinan sidang akan melaksanakan pameran. Pameran kami adalah yang terbesar di kawasan ASEAN biasa kami gunakan di J Expo kurang lebih 60 ribu meter kita pakai semuanya, ada 12 *buyer* dari seluruh dunia datang 124 negara dan transaksi *on the spot* itu \$300 juta dan ter *exhibition* biasanya bisa mencapai angka \$1 miliar. Jadi, sudah hampir 50% pendapatan anggota kami terutama UMKM-nya di pameran itu.

Namun demikian, karena situasi Covid kami agak kesulitan pasti ya untuk, kemarin sudah audiensi dengan pemerintah terkait kiranya bisa diberi kesempatan untuk tidak perlu karantinalah mereka masuk ke sini supaya mereka datang gitu kira-kira begitu. Karena, katanya Mandalika juga bisa kenapa nggak kita ya. Nah, tapi pemerintah mendukung kelihatannya ya saya tidak tahu persis gimana jalan ke luarnya supaya ekonomi kita juga mulai menggeliat dengan sejumlah *exhibition* ini.

Mungkin itu. Nah, ini beberapa contoh foto yang pernah kami lakukan dan Pak Presiden karena kebetulan beliau adalah komunitas dari kami dan suara inti beliau adalah di basis kami 2,1 juta suara adalah pelaku industri mebel dan kerajinan yang terkait. Kami rajin sekali *sowan* ke lapangan bersama Pak Gobel itu ya rekannya Pak Martin ini ya, karena Pak Rahmat beliau itu sangat konsen terhadap UMKM ya. Jadi, beliau sangat. Nah, sebetulnya yang mencanang \$5 miliar itu di awal Pak Gobel Pak, iya Pak Anggota sampai sekarang masih anggota tapi bisnisnya kan sudah ada yang urus yang lain Pak.

Nah, jadi sebetulnya itu Bapak dan Ibu sekalian kami menghendaki bahwa di 2024 itu ada terjadi pertumbuhan di angka \$5 miliar supaya optimal tercapai. Namun demikian, ada juga data impor kami yang terus cenderung meningkat dan pertumbuhannya lumayan malah sepertinya secara angka pertumbuhan lebih tinggi dari ekspor Pak. Walaupun, *valuenya* masih di angka kurang lebih 50% di bawah ya 40-an% ya. Tapi, pertumbuhannya tinggi sekali. Ini yang

mungkin kami khawatirkan saya nggak tahu gimana regulasinya untuk menangkal supaya laju pertumbuhan produk impor mebel ini dikurangi gimana caranya, karena ada IKEA yang buka mungkin mau 15 gerai katanya yang buka ya, ada Informa, ada Davinci, ada 42, 47. Barangkali, sekarang *brand-brand* yang masuk ke Indonesia karena mereka melihat pasar kita cukup besar sekali ya. Saya nggak tahu *policy*-nya dari DPR apakah

ANGGOTA KOMISI VI:

Di negara mana ini Pak?

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Paling besar Cina Pak ya, di sana ada data yang kami sertakan ya, tapi sampai dari Vietnam, dari Itali pun juga ada, dari Amerika juga ada gitu ya.

Bapak dan Ibu sekalian,

Sebetulnya yang paling krusial di antara produk impor ini mungkin bisa saja rekomendasinya khusus untuk mebel ditaruh di Papua barangkali gitu kan. Kalau, kita melarang nggak bisa di WTO-nya. Jadi, dari Papua ke sini kan lumayan sulit gitu ya, atau karena SNI bisa ditempuh sama mereka Pak ya. Sayang kita sudah dapat dolar kemudian dolarnya kita buang lagi ke luar kan. Karena, industri mebel ini menurut saya yang paling signifikan itu kan kandungan lokalnya tinggi sekali Pak di 85% ya. Jadi, kita dapatkan dolar jangan sampai ke luar. Nah, isu yang terakhir Pak Martin yang kami dapatkan di lapangan keluhan sehingga

ANGGOTA KOMISI VI:

Izin, izin.
Dari Cina wujudnya apa ya?

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Semua mebel Pak.

ANGGOTA KOMISI VI:

Mebel.

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Barang jadi Pak, barang jadi. Ya saya tidak tahu apa yang diduduki ini juga nggak tahu dari Cina barangkali ini kita harus teliti nanti ya. Tapi, kalau yang

ini Indonesia Pak ini yang solid ini. Tapi, kalau yang diduduki Pak Martin dan Bapak-bapak/Ibu semua saya harus ragu harus saya cek ini nanti supaya

ANGGOTA KOMISI VI:

Informa-informa.
Harusnya dari asosiasi Pak ini kursinya.

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Iya sepertinya kalau lihat dari kebijakan pemerintah kan harusnya sudah

ANGGOTA KOMISI VI:

Ini Mba Evita ntar bisa jawab itu *online*, BURT.

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Nah iya, kemarin apa kemarin omset kami juga mungkin tidak terlalu signifikan sekali, harusnya tumbuh di angka 36 karena ada logistik Pak yang masalah ya. Jadi, kenaikan logistik tolong dilihat ditunjukkan datanya Pak, mendekati 1000% kenaikan harganya. Ini yang, yang menurut saya menurut kami ya itu tidak masuk akal gitu ya pertumbuhan di 1000%. Pak, ini masalah kita bersama Pak bukan hanya masalah di HIMKI. Tapi, karena HIMKI ini kan balki barangnya ya kalau mamin kan kecil-kecil bisa masuk lewat udara juga bisa. Kalau, mebel ini gede-gede balki Pak jadi kita 12ribu kontainer satu bulan itu mangkrak Pak kita di lapangan ya.

Usulan kami sih kalau pemerintah memang mencanangkan poros maritim dan ingin menjadi negara maritim terkuat ya mestinya punya armada antar benua Pak gitu ya. Seperti dulu pernah punya katanya ya Jakarta Lloyd gitu ya harusnya diadakan kembali kalau nggak kami bergantung sekali kepada *shipping line* asing.

Mungkin itu dari saya, yang salah satu yang krusial yang ingin kami usung di pagi ini Pak Martin bahwa istilahnya ada SVLK Pak ya. Kalau di luar negeri namanya flekty di kita SVLK itu produk itu sebetulnya berhenti dari Uni Eropa, tetapi datang di Indonesia dibungkus menjadi mandatory, sistem verifikasi legalitas kayu. Kami keberatan Pak Martin karena terus terang saja ketika kami bertarung dengan bangsa lain termasuk di Cina, Vietnam, Malaysia yang melenggang mereka tidak, tidak diwajibkan ber-SVLK, tapi kenapa negara kita ini mewajibkan SVLK kepada kita. Kalau saja semua negara diberlakukan sama oleh Uni Eropa mari kita paling depan. Ini nggak hanya kita dan yang memberlakukannya bukan negara itu karena harus *equal* kan, negara Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan mendapat mandat dari LHK disetujui

oleh Kementerian Perindustrian. Menurut kami ini blunder, sehingga UMKM terbebani dengan begitu mahal biaya ya, satu kasus untuk mendapatkan SVLK saja bisa di angka Rp40 juta kalikan 2.500 anggota kami, bahkan ada 5 ribu tercatat dan setiap kali kami kirim ekspor per kontainer berapa Pak Ebu? 100 ribu per kontainer per dokumen Pak, bayangin ya. Berat, katanya mau efisiensi di industri tapi gara-gara regulasi itu kami menderita sebenarnya. Ini yang kami ingin sampaikan jadi cukup di hulu saja ya SVLK itu. Bahwa kami di hilir *user* di hilir itu pasti membeli produk kan halal dari Perhutani atau dari ISWA dan kawan-kawan, cukup bahwa produk ini. Saya masih ingat di waktu Pak Gobel menjadi Menteri beliau mencanangkan tidak perlu SVLK tapi cukup dengan deklarasi ekspor.

Jadi, kebutuhan kami menggunakan kayu halal ya cukup begitu ya, kalau yang sekarang kan dengan regulasi sekarang berarti, oh hati-hati ini bangsa ini bangsa maling ini tolong diperiksa kayunya. Jadi, begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah Cina, Vietnam, Malaysia, dan negara lain melenggang tanpa diperiksa, padahal kayu jelas *nyolong* dari kami ada mereka. Jelas-jelas *nyolong* masa ada merbau di sana nggak ada, di Cina ada merbau, melenggang. Nah, itu jadi mungkin ini adalah salah satu yang krusial domainnya ada di LHK, tujuannya mungkin salah satu yang dicanangkan agar kita betul-betul mendapatkan kayu yang halal. Tapi, sebenarnya cukup di hulu saja nggak usah sampai ke hilir karena cukup mahal biayanya.

Mungkin itu dari teman-teman saya barang kali ada yang mau menyampaikan, silakan si Sherlina.

KETUA RAPAT:

Oke nanti kita ini saja Pak supaya semua dulu menyampaikan, sekarang ke Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi).
Silakan Pak.

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Terima kasih Bapak Pimpinan sidang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,
Syalom,
Om swastiastu ,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan

Yang terhormat Bapak Pimpinan serta Anggota Komisi VI baik yang hadir secara daring ataupun luring,

Dan teman-teman asosisasi dari GAPMMI, dari HIMKI, dari PPAK,

Saya Shelly Taurhesia Ketua Bidang Perdagangan Perkosmi yang mewakili Bapak Ketua Umum, Bapak Sancoyo Antarikso yang berhalangan tiba-tiba sakit Pak, padahal sudah persiapan antigen segala. Namun, saya didampingi oleh Ibu Lian Ketua Bidang Perindustrian, Bapak Raditya Iwan dari bidang perindustrian, Ibu Rifa dari teknis dan ilmiah, Ibu Gracia Ketua Bidangnyanya, dan Ibu Neni dari Sekretariat. Terima kasih, ini kali pertama kami hadir di Komisi VI Bapak. Jadi, perkenalkan kami untuk memperkenalkan siapa si Perkosmi itu gitu ya.

Adapun boleh dibantu PPT-nya telah kami serahkan, baik kerangka presentasi kami dalam tujuh menit ini kami akan bagi dua ya nanti masukan akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Kami akan menyampaikan siapa itu Perkosmi dan berapa besar si bisnis kosmetik di Indonesia gitu ya, nanti masukan disampaikan oleh Bapak Iwan.

Baik *next slide* Mba oke, visi misi Perkosmi ya visinya itu menjadi wadah perusahaan-perusahaan kosmetik di Indonesia untuk mendukung pengembangan bisnis kosmetika Indonesia dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk industri kosmetika agar konsumen dapat menikmati produk yang aman, baik, dan inovatif. Sebenarnya *slide*-nya berikutnya ya. Kami mempunyai dalam rangka *men-deliver* visi tersebut kami mempunyai lima misi yang sudah ada di *slide*. Nah boleh dicepatkan dua *slide* berikutnya Mba, oke.

Perkosmi itu dibentuk 17 Juni 1977. Jadi, kami akan berulang tahun ke 45 *Insya Allah* tahun ini, oke dan saat ini kami mempunyai 7 pengurus daerah ya. Jadi, tidak tersentralisasi di Jakarta saja tapi ada di Sumatera Utara, ada di Banten, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan Bali ya. Dan anggota kami saat ini selama covid memang ada penurunan sekarang kami beranggotakan 543 untuk 7 kepengurusan di pengda tersebut tersebut. Anggota kami terdiri dari industri, baik kecil, sedang, besar, pemasok ya, *supplier* bahan baku, kemasan, mesin, distributor ya ataupun konsultan. Jadi, individual ya perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, baik *next*. Seolah-olah kosmetik itu persepsinya adalah hanya untuk kaum hawa, padahal semua orang baik dari lahir ataupun sampai lansia menggunakan kosmetik yaitu perawatan kebersihan tubuh atau *personal care*, gitu ya cuma identiknya itu kosmetik lipstik, rose gitu ya yang deklaratif saja gitu ya. Ini adalah definisi kosmetik yang, yang atas itu yang dikeluarkan oleh Badan POM yang telah terharmonisasi di ASEAN. Jadi, ASEAN pun definisi kosmetik seperti itu, *next*.

Kalau kita ke KBLI-nya nomor berapa sih, berdasarkan tahun 2020 KBLI kosmetik itu di 2023, *next*. Bagaimana sih besarnya bisnis kosmetik di Indonesia ya. Pada tahun 2021 apa kosmetik di Indonesia itu sebesar *equivalent* dengan rupiahnya saja ya 91 triliun, karena kalau nyebutin dalam USD nanti Bapak-

bapak ngitung lagi Ibu-ibu repot gitu ya, oke. Tadi bahwa kosmetik itu bukan hanya dekoratif tapi *personal care* gitu ya dan apa kalau kita lihat di kebetulan pembina kami itu adalah Badan POM ya. Jadi, yang mengatur izin edar atau apa itu Badan POM. Kalau kita amati di websitenya Badan POM biasanya kami dengan Komisi IX Bapak. Jadi, kalau di websitenya Badan POM itu jumlah pendaftaran kosmetik itu lebih banyak dibandingin komoditi lain yang di *supervise* oleh Badan POM. Entah itu mamin, mamin itu hanya 148 ribu dalam lima tahun izin edarnya sementara kosmetik itu 215 ya. Jadi, di situ ada indikasi inovasi yang cepat ya, karena jumlah yang didaftarkan dan kompleksitas yang beredar di pasaran.

Untuk *grows rate*-nya, *compounding annual grows rates* itu diprediksi 5,34% seperti juga mamin. Apa memang *online sales growing* ya bahkan tahun 2021 itu 13,3%. Kontribusi karena kita juga punya anggota industri ya UKM itu banyak Pak anggota kami yang UKM. Ditambah dengan demografi Indonesia gitu ya, kemajuan digital, teknologi gitu ya sehingga kami masih yakin bahwa kosmetik akan *growing*. Sementara berdasarkan PP 14 Tahun 2015 rencana pembangunan industri nasional, kosmetik itu termasuk industri andalan jadi sepuluh industri prioritas ada enam industri andalan salah satunya adalah kosmetik. Nah, ini kami juga apa namanya kosmetik halal di Indonesia, Indonesia sebagai negara muslim yang terbesar di dunia ya 87% mungkin lebih begitu ya populasinya adalah muslim. Indonesia itu merupakan konsumen yang terbesar, konsumen apa halal yang terbesar gitu ya. Di dunia itu ada *84 billion consumer* yang apa yang di-*spend* tahun 2020 ya untuk kosmetik itu *4,19 billion* untuk kosmetik. Belanja kosmetik oleh konsumen muslim *worldwide* adalah *66 billion* gitu ya tahun 2019 dan diestimasi masih bertumbuh hingga *76 billion* di tahun 2024. Sehingga, hal ini karena memang UUJPH sudah keluar 2014 diwajibkan mulai 2019. Namun, kosmetik ada *grace period* lima tahun sampai 2026 karena kewajiban untuk kosmetik dimulai 2021 beda dengan yang lainnya.

Apa namanya *next* boleh *next*.

Nah, ini mulailah jadi itu *introduction* mengenai Perkosmi itu siapa, kosmetik di Indonesia bagaimana, kosmetik halal bagaimana, tantangan. Seperti tadi digaungkan oleh GAPMMI saya mengechokan saja ya Pak. Bahwa bahan baku adalah isu terbesar buat kami. Memang kita negara *biodiversity* yang kalau nggak ketiga keempat ya kaya begitu akan bahan alam gitu ya. Namun, gitu ya untuk persyaratan bahan tersebut bisa dipakai kosmetik masih banyak persyaratan-persyaratannya yang memang belum datanya nggak tersedia gitu ya jadi sayang gitu ya. Nah, oleh karena itu 90% bahan dasar kosmetik bahan baku kosmetik itu masih diimpor gitu ya. Jadi, kami khawatir karena kosmetik juga ada yang merupakan turunan dari CPO ya, kaya misalnya bahan dasar pembersih gitu surfaktan-surfaktan itu turunan CPO atau *emulsifire*, oke *next*.

Nah, namun, Kementerian Perindustrian itu sudah mentargetkan akan mengembangkan atau menyediakan di lokal ada 11 ya 11 item. Kosmetik itu

cepat sekali seperti contoh di nomor yang saat ini Kementerian Perindustrian sedang mengusahakan untuk menyediakan di lokal. Namun, pergerakan kosmetik itu di dunia sangat cepat sehingga belum terealisasi regulasi sudah berganti, kaya misalnya sodium salisilat ya kalau misalnya jerawat atau apa itu dibatasi. Kalau dulu boleh untuk segala sediaan sekarang itu untuk yang apa *dusty-dusty* ya yang meng itu apa bisa terinhalasi dibatasi. Begitu juga untuk apa namanya *zinc pyrithione* yang apa shampo anti ketombe gitu ya itu dibatasi juga.

ANGGOTA KOMISI VI:

Izin Bu, yang batasin siapa ya?

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Kenapa Pak?

ANGGOTA KOMISI VI:

Yang Ibu maksud membatasi itu siapa?

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Oh jadi kita Pak negara Indonesia itu kan tergabung dengan ASEAN, kita sudah harmonisasi sejak 2008. Di ASEAN itu kita meng apa ya merujuk kepada peraturan di Eropa Pak, kenapa, karena kan Eropa terdiri dari 27 negara bukan ke US gitu kan regulasi-regulasi banyak. Nah, oleh karena itu, kita pikir Eropa. Nah, pergerakan di Eropa yang mereka mempunyai panel *scientific* gitu loh Pak namanya SCCF itu mengkaji wah ternyata ini tidak aman bisa terinhalasi. Kalau Bapak ingat dulu bahwa pernah terjadi *pro and kon*, kenapa si kosmetik kok masih boleh pakai *formaldehit* sementara gitu ya tahu apa segala macam karena kan kita beneran di-*dosing*. Nah, saat ini *formaldehit* juga sudah nggak boleh dipakai Pak jadi begitu cepat gitu Pak perubahannya gitu ya

ANGGOTA KOMISI VI:

Maksudnya jadi yang batasin Eropa atau pemerintah kita Bu?

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Oh jadi data *safety* data keamanan dari negara berkembang Pak.

ANGGOTA KOMISI VI:

Oh

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Dari Eropa.

ANGGOTA KOMISI VI:

Dari negara tujuan ya?

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Bukan-bukan, dari negara Eropa dikaji Pak oleh regulator di ASEAN ya, dikaji jadi nggak semata-mata langsung di-*adopt* nggak. Dan ternyata oleh pakar-pakar di negara ASEAN itu diputuskan data keamanan tersebut memang begitu adanya yang patut dikhawatirkan. Nah, oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sepakat dan melarang gitu atau

ANGGOTA KOMISI VI:

Oh dari kementerian?

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Badan POM Pak.

ANGGOTA KOMISI VI:

Oh Badan POM, oke-oke.

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Iya ASEAN terus Indonesia, salah satu negara ASEAN juga menyepakati. Vokal poinnya di dalam ASEAN itu adalah Badan POM ya. Sebenarnya si ACCSQ-nya BSN Pak ya mitra Bapak gitu tapi kan kita yang teknisnya ya TWG-nya ya Pak. Baik ini adalah *next*, itu tadi *challenge* yang sama kaya apa asosiasi lainnya bahan baku masih terkendali gitu kan masih terkendala dan kami juga dihadapi dengan logistik masalah logistik. Tadi tenang Pak yang *furniture* kami juga mengalami apa logistik baik oversis ataupun antar pulau ya. Jadi, baru-baru saja Pak, ini sih kita sebagai pelaku usaha pasti ikut terhadap peraturan Pak, apabila waktunya itu cukup jadi nggak ada sama sekali kita mau tidak mengikuti peraturan gitu ya. Namun, ada beberapa peraturan Menteri Perdagangan yang memang diundangkannya itu April tapi baru keluarnya Oktober Pak dan itu mengenai apa tehnikal verifikasi Pak LS ketentuan LS untuk impor gitu ya. Bayangkan kalau misalnya *shipment* dari Amerika ataupun Eropa yang mungkin memakan waktu dua bulan gitu ya jadi akhir Oktober dikeluarkan, 1 Januari berlaku dan itu ketentuannya *diloaded port* jadi sebelum di *ship* gitu ya. Nah, itu

yang apa kalau waktu sosialisasinya itu cukup kita juga mau kok mengikuti gitu ya, oke apa namanya sambil kita memaparkan seberapa jauh sih hal ini akan menyulitkan atau tidak gitu ya oke.

Dan yang lainnya itu adalah kosmetik ilegal dan palsu gitu ya, dengan bertumbuhnya *e-commerce* gitu kan merupakan peluang dan tantangan, *next*-nya. Ini adalah salah satu contoh gitu ya *next* Mba. Selanjutnya *slide* selanjutnya ini ada contoh ya di Ali Express gitu ya, produk ini bahkan tidak terdaftar di Badan POM gitu. Jadi, produknya ilegal kita nggak tahu *market place*-nya itu apa memang punya PSE di sini gitu ya sudah berizin gitu ya. Tapi, ini produk yang saingan kita gitu loh baik kosmetik impor yang legal ataupun kosmetik dalam negeri gitu loh tiba-tiba ada produk ilegal.

Yang kedua *next* bahkan bukan hanya menyaingi dari segi bisnis ya, keberbahayaannya kita khawatir karena dia tidak terdaftar kita nggak tahu apakah bahan yang dikandung itu tidak ada bahan-bahan yang dilarang gitu ya karena tidak terdaftar, *next*. Nah, meskipun Badan POM juga selalu mengedukasi masyarakat gitu ya dalam membeli produk cek dulu apakah ada nomor izin Badan POM. Tapi, kadang-kadang ya masyarakat gitu ya karena internet penetrasi di Indonesia juga tinggi ya begitu melihat ini *booming* di media sosial gitu ya langsung ikut-ikutan gitu ya beli juga, oke *next* Mba, *next* oke.

Nah, ini kalau kita susun tadi tantangan yang dari kami adalah rantai pasok bahan baku logistik tadi baik yang dari impor ataupun antar pulau ya. Kita menghadapi ber apa *playing field*-nya nggak beda gitu ya dengan kosmetik ilegal ataupun palsu gitu ya. Nah, yang keempat ini sebagai pelaku usaha kebetulan kosmetik itu tidak dikatakan produk esensial ya, bukan kaya obat tradisional atau obat gitu ya. Jadi, kami ingin sekali ini yang kemarin vaksin gotong royong itu kalau *booster* itu apa itu masih belum ada peraturannya gitu. Jadi, apakah diperkenankan *booster* Moderna atau Pfizer atau apa gitu ya untuk yang Sinovac.

Mungkin kami berbagi dengan rekan kami izinkan Pak Pimpinan.

BIDANG PERINDUSTRIAN PERKOSMI (RADITYA IWAN):

Mohon izin Bapak.

ANGGOTA KOMISI VI:

(Tidak menggunakan mike).

BIDANG PERINDUSTRIAN PERKOSMI (RADITYA IWAN):

Oh iya siap Pak.

Terima kasih mohon izin

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Saya melanjutkan dalam tantangan regulasi yang pertama halal, yaitu di mana kami Perkosmi juga mendukung Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengenai kewajiban, sertifikasi, yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan ini kewajiban sertifikasi ini mulai 2026. Jadi, kami sudah banyak persiapan-persiapan untuk itu. Namun, hal ini tentu saja ada beberapa tantangan yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Selly bahwa sebagian besar bahan baku itu adalah impor. Nah, kami kesiapan-kesiapan dari para *supplier-supplier* impor itu untuk memenuhi sertifikat halal itu memang masih menjadi kendala Bapak dan Ibu. Nah, hal ini yang mungkin kami juga sudah banyak beraudiensi dengan BPJPH di mana sudah mulai dicanangkan untuk pengakuan lembaga halal luar negeri untuk bisa diakui kerja samanya ini dan kami juga mohon untuk tidak saja pengakuan dalam bentuk kerja sama luar negeri, pengakuan bahan baku tapi juga pengakuan produk jadi. Jadi, pada prinsipnya adalah mengenai simplifikasi proses halal sertifikasi itu sendiri yang ini merupakan masih tantangan di kami dan juga mengenai biaya tarif walaupun sudah banyak regulasi dari pemerintah tapi kami dari UKM juga merasakan masih mahal biaya tersebut ya masih merasakan.

Kemudian yang kedua yang cukup penting adalah tadi penerapan *Online Single Submission* Berbasis Resiko (OSSBR) yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden melalui PP Nomor 5 2021. Nah, pada prinsipnya Perkosmi tentu mendukung dan mengapresiasi penerapan ini namun dalam pelaksanaannya implementasinya antar kelembagaan terkait itu kami melihat masih ada kendala terutama dalam perizinan. Salah satu contohnya misalnya kami ada izin produksi kosmetik yang tadinya ada di Kementerian Kesehatan harus berpindah di Kementerian Perindustrian. Namun, belum siap di sana sehingga yang kami mau melakukan pembaruan izin jadi mengalami kendala disitu, itu pertama. Terus kemudian ada ketentuan juga dari Kementerian Kesehatan mengenai kewajiban baru untuk distributor kosmetik mempunyai penanggung jawab kosmetik seperti apoteker yang ada di tiap-tiap distribusi. Tentu saja ini sangat memberatkan bagi kami, kami seperti dianggap sebagai VBF Pak produk apa distributor farmasi dan ini kami sebetulnya menyarankan untuk bisa ditinjau ulang karena setiap provinsi kami harus mempunyai apoteker tadi. Di mana saat ini peraturan yang ada adalah pabrik selalu, kami sudah punya Pak kami bertanggung jawab untuk yang di pabrik seperti itu. Kemudian dan juga dengan OSSRB ini juga kami masih melihat adanya duplikasi pelaporan produksi dan distribusi, baik kami melakukan ke berbagai kementerian, ke Badan POM dan kami ingin, kalau bisa nanti juga ini bisa terintegrasi pelaporannya tidak duplikasi.

Selanjutnya, juga yang paling penting juga mengenai peta jalan pengurangan sampah Pak. Tentu dari industri kosmetik kami masih melakukan

sosialisasi baru sedikit yang *submit* untuk *report*-nya dan salah satu yang apa namanya kami masih memberatkan adalah kalau bisa disederhanakan adalah pelaporan ini masih setiap produknya. Tapi, kalau bisa usulan-usulan kami adalah di dalam bentuk kemasannya Pak seperti itu. Jadi, ini kami memang masih banyak melakukan berbagai sosialisasi.

Dan selanjutnya tentu saja kami juga mendukung mengenai *renewable energy* dan *sustainability* yang juga akan dikordinasikan oleh Kementerian KLH, Kementerian Perindustrian. Namun, misalnya perlu peraturan-peraturan yang terintegrasi juga dan *cost* efektif karena misalnya penerapan solar sistem untuk pengurangan *carbon footprint* itu kami merasakan juga masih cukup mahal kalau dibandingkan dengan kami menggunakan listrik atau bahan baku batu bara.

Selanjutnya, juga kami cukup aktif melakukan sosialisasi di era pandemi seperti *digital marketing* bekerja sama dengan Kementerian-kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Badan POM, sosialisasi juga berbagai peraturan yang terkait untuk membantu anggota kami dan juga fokus kepada UKM untuk *go to e-commerce* Pak.

Itu saja dari kami Perkosmi. Kami akhiri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik makasih Pak.

Kita lanjut ke Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia.

KETUA PPAK (SOLIHIN SOFIAN):

Baik terima kasih.

**Yang saya hormati para Anggota Dewan baik yang hadir pada ruang rapat hari ini atau pun yang mengikuti dari *online*,
Yang saya muliakan Pimpinan rapat pada hari ini yaitu Bapak Martin Manurung,**

Selamat siang Pak, kita sudah masuk siang.

Perkenalkan saya Solihin Sofian, Ketua Umum dari Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia. Kami sekarang sudah beranggotakan sekitar 200 anggota yang terdiri dari termasuk Asosiasi Spa dan pemasok bahan baku. Kami mempunyai sembilan DPD tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, NTB, Bali, Lampung, dan Kalimantan Barat. Adapun visi *next slide*, *next slide please*, tolong, boleh *next*

slide. Iya saya tidak membaca visi misinya tapi yang pasti adalah PPAK Kosmetika kami selalu melakukan mitra dengan pemerintah termasuk dengan hari ini, ini adalah kita bekerja sama dengan bidang di bidang legislasi. Tujuannya adalah bagaimana PPA Kosmetika ini mewadahi industri kosmetika lokal *brand* nasional baik besar ataupun UKM yang ada di Indonesia, itu menjadi bagian penting dari visi misi dari PPA Kosmetika.

ANGGOTA KOMISI VI:

Izin, izin Pimpinan.

Ini jadi dua asosiasi yang berbeda gitu ya kira-kira ya?

KETUA PPAK (SOLIHIN SOFIAN):

Sama tapi tidak mirip Pak.

ANGGOTA KOMISI VI:

Oke makasih.

KETUA PPAK (SOLIHIN SOFIAN):

Iya tapi lahir dari tempat yang sama.

Kalau bedanya PPA, kosmetika. Kami semua adalah lokal *brand* nasional, ya kalau Perkosmi ada maaf ya Bang ya ada segi blasterannya. Iya jadi jadi kira-kira begitu Pak Pimpinan sidang ya. Nah, *next slide*, iya saya lanjut saja ke *next slide* karena itu adalah seperti pengantar dari profil PPAK tadi sudah, iya *next slide*. Iya kita tahu bahwasanya kosmetika sebetulnya adalah estetika bukan obat tadi. Tadi, sempat diulas bagaimana kita dikenakan dengan sebegitu banyak regulasi seakan-akan kita adalah pdf ya, tapi sebetulnya kita adalah estetika atau kosmetik.

Kosmetik itu mencakup pada *make up based* yaitu seperti bedak, *foundation*, *baby cream* dan lain-lainnya, juga dekoratif yang *eye shadow*, maskara, lipstik dan seterusnya, juga termasuk di antaranya adalah *personal care* yaitu *body lotion*, *body scrub*, *body lotion*. Di sini kita bisa melihat sebetulnya kosmetika ini juga ada dua golongan besar Pak, Pak Pimpinan Pak Martin yaitu ada yang *long list* yaitu *personal personal care* hanya bilas sabun dan segalanya lotion itu termasuk bentuk kelompok yang *long list* sekali.

Lima tahun terakhir itu terdapat 2015 seperempat produk baru yang terdaftar di Badan POM. Bahkan tadi datanya kita melihat melebihi daripada makanan dan minuman. Memang pada masa pandemi ini ternyata melahirkan banyak *start up*, banyak generasi-generasi kita di (...) hal itu yang di era milenial juga begitu hebat sekali dengan ide-ide mereka, mereka punya ide, mereka

punya komunitas, mereka punya jaringan, dan mereka bisa melakukan *marcom* ke industri komestika, sehingga industri kosmetika di berbagai *marcom* mengalami peningkatan. Padahal, pada awal pandemi industri kosmetika hampir dikatakan jatuh mencapai 10%, siapa lagi bicara mengenai cantik, siapa lagi mau menghias pada saat itu bukan hal yang utama, tapi karena Badan POM mengizinkan industri kosmetika memproduksi *handsanitizer* yang namanya *handjell* sehingga industri kosmetika bisa bertahan atau *survive* pada saat pandemi. Untuk hal ini saya ucapkan apresiasi PPAK Kosmetika ini mengapresiasi Badan POM sehingga industri kosmetika bisa berjalan sebagaimana layaknya.

Tentu ini juga diimbangi oleh Kementerian Perindustrian memberikan izin IMQ sehingga industri bisa melaksanakan proses produksi sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan sesuai dengan anjuran dari pemerintah, sehingga ini tentu akan menekan kejadiannya angka pemutusan hubungan kerja yang nantinya akan berimbas pada angka pengangguran, tentu terhadap daya beli dari masyarakat itu sendiri. Untuk hal ini PPA Kosmetika mengapresiasi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, selanjutnya *next*.

Potensi kosmetika halal di pasar global. Kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negeri dengan, dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Kita tahu bahwasanya produk halal yang beredar di dunia itu berkisar sekitar US\$2,1 triliun, 11%-nya adalah produk dari kosmetika. Alangkah sayangnya Indonesia dengan kondisi dan *culture* seperti ini tidak bisa mengambil peluang ini. Padahal, kita mempunyai sumber bahan baku alam yang sangat besar sekali, bukan nomor tiga atau bukan nomor empat tapi nomor dua di dunia setelah Brazil. Ini harus kita manfaatkan industri kosmetika harus punya wajah tersendiri. Kalau kita bicara mengenai murah mungkin ada negara Cina, tapi kalau kita bicara mengenai produk halal itu harus Indonesia, itu sudah harus karena ini adalah panggung kita. Nah, jadi kita tahu bahwasanya pada awal-awal ini Kementerian Perdagangan melakukan satu kegiatan yang sangat-sangat kami hargai yaitu Jakarta Muslim Fashion Week, itu adalah *kick off* mempersiapkan bagaimana industri halal nanti ke depan Indonesia menjadi misi yang terbesar di tahun 2020-an yaitu global halal *hoop* tadi.

Kami sungguh berharap PPA Kosmetika berharap Komisi VI akan memberikan dukungan penuh *full speed, full power* kepada Kementerian Perdagangan apa pun terhadap semua kegiatan yang berinteraksi berhubungan bagaimana meningkatkan produk halal di Indonesia, tentu bagi kami adalah kosmetika yang halal. Kami tahu di sini ada Kawasan Industri Halal (KI hal) ini menjadi hal yang baik. Kita tahu bahwasanya proses halal di Indonesia ini berjalan lebih rigid atau lama, kenapa, kalau mungkin di negara lain itu diperiksa hanya pada *finish* produknya, tapi di Indonesia itu diproses seluruh proses, bahan bakunya dari mana, prosesnya seperti apa, kemudian hasil akhirnya

seperti apa ini kesannya rigid, tapi ini bisa menjadi, *we can made our history to this country*, kalau mau mencari produk halal yang benar-benar kompetensi yang baik maka itu adalah Indonesia. Kesulitan ini harus diceritakan sehingga menjadi nilai plus tapi tentunya kami mengharapkan dukungan dari BPJPH juga karena biayanya juga cukup besar, prosesnya juga cukup lama ya. Jadi, kita harapkan ini menjadi satu bagian yang bisa kita bangun bersama, jalan bersama dengan tujuan yang besar yaitu kita harus bisa menjadi industri kosmetika halal terbesar di tahun 2024 kita ke G20 momen itu bisa kita manfaatkan. Untuk hal ini PPA Kosmetika juga mengapresiasi kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *next slide please*.

Nilai kosmetika ekspor dan impor Indonesia, secara keseluruhan seperti tadi saya katakan setelah industri kosmetika pada bulan 3 2020 itu jatuh tapi kemudian *reborn* kembali tapi sampai sekarang pun masih belum mencapai titik *reborn* yang senormal yang tahun-tahun yang lalu yaitu YOY-nya, masih mencapai sekitar 65 sampai 67% tapi itu sudah *alhamdulillah*, karena kami yakin di tahun 2020 pasar-pasar *offline* akan kembali dibuka karena tidak semua kosmetika bisa dijual secara *online*. Bagaimana kita bisa *taste* sebuah *best* dari sebuah kosmetik, tidak bisa disentuh di layar komputer. Bagaimana kita bisa mencium aroma dari kosmetik, tidak bisa dilakukan secara *online* tapi harus dengan cara *offline*, dengan dibukanya kembali sesuai dengan protokol kesehatan maka ini tentu akan meningkatkan perdagangan kosmetik di dalam negeri. Begitu juga kami harapkan bisa ekspor produk ini ke luar negeri, karena kita lihat disini nilai impor kosmetika tanah air kita masih sebesar 630, tapi eksportnya hanya 462, artinya kita masih minus, masih lebih banyak importasinya. Di sini juga kita bisa melihat sebetulnya pasar kosmetika Indonesia ini masih lebih besar, kita tidak boleh mengecilkan mereka, tapi karena bagi kami mereka adalah seorang guru dengan segala kelebihan yang kita akan pelajari, tapi pelaku industri kosmetika nasional lokal *brand* itu juga menjadi aset negara ini terutama di IKM-nya, lanjut *slide, next slide, next, next* iya.

Nah, melihat pada kondisi sekarang ini bahan baku industri ini naiknya luar biasa Pak Martin, luar biasa, sehingga apa yang dilakukan oleh PPA Kosmetika adalah kami sudah mulai melakukan langkah-langkah dari dua tahun yang lalu. Meningkatkan pemakaian bahan baku alam ke industri kosmetika seperti kami ke Lombok, ke NTB, bagaimana memanfaatkan rumput laut sebagai bahan dasar kosmetika Indonesia, kami ke Bali, kami ke Kalimantan, kami angkat semua bahan-bahan dasar yang ada di Indonesia ini supaya dihasil dibikin sebagai bahan dasar untuk bahan kosmetika Indonesia, sebagaimana kita tahu bahan dasar alam Indonesia ada pepaya. Di sini juga ada bengkoang, ada sirih ya. Nah, itu juga merupakan bahan-bahan dasar alam yang ada di Indonesia yang sangat bagus sekali kalau diaplikasikan sebagai bahan-bahan dasar kosmetika Indonesia dengan nuansa *this is Indonesia cosmetics product*, ya itu sangat penting.

Nah, hal ini tentu harus bisa menjadi atensi kita semua juga, karena kita tahu semua bahan-bahan dasar yang begitu akan kita ajukan sebagai bahan dasar kosmetika itu mengalami suatu proses terkait pada biaya dan tenaga ahli yang ada juga ya. Nah, kita tahu bahwasanya kita punya Puspitek tapi kurang dimanfaatkan Pak Martin ya. Kita harus galakkan kembali biar *research* juga itu menjadi bagian yang cukup besar.

Sebagai satu bahan perbandingan Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, koustik soda itu harganya naik dari 8 ribu 5 dari 8.500 menjadi 23.700, bisa bayangkan kenaikannya mencapai 182%. Bahan plastik, kemasan, juga mengalami kenaikan sebesar 14% tapi ini akan terus naik dan karena apa, kelangkaannya semakin terasa, minyak kelapa, minyak sawit sebagai bahan dasar pembuatan sabun itu juga mengalami kenaikan dari 14 ribu menjadi 28 ribu, artinya 71%. Ini tentu akan menjadi kendala menaikkan COGS, bagaimana negara tetangga yang sama dengan kita tapi harga minyak sawitnya tidak semahal kita. Ini akan membuat investasi akan lari ke negeri seberang karena di sini bahan bakunya lebih mahal, *next slide please*. Nah, ini yang tadi sempat saya katakan bahan baku kita tinggi. Kemudahan berusaha, tadi sempat disinggung oleh, oleh Perkosmi yaitu PMK14 2021, setiap produk *brand* daripada kami sebetulnya di pabrik kami sudah punya penanggung jawab produksi tapi di PMK14 itu harus ada lagi jaringan distribusi, sehingga itu seperti *double loyal*. Tentu ini meningkatkan *cost* jadi kami harapkan kepada Bapak-bapak/Ibu-ibu yang kami hormati, sebagai anggota Dewan di sini bisa membantu supaya PMK14 ini dibikin lebih *soft*. Karena, ini tentu akan meningkatkan biaya secara tidak langsung kepada COGS produk kami yang dijual di distribusi.

Gangguan akses OSS RBA tadi sudah juga dijelaskan kita hampir sama kendalanya adalah pada saat OSS RBA itu dijalankan, diimplementasikan terjadi persinggungan antara izin produksi dari Kemenkes itu ke Kementerian Perindustrian. Bagi kami industri harusnya ada di Kementerian Perindustrian. Mohon maaf tapi menurut kami harusnya ada di ada di Kementerian Perindustrian. Tapi, kami juga sangat apresiasi terhadap Kementerian Kesehatan karena merekalah maka vaksinasi Indonesia termasuk kepada pekerja-pekerja yang ada di industri kosmetika berjalan dengan baik dan lancar, *next slide*, iya. Tadi sinkronisasi regulasi biaya halal yang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwasanya industri kita perlu produk halal dan itu sudah berjalan dan biayanya cukup besar, ini Permendag 56 karena ini waktu memang terakhir ini biasanya agak, agak menderita ya karena waktunya terpotong, nomor 56. Nah, ini adalah Permendag yang bagaimana pemanfaatan daripada, daripada produk lokal itu yang ada itu dimanfaatkan sebaiknya di semua *outlet* yang ada apa di hotel ataupun di restoran.

Nah, repretisi laporan produksi dan distribusi ini termasuk salah satunya tadi Pak. Jadi, menjual berapa pun itu harus lapor kemana-mana. Jadi, seperti obat loh alangkah repotnya loh. Ya jadi ini kami mohon supaya bisa ditinjau

kembali di PMK14 2021. Jadi, kami ini kosmetik loh Bapak/Ibu sekalian, tapi diperlakukannya seperti obat, kami klaim kayanya seperti obat juga pasti ditolak ya, nah lanjut *next slide*.

Nah, biaya ekspor mahal kenapa, karena ada negara yang masih menerapkan belum fiskal belum 0% seperti di Turki ya, terlebih-lebih lagi biaya kontainer yang begitu naik luar biasa. Nah, ke delapan, kami harapkan investasi di Indonesia nanti ini adalah bertumpu pada industri hulu Pak Martin jadi supaya bentuk adalah penguatan bahan baku industri yang ada di dalam negeri. Tolong kalau bisa diberikan pengkajian bahan baku yang akan diekspor ke luar, berapa sih kebutuhan industri nasional sebelum dilakukan eksportasi ke luar, lanjut *next*. Iya nah ini investasi asing di hulu industri kosmetika ini sangat kami harapkan supaya *stockan* ataupun nanti berarti bahan bakunya akan kita *stock* di gudang kami tidak terlalu lama, biasanya kalau kami impor itu perlu tiga bulan Pak. Jadi, sehingga kita harus *stockan* produk itu tiga bulan apalagi kebutuhannya 90% itu impor, lanjut.

KETUA RAPAT:

Yang kebutuhan 90% impor itu karena bahan bakunya tidak ada di sini atau karena pelakunya saja yang belum ada?

KETUA PPAK (SOLIHIN SOFIAN):

Tidak ada, karena pelakunya belum ada.

KETUA RAPAT:

Bahan bakunya ada?

KETUA PPAK (SOLIHIN SOFIAN):

Ada sebetulnya seperti nilam bahan baku nilam ada di sini tapi kemudian diolah balikin ke Indonesia lagi jadi dolar. Tetes tebu juga sama Pak Martin itu juga diekspor ke luar, sehingga begitu ke Indonesia alkoholnya lebih tinggi ya, terakhir biji kelapa utuh diekspor ke luar, utuh itu dikirim ke luar. Nah, inisiasi hari kosmetik nasional ini menjadi penting supaya menjadi hari-hari yang kita tunggu supaya menjadi hari-hari yang kita tunggu *effording* yang bisa kita lakukan di satu hari kosmetik nasional tadi.

Mungkin hari ini di ruang ini juga saya mau mengajak teman-teman dari asosiasi, Perkosmi ataupun yang lainnya mungkin Bapak juga, mari kita tentukan satu hari kosmetika nasional ya. Kerja sama dengan akademisi itu juga menjadi penting karena sekarang saatnya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi dan komunitas yang ada. E-katalog kosmetik menjadi penting karena

masalah adalah sekarang adalah e, ada digital maka kita harapkan semua kosmetik mempunyai katalog-e nanti bisa di-*submit* ke kementerian-kementerian yang ada, nanti saat presentasikan juga menjadi lebih gampang, *next*.

Nah, saya akhiri dengan satu kata, PPA Kosmetika bangga buatan Indonesia, industrinya maju masyarakatnya sejahtera negara pun kuat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Memang cocok Bapak paling terakhir jadi retorikanya ada. Saya sebelum meng apa memberi kesempatan pada Bapak/Ibu anggota saya mau perkenalkan yang baru bergabung per hari ini di Komisi VI, Bapak Mohammad Ichsan Firdaus dari Fraksi Partai Golkar, juga di sini sebenarnya sudah ada juga yang sudah lama bergabung tapi kali ini mungkin karena kita rapat dengan asosiasi kosmetika Pak Ketua Baleg hadir Pak Supratman.

Oke sesuai dengan daftar yang masuk ke saya, saya berikan kesempatan di sebelah kanan ada Pak Jon Erizal.

Silakan Pak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi VI, Bapak-bapak dan Ibu dari beberapa asosisasi,

Menarik apa yang disampaikan apalagi juga asosiasi yang ada di hadapan kita hari ini, saya yakin pasti nanti akan transaksi *offline*-nya pasti meningkat, karena apa, salah satu contohnya tadi kosmetik, bagaimana kita bisa mencium baunya kan kalau tidak menciumnya secara langsung tidak bisa melalui *online*, apalagi spa kan. Bagaimana spa Pak Martin kalau kita tidak tahu kan nggak bisa *online* kalau spa, begitu juga produk lain, apalagi yang berkaitan dengan *furniture* dan lain-lain.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja pertama yang berkaitan, kita ini selalu fokus mau nyerang luar negeri selalu saja ekspor, ekspor, ekspor. Memang itu betul tapi kita lupa dengan pertahanan dalam negeri gitu. Kita bicara mau ngejar ekspor ke berbagai negara yang banyak kesulitannya sementara pasar kita diambil oleh pihak luar negeri. Kalau saya sarankan asosiasi ini harus

bisa membuat sesuatu yang memang bisa bersaing di dalam negeri saja dulu. Tadi misalnya kita keluhkan IKEA, kenapa asosiasi nggak buat kaya IKEA gitu. Pakai teknologi mutakhir, SDM-nya digenjot gitu, kemudian persiapan, sehingga kalau sekarang kita salahkan IKEA harganya memang lebih murah dengan kualitas yang bagus gitu. Nah bisa nggak kita jadi seperti itu nah ini asosiasi mungkin kalau kerja sendiri-sendiri saya yakin nggak bisa tercapai. Seperti pakaian mungkin hari ini nggak ada datang nggak hadir ya, tapi saya lihat misalnya kita sibuk mau ekspor pakaian kita misalnya batik dan lain-lain, kita lupa kita sudah masuk Uniqlo ke sini, masuk H&M ke sini, Zara ke sini, habis pasar itu kita lupa dengan dalam negeri, selalu ini pemerintah juga selalu ekspor, ekspor, ekspor tapi pasar kita dikerjai oleh pendatang dari luar.

Nah, kemudian ini Pak Martin dan teman-teman anggota. Kita juga pada saat meratifikasi perjanjian luar negeri sebenarnya kita sebelum membahas itu kita undang pelaku-pelaku bisnisnya gitu loh, jadi tidak, tidak terbalik begitu mereka ngajukan mau ratifikasi perjanjian dengan luar negeri perjanjian perdagangan terutama terutama RCP itu harus diundang dulu pelaku-pelakunya. Nah, hari ini saya gembira banyak permasalahan disampaikan cuma kurang detail. Kami perlu detail, kami nggak bisa mengembangkan apa permasalahan itu kalau hanya di, di ujung-ujungnya saja gitu bikin detail. Jadi, saran saya kepada semua asosiasi buatlah permasalahan di, di yang dihadapi kemudian usulannya seperti apa, tapi ingat pandangannya harus dua sisi jangan hanya kepentingan asosiasi tapi kepentingan bangsa juga penting gitu. Nah bikin itu kalau, kalau ini bisa berubah positifnya apa negatifnya apa tentu kami di sini akan mendukung mana yang lebih besar manfaat dibanding mudharat itu akan kita dukung gitu, tapi kalau mudharatnya lebih besar ya tentu kita akan tidak mendukung itu, itu point yang kami pegang di sini gitu.

Jadi, jangan sampai nanti sudah hadir di sini yang disampaikan ujung-ujungnya saja misalnya tadi harus ada izin KLH dan lain-lain itu mengganggu ada biaya muncul. Nah, aturan ini seperti apa diusulkan nah perubahan aturan seperti apa. Nah, kami nanti bisa membuat *joint session* sama Komisi IV misalnya kalau kaitannya dengan KLH atau dengan Komisi lain yang berkaitan dengan BP POM Badan POM itu. Jadi, jadi Komisi IX, itu bisa dan di kesimpulan kita bisa teruskan gitu loh, tapi kasih detail. Nah, ini masih ada kesempatan tolong buat tertulis ini ada Mba Ajeng ini saya kenal lama ada suaminya juga. Nah, ini bikin tertulis lebih, lebih detail sehingga kami menindak lanjuti hasil rapat itu bisa ada dasar. Jadi, nanti jangan, wah kita sudah diundang, kan sering itu komplainnya kita sudah sampaikan permasalahan tapi nggak ada solusi itu, DPR nggak bergerak, nggak kerja apa-apa bukan itu. Nah kasih yang detail sampaikan ini bisa tertulis usulkan nah nanti kami akan tindak lanjuti.

Saya rasa demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik kita ke sebelah kiri Pak Harris Turino, lalu nanti ke kanan Pak Supratman. Saya izin dulu ke toilet.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat rekan-rekan anggota Komisi VI,

Saya Harris Turino A-199 dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Saya mencoba memahami industri-industri yang berbeda, hari ini mulai dari kosmetik, mamin, dan akhirnya masuk ke mebel. Saya akan berangkat dari kosmetik dulu. Ini menarik bahwa industri kosmetik Indonesia punya potensi yang luar biasa, apalagi dengan menyadari bahwa Indonesia adalah pasar halal yang terbesar di dunia. Tetapi, kita tahu bahwa di industri kosmetik tadi sudah dipaparkan bahwa ketergantungan kita terhadap bahan baku impor masih sangat tinggi ya. Tadi dikatakan bahwa harus ada mulai dikembangkan untuk bahan baku yang diproduksi oleh domestik, tapi kalau kita cermati kosmetika ya tidak ada jurusan kosmetik sains di universitas di Indonesia. Sehingga, kosmetik masih hanya satu mata pelajaran di jurusan farmasi ataupun di jurusan teknik kimia. Formulasi-formulasi yang dikembangkan juga formulasi-formulasi yang masih ketinggalan, tua. Teknologi-teknologi ekstraksi, teknologi-teknologi *encapsulation* itu juga semuanya masih ketinggalan. Sehingga, wajar kalau kemudian di industri kosmetik kita masih ketinggalan dibandingkan dengan Thailand, *ndak* usah kita bicara soal Jepang dan Korea.

Sehingga, menurut saya kalau memang peluangnya besar sekali dan cita-citanya adalah sedemikian mulia yaitu mengangkat Indonesia ke pasar internasional melalui industri kosmetika halal maka langkah di sisi pendidikan ini akan kami perjuangkan yaitu kosmetik sains di Indonesia ini yang pertama. Yang kedua tentu dengan memanfaatkan apa namanya, pengembangan bahan baku kosmetik Indonesia, penelitian pengembangan ini harus dikembangkan supaya memang Indonesia mampu untuk berkiprah di pasar, paling tidak yang merupakan jatah dari Indonesia yaitu pasar kosmetik halal di dunia, ini untuk kosmetik.

Kemudian untuk mamin, ini menarik untuk mamin, tadi dikatakan ini adalah sektor andalan yang menopang pertumbuhan ekonomi. Bappenas sudah memasukan ini ke dalam satu dari lima industri yang kaitannya dengan sirkular ekonomi, total kontribusinya sekitar 33% dan tenaga kerja yang terlibat adalah 43

juta tenaga kerja dan satu lagi yang disoroti adalah sejalan dengan kebijakan mengenai emisi rendah atau rendah carbon yang menjadi prioritas kita, prioritas nasional yang keenam. Nah, mamin juga *problemnya* sama, yaitu bahan bakunya masih impor dan ini ada hal yang menarik di mamin yaitu hilirnya tadi meningkat hulunya stagnan, sehingga terjadi satu *match-mitch* antara hulu dengan hilir. Nah, ini menarik ya untuk sinkronisasi antara hulu dan hilir ini apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan, kendalanya apa, kemudian apakah kendala ini adalah kendala dikebijakan pemerintah atau kendalanya ada di koordinasi antar instansi pemerintah dan dukungan politik macam apa yang bisa kami dari Komisi VI sajikan untuk hal ini.

Yang kedua tentang mamin, ini tadi Covid meningkatkan *online delivery* yang luar biasa tetapi sekaligus meningkatkan sampah plastik secara besar-besaran ya. Langkah strategis apa yang sudah dilakukan oleh asosiasi GAPMMI untuk mereduksi hal ini. Kemudian untuk mebel, mebel ini menarik karena presiden kita adalah mantan tukang kayu jadi untuk menjadi presiden memang harus menjadi asosiasinya dulu ini kelihatannya. Target ekspor 3,3 dan pencapaian ekspor 3,3 dengan target \$5 billion, tapi masalah yang dikemukakan sangat banyak mulai dari logistik, bahan baku, sertifikasi SVLK, kemudian mengenai pemerintah yang berwacana untuk merubah ketentuan luas penambang kayu yang boleh diekspor, masalah keterbatasan dan kenaikan harga bahan baku rotan dan seterusnya, masalah isu lingkungan, kok masalahnya banyak sekali. Kira-kira Pak, masalah mana yang akan difokuskan dan apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya dan kembali lagi dukungan politik macam apa yang asosiasi butuhkan. Kalau kita lihat aneh kalau mebel kita kalah dengan Vietnam karena harusnya bahan baku kita lebih banyak dari Vietnam, permasalahannya di mana sebenarnya.

Kemudian, tadi mengenai serbuan dari luar negeri IKEA salah satunya, ya mungkin kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh pemerintah India ketika memaksa IKEA untuk jauh menggunakan bahan baku lokal. Di mana ini bertentangan dengan kebijakan *global supply chain* dari IKEA sendiri, tapi di India memang dipaksa untuk menggunakan *local supply chain*. Rasanya demikian masukan dari saya pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam

Tadi setelah Pak Haris siapa ini, Pak Supratman ya.
Silakan Pak Supratman.

F-GERINDRA (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan

Saya baca WA-nya Pak Martin Pak jadi harus menemani Pak Martin tadi mimpin sidang.

Teman-teman anggota Komisi VI, Pimpinan dan teman-teman asosiasi terima kasih sudah memberi masukan yang sangat berharga. Pertama saya ingin meyakinkan kepada seluruh teman-teman asosiasi bahwa pemerintah sudah sangat berkomitmen untuk melakukan sebuah penyederhanaan regulasi, di mana kita tahu bahwa obesivitas regulasi dan itu tidak memberikan kepastian hukum dan mudahnya sebuah regulasi berubah-ubah itu tidak memberi jaminan kepastian bagi pelaku usaha. Nah, tadi beberapa teman-teman asosiasi saya coba baca sepintas di dalam paparannya, ada yang menyinggung tentang belum sinkronnya sekarang sistem perizinan berusaha berbasis resiko. Pasca putusan MK tentu teman-teman semua sudah tahu apa konsekuensinya, tapi saya ingin meyakinkan kebetulan saya dulu Ketua Panjanya RUU Cipta Kerja dan ingin memastikan bahwa tahun ini juga kita akan melakukan sebuah perbaikan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dan DPR bersama pemerintah tentu akan melihat ini sebenarnya dari sisi kemudahan yang tentu teman-teman akan memperolehnya ya, ini terutama dukungan regulasi di bidang regulasi tadi itu ujung-ujungnya bagaimana kemudian dunia usaha itu mendapatkan sebuah kemudahan yang pada akhirnya nanti akan berimbas kepada penerimaan negara itu yang pasti. Sehingga, tahun ini *Insyah Allah* mungkin satu atau dua bulan ke depan sebelum KTT20 berlangsung Undang-Undang Cipta Kerja itu akan segera diselesaikan oleh pemerintah bersama DPR.

Yang kedua tadi banyak yang menyinggung soal industri halal ya. Industri halal saya setuju tadi paparan kawan-kawan sebelumnya bahwa kita adalah potensi pasar terbesar tetapi jaminan industri halal kita apakah itu di bidang kosmetik, makanan dan minuman kita belum menjadi pemain terbesar dunia. Bahwa kita menjadi pasar iya tetapi kalau kita lihat kita masih kalah dengan Malaysia, saya nggak tahu data terakhir ya apalagi Turki. Banyak yang mempersoalkan, kadang kala banyak yang salah mengerti apa sih industri halal itu ya, ini kelihatan seperti dibawa-bawa ke Pilpres, seperti ada semacam pembelahan dan lain-lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak, ditingkat masyarakat itu, itu penting bukan hanya pasar dalam negeri tapi juga kita dalam rangka memacu ekspor kita. Negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam umpamanya itu butuh kepastian soal kehalalan sebuah produk itu keniscayaan dan itu harus kita rebut, tapi saya setuju bahwa kemudian bagaimana menciptakan sebuah peluang di dalam negeri itu menjadi sesuatu yang sangat besar, buat teman-teman di bidang kosmetik maupun di makanan dan minuman ya kalau ada hal-hal yang terkait dengan industri halal dan Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya kita sudah sangat menyederhanakan termasuk di dalam perizinan soal sertifikasi

halal. Dulu sertifikasi halal itu dimonopoli baik yang memeriksa maupun yang mengeluarkan sertifikat, sekarang sudah dipecah. BPJPH itu fungsinya hanya mengeluarkan sertifikasi, kemudian Majelis Ulama Indonesia dulu yang punya hak dalam rangka menerbitkan sebuah fatwa halal itu hanya dipengurus pusat, sekarang sudah bisa di mana di daerah ya MUI daerah itu sudah boleh menerbitkan itu dan saya dalam beberapa kesempatan sudah mendapatkan fatwa halal itu bukan dari MUI pusat, apalagi Lembaga Pemeriksa Halal itu lagi tidak di dominasi oleh Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan apa apa namanya LP POM ya LP POM MUI, tapi boleh dengan bekerja sama dengan *Surveyor* Indonesia ataupun juga dengan perguruan-perguruan tinggi ataupun ormas-ormas keagamaan yang ditunjuk, jadi sudah sangat mudah, sudah sangat mudah.

Nah, memang saya mengerti Bapak/Ibu sekalian kalau Ibu katakan bahwa tadi singgung OSS. Di awal kita berpandangan bahwa dengan OSS ini akan jauh lebih memudahkan, di beberapa kejadian sudah jauh lebih bagus tetapi bahwa masih ada sistem yang belum siap saya setuju, sinkronisasi antar kementerian antar makanya di Undang-undang Cipta Kerja Bapak/Ibu sekalian, kita beri waktu dua tahun kepada pemerintah kemudian setelah itu kita akan pantau.

Nah, kita ingin mendapat masukan Bapak dari Bapak/Ibu sekalian dengan Undang-undang Ciptaker walaupun dinyatakan secara inkonstitusional bersyarat tetapi kan masih tetap berlaku. Ada hal-hal yang kurang dalam sistemnya nanti bisa disampaikan baik lewat Komisi maupun nanti akan kita undang di Badan Legislasi ya. Nah, itu yang penting yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, terkait dengan kesulitan bahan baku. Nah, ini walaupun saya tidak ini mungkin juga di VI sudah mulai dibahas terkait *domestic market obligation* untuk komoditas tertentu. Nah, sekarang perlemen lagi membangun lagi menuju sebuah pengaturan untuk industri apa namanya tanaman komoditas strategis salah satunya adalah CPO. Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri itu harus dihitung secara baik, itu yang harus menjadi *priority*. Sama halnya teman-teman di VI maupun di Komisi VII juga sama membicarakan bagaimana pelaksanaan DMO terkait dengan batu bara yang kemarin kita mengalami kelangkaan ya, bahkan Jakarta dan Jawa hampir *black out* kembali untung Presiden cepat mengambil sebuah tindakan yang sangat tegas dan itu kita apresiasi.

Nah, ini juga terjadi, minyak tetapi saya berharap juga teman-teman di industri dalam negeri dalam rangka menyikapi kalau kemudian parlemen bisa menyusun sebuah regulasi terkait dengan komoditas strategis tadi kita akan memberi legitimasi bahwa *market* kita di dalam negeri itu wajib untuk mendapatkan pasokan, tapi ada satu hal bahwa teman-teman juga harus meng *compare* yang harus diterima oleh petani jadi tidak sekedar, karena begini ekspor sekarang kelapa biji. Saya kemarin kunjungan kerja ke beberapa wilayah, salah satu negara yang menerima sekarang kelapa itu. Padahal, kelapanya dari kita

loh tapi ekspornya bukan di Indonesia. Itu kelapa parut saya nggak tahu buat tujuan makanan ya Pak ya, itu Panama saya ketemu Pak Dubes, tapi mereka itu mendapatkan, karena kenapa, harga bagi petani itu yang penting adalah siapa yang memberi harga tertinggi.

Nah, juga teman-teman harus memberikan sehingga nanti paduan kita membuat sebuah regulasi itu, itu komprehensif tidak hanya mempertimbangkan aspek dari dunia usaha tapi juga harga beli produksi petani itu. Itu sama-sama kita akan tapi saya jamin bahwa nanti ke depan Indonesia, pasti Presiden Jokowi terutama, juga sudah menunjukkan komitmen bagaimana kepentingan dalam negeri itu harus kita dahulukan. Kalau soal-soal kayak seperti kontainer, kita bukan hanya kita seluruh dunia mengalami hal yang sama kecuali Cina ya Pak, seluruh dunia karena memang di sana. Jadi, itu saya yakin nanti seiring berkembangnya dan selesainya pandemi itu juga akan selesai. Bahwa hari ini *cost* logistik kita tinggi akibat kekurangan baik kapal, kontainer, saya rasa itu nanti akan selesai dengan sendirinya, karena kita nggak bisa, bisa karena ini menyangkut *supply and demand* jadi hukum, hukum ekonomi ya pada akhirnya akan selesai.

Tapi hal-hal yang mendasar hal-hal yang mendasar tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita menjembatani parlemen akan membantu Bapak/Ibu sekalian karena kita kan hanya berperan di bidang regulasinya, sama dengan PMK yang Bapak sampaikan tadi. Nanti tidak apa-apa Komisi VI bisa rapat gabungan bersama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan ya, untuk membahas terkait dengan peraturan-peraturan lintas kementerian yang justru merugikan dunia usaha kita dan lebih menguntungkan bagi negara-negara yang lain.

Nah, sekali lagi komitmen parlemen jelas Bapak/Ibu sekalian ya. Kalau tadi kawan dari PDIP bilang kita bersyukur Presiden Jokowi adalah anggota dulu ya saya nggak tahu sekarang kalau untuk mebel karena memang pelaku industri kayu kalau saya biasanya hanya main kayu Pak.

Demikian, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Kita ke kiri Pak Khilmi masih ada ya.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota,
Yang saya hormati Ketua HIMKI, Ketua Perkembangan Industri Kosmetik
Indonesia, terus satunya ini GAPMMI,**

Jadi, setelah saya mendengar paparan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami dari Komisi VI akan mewadahi apa yang jadi keluhan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu tentang industri-industri yang dibawah. Jadi, memang kita Pak, di Indonesia ini sebetulnya kan bahan baku itu banyak melimpah termasuk tentang permebelan, kosmetik, dan yang macam-macam yang Bapak keluhkan di sini. Tapi, kan memang kebijakan dari bahan baku yang dibutuhkan itu kan bukan di di bawah Komisi VI saja, seperti bahan baku yang disampaikan oleh permebelan itu. Di Indonesia ini memang ada kesalahan tentang bahan sisa yang dinamakan jadi B3 kan gitu Pak dan itu kalau ada urusan ke kepolisian atau apa kan jadi repot juga industri-industri yang ada ini. Sebetulnya itu kan tidak mengandung racun juga gitu loh seperti industri-industri yang ada di luar negeri itu kalau bahan baku besi yang jadi *slack* itu kan bukan B3. Kalau di sini B3 jadi semua yang terjadi setelah diolah itu dianggap B3 semua, kayak industri di permebelan kan kayaknya yang juga kayak begitu Pak. Nah, inilah yang harus di, dicari permasalahannya apa yang dinamakan B3 itu kan gitu. Jadi, supaya ke depan ini Bapak-bapak sebagai produsen-produsen ini tidak bingung dengan apa permasalahan dengan hukum gitu loh.

Ini semua keluhannya sama Pak, di batu bara juga kan begitu setelah dipakai sisanya itu jadi B3 kalau tidak ada perizinan B3 ya nanti ada permasalahan dengan permasalahan hukum. Ini yang perlu dicari. Terus masalah bahan baku untuk industri permebelan ini Pak. Kan banyak Bapak ceritain tentang ekspor-ekspor ilegal kan gitu, karena memang harganya mungkin ya dan peraturan di sini ini juga harusnya yang dibutuhkan dalam negeri itu yang diutamakan dulu. Jangan sampai ekspor-ekspor ilegal bahan baku untuk industri-industri yang dibutuhkan Bapak ini juga akan kesulitan gitu loh.

Saya berharap ke depan kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan di memang tidak di bawah Komisi VI. Tapi, kita nanti minta dari ketua ini untuk memfasilitasi rapat bersama supaya industri-industri dalam negeri ini tidak mati. Ini harapan dari saya dan juga kita akan mendukung tentang perkosmetikan ini, bahan baku-bahan baku yang dibutuhkan di dalam negeri akan kita dukung bagaimana pemerintah menerapkan aturan-aturan yang harus mendukung industri kosmetik di dalam negeri, karena tanah kita yang luas dan mungkin apa pun yang ditanam di Indonesia itu akan tumbuh, kayak misalnya Pak kayak kelapa sawit itu yang bisa tumbuh dan ada minyaknya itu kan cuma di daratan Indonesia, Malaysia sama mana, di Afrika tumbuh tapi kan tidak ada hasil minyaknya kan gitu ceritanya begitu. Karena itu kita akan mendukung atas kebutuhan-kebutuhan industri yang ada di dalam negeri ini dan kami berharap

masukan-masukan yang ada yang seperti disampaikan Pak Supratman tadi, karena dia juga Ketua Baleg yang akan merevisi Undang-undang Cipta Kerja mungkin masukan-masukan dari Bapak ini sangat berguna dan tentang OSS juga Bapak bisa ngasih masukan ke kita apa kesulitan-kesulitan Bapak tentang adanya OSS ini, karena tadi juga disampaikan karena nanti sore jam 2 kita akan ketemu tanggal 31 ya mundur ya, tanggal 31 kita akan ketemu dengan Pak Bahliil, akan kita sampaikan jadi apa yang jadi permasalahan di OSS itu.

Itu saja dari saya Pak Ketua, mudah-mudahan nanti masukan dari teman-teman asosiasi ini bisa kita terima secepatnya untuk disampaikan pengambil kebijakan, sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Baik sekarang kita ke suara kaum perempuan Ibu Nevi Zuairina.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih Pimpinan dan

Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati dan dari organisasi yang kita undang pada pagi hari ini dari beberapa organisasi itu ada GAPMMI, terus HIMKI, Perkosmi, dan dari PPA ya, PPA Kosmetika.

Ke HIMKI dulu Pak. Pemerintah sudah mewajibkan minimal 40% serapan produk dalam negeri ya HIMKI Pak HIMKI itu (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia). Sebagai pengusaha mebel dan kerajinan bagaimana dampak program ini terhadap perkembangan usaha mebel dan kerajinan dan apa yang menjadi evaluasi HIMKI terhadap implementasi program. Jadi, Bapak memang kalau ekspor untung tapi kalau Bapak jualan di dalam negeri lebih untung lagi Pak ya karena pasar-pasarnya besar. Apalagi tadi ditambah dengan bahan baku kekurangan mungkin dipikirkan Pak ya bahwa kita sudah punya kebijakan dari pemerintah yaitu di lingkungan pemerintah diwajibkan minimal 40% dari produk-produk dalam negeri khususnya pelaku UMKM.

Lalu terhadap GAPMMI dan sebetulnya sama saja dengan PPA Kosmetik dan juga dengan, dengan Perkosmi, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa masalah halal itu adalah masalah yang harus diperhatikan oleh para produsen makanan kosmetik, karena kita jumlah penduduk Indonesia ini jumlahnya sangat besar ya untuk penduduk itu lebih dari 270 juta yang mana 87% adalah muslim. Di sini kita kan harus melindungi ya apa namanya negara

kita rakyat ya kita ini yang penduduk muslimnya paling banyak dan pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pak ya dan tentu kami tentu menginginkan kepada organisasi ini bagaimana pelaksanaan gitu ya untuk jaminan produk halal yang sudah disahkan tersebut. Apakah ada kendala selama ini dan kalau ada kendala apa dan solusinya ya, agar kita bisa atasi dan perlindungan konsumen untuk produk halal ini terjaga. Ya buat kita, maaf Pak ya di Malaysia dan Singapur yang disitu penduduk muslimnya sedikit tapi label halalnya itu sangat ini Pak ya sangat ketat, kalau label halalnya nggak ada nggak boleh dilempar kemana ke pasar. Malaysia dan Singapur yang jumlah penduduknya sedikit, ini baik makanan maupun kosmetik. Jadi label halal ini harus betul-betul dijaga karena jumlah penduduk Indonesia itu 87% adalah muslim.

Lalu terus yang ketiga Pak sehubungan dengan adanya wabah pandemi covid-19 sampai hari ini masih berlangsung tentunya sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian negeri ini dan di dunia. Apa yang bisa disinergikan agar dunia usaha bisa kembali bergerak dan pemutusan hubungan kerja bisa lebih kecil sehingga lapangan kerja terus bertambah. Kita ingin dengar apa laporannya dari para industri.

Terus yang keempat sehubungan dengan semakin banyaknya kerja sama perekonomian antar negara ya, jadi Komisi VI ini sudah banyak mensahkan perekonomian, kerja sama perekonomian antar negara yang telah ditangani oleh pemerintah. Apakah antisipasi jadi Bapak/Ibu juga harus pelajari ya perekonomian antar negara ini apa saja yang sudah disahkan. Ya nah ini apakah antisipasi yang telah dilakukan oleh pelaku industri ketika produk dari luar negeri mulai masuk dan diperdagangkan di Indonesia. Sudah sejauh mana peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku kita ya. Jadi, kalau kita adanya kerja sama perekonomian antar negara ini memudahkan kita untuk ekspor tapi memudahkan juga barang impor masuk ya kita harus antisipasinya ini dan tentu pangsa pasar di luar negeri untuk kosmetik dan untuk ini lebih besar lagi khusus ASEAN.

Lalu terus, apakah ada bimbingan dan stimulus yang diberikan Pemerintah terhadap pelaku industri makanan-minuman, kerajinan, dan kosmetik, sehingga bisa memanfaatkan peluang pasar di dalam dan di luar negeri, ya ini kita ingin tahu.

Lalu yang terakhir, apakah sudah dirasakan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk kemajuan industri di bidang makanan-minuman, kerajinan, dan kosmetik. Apa kendala yang masih dihadapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan.

Itu saja Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Bu Nevi makasih.
Kita ke Bu Intan Fauzi.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Bapak/Ibu dari Perhimpunan Asosiasi HIMKI, GAPMMI, Perkosmi, PPAK,
dan semua yang hadir,**

Ini permasalahannya semua hampir sama intinya adalah satu perizinan yang tentu akan membebani biaya produksi. Kemudian bahan baku masih impor, tentu akan sulit bersaing dengan negara yang memang mereka memiliki dari mulai hulu sampai hilirnya dan tentu kita berharap dengan adanya rapat ini Komisi VI juga bisa memfasilitasi simplifikasi dan integrasi regulasi antar kementerian dan lembaga, sehingga produk-produk Indonesia itu bisa betul-betul bersaing. Kalau bicara pangsa pasar Indonesia sebetulnya besar. Nah saya justru heran kalau kemudian dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tergabung di dalam perusahaan-perusahaan ini pengusaha-pengusaha pelaku usaha tidak terjun ke hulunya, artinya yang jadi permasalahan adalah kan bahan baku. Walaupun, kita semua tahu bahwa investasi untuk memproduksi bahan baku itu jauh lebih besar daripada kemudian hanya di hilirnya. Tapi, kemudian pohon industri ini tidak akan pernah terselesaikan, karena semua berkuat di situ dan tentu pemerintah juga akan bertanya siapa yang mau menginvestasikan di situ.

Di sini ada Mba Ajeng cucu dari Ibu Riati Sudibjo yang tentu sudah lama sekali turun-temurun ini sudah generasi ketiga. Kenapa juga tidak mau kemudian menginvestasikan untuk dibahan baku dan kalau memang pemainnya besar *player*-nya disini kan banyak sekali asosiasinya saja banyak. Jadi, saya rasa dengan tanaman obat-obatan kita yang lebih dari 300 ribu kemudian itu dibutuhkan untuk bahan baku alami halal dan sebagainya tentu akan ada diserap yang penting kan kalau kita memproduksi sesuatu ada yang menyerap ada yang mau membeli yang penting kan pasar.

Yang kedua juga sama dengan halnya mabel kerajinan. Sekarang bukan hanya produsennya, tapi kita mengimpor tapi juga sudah ada outlet-outletnya ini bersaing langsung di sini. Nah, apakah ada upaya dari perhimpunan atau asosiasi pelaku usaha mebel dan kerajinan itu untuk bisa bekerja sama atau kemudian nanti pemerintah bisa melakukan regulasi yang harus ada alokasi *supply* dari para pengusaha lokal, karena kalau produsen-produsen Indonesia

apalagi kerajinan yang pelakunya adalah UMK ini kan tentu perlu dibantu. Saya lihat kan IKEA, Informa, Ace Hardware itu masa sampai jual pot dari gerabah, dari anyaman, itu yang semua sebetulnya di Indonesia ada dan pengrajannya ada semua. Kalau bisa masuk standarnya IKEA, Informa, dan sebagainya bukan hanya *outlet* mereka yang tadi Bapak sampaikan akan membangun sekian gerai di seluruh Indonesia tapi berarti juga sudah lolos dari mereka akan bisa masuk juga ke pangsa pasar internasional yang ada di negara mereka dan di negara-negara lain. Karena dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang kalau kementerian/lembaga melakukan pameran itu kan dalam rangka mencari pangsa pasar. Pameran hanya dilakukan mohon maaf artinya sesaat paling lama satu minggu dan itu kadang-kadang hanya di misalnya perwakilan kita perwakilan Indonesia di negara tersebut yang pembelinya juga tidak luar artinya tidak ada kemudian *continuitas* apa namanya order, yang kita harapkan kan kalau bicara mabel, kerajinan, kosmetik itu kan dalam jumlah yang besar kalau bicara ke luar negeri, bukan hanya untuk jual ritail.

GAPMMI yang terakhir saya mau tanya, kalau GAPMMI ini kan semua yang tergabung adalah industri mamin kemasan ya Pak ya dan *process food*. Nah, dengan adanya, ini kan semua diproses kalau bicara kemasan sekarang pasar tradisional tahu, tempe, sayur semua sudah dikemas juga tapi bukan *process food* gitu kan. Yang tergabung di Bapak ini kan *process food* ya, *process food*, Nah, ini kan juga masih banyak yang impor termasuk bahan baku karena *ingredients*-nya apa order, tapi kan sebetulnya gula, rafin, nasi, dan sebagainya itu Bapak butuhkan. Jadi, sebetulnya saya bingung kenapa tidak ada yang mau main di hulu jangan balik lagi bahwa ini investasi besar, sama semua investasi usaha itu adalah membutuhkan upaya dan nominal yang besar. Nah, industri mamin ini, ini jangan sampai kemudian juga kita ini *dibombardir* dengan produk-produk yang artinya kearifan lokal ini juga harus diangkat gitu, karena apa namanya kita juga harus bergandengan tangan dengan para petani dan sebagainya. Kalau Bapak-bapak artinya kan ini sudah di tengah bahan bakunya impor, kemudian nanti pasarnya juga di sini yang paling besar.

Nah, Ibu dari yang Perkosmi saya mau tanya kalau produk-produk kosmetik yang maklon Bu, kalau yang ilegal kan jelas, artinya Badan POM mereka kemudian bersama Polri bisa apa datang menggeruduk kemudian bisa ditutup dan sebagainya dan tapi itu banyak nggak selesai-selesai. Nah, bagaimana dengan yang maklon Bu, karena maklon ini kan diproduksi masal lalu brandnya masing-masing, apakah ini bisa dikontrol juga oleh para pelaku usaha kosmetik.

Terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Pak Nasim Khan sekalian.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Closing-closing Pimpinan ya, masih ada lagi ya? Oh berarti belum *closing*.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami banggakan Pimpinan Komisi VI Bapak Bro Martin Kakak Martin dan Ami Haikal Bawazir, Beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami banggakan, Para pengusaha asosiasi gabungan baik dari GAPMMI, HIMKI, Perkosmi, dan asosiasi apa ini terakhir? PPA Kosmetika oke.

Iya Nasim Khan Indonesia.

Yang pertama-tama saya hanya sedikit saja Pimpinan dan Bapak-bapak/Ibu-ibu asosiasi. Dari awal tadi saya perhatikan memang di sini pembahasan kepada lebih dominan kepada sistem ekspor, *trouble*, permasalahan, kebutuhan bahan baku, dan lain-lain. Nah, itu sudah lazimnya yang selalu selama ini kita dengar ya kan. Nah, yang saya harapkan saya Nasim Khan Pak ya saya dari Fraksi PKB. Kebetulan dapil saya itu di Jawa Timur, otomatis masyarakat saya itu banyak masyarakat petani, masyarakat petani khususnya dari petani tebu, petani jagung, petani garam yang nasibnya sampai sekarang hidup tak mau mati enggan dalam sistem ekonomi kedaulatan pangan kita ini. Padahal, program yang diharapkan oleh pemerintah kedaulatan pangan itu yang kita harapkan ke depan, walaupun tidak tercapai sampai hari ini malah lebih tragis kalau jujur saya mengatakan, walaupun kami sebagai PKB adalah koalisi pemerintah saya apa adanya menyatakan demi kebaikan. Berarti menjadi koreksi kita bersama untuk ke depan.

Yang pertama saya berharap para asosiasi ini dalam sistem ekspor dan bahan baku saya kira Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam dan selalu permasalahannya itu kepada *finishing* dan penjagaan dari bagaimana kualitas dan kuantitas itu saja. Di luar negeri kalau kita berbicara sumber daya alamnya kalah sama kita itu jujur. Dari kunjungan kita ke beberapa negara ya kan, yang terakhir kami kemarin kepada Turki hasil kualitas dari kulit dan lain-lain kosmetik ya kan, makanan-minuman mereka sumber dayanya juga malah banyak dari impor. Cuma *finishing* dari penyelesaiannya dan kuantitas regulasinya itu cepat. Nah, kita bermasalah apa yang pertama dari sistem ekspor, yang selalu ramai dan rekan-rekan kita rasakan bagaimana kebutuhan pengiriman kita, kontainer kita, harganya, regulasinya itu yang menjadi masalah. Kami di PKB mempunyai

juga mengawal dari Kementerian Perdagangan Pak, Pak Lutfi juga bersama kita ya kan di Kementerian Perdagangan kemudian adalah komisi di mitra di Komisi VI. Aturan kita kerja undang-undang, sistem regulasinya dari kementerian ini pun sudah ada semua, tetapi sistem yang diharapkan pemerintah, OSS satu pintu itu sampai sekarang tidak jelas. Contohnya produk halal, bagaimana kita mau mengeksport dengan produk halal yang besar kalau tadi teman-teman mengatakan di Singapura lebih banyak produk halal, kalau saya jujur di Indonesia itu sebetulnya sudah bukan ada lagi produk halal atau sertifikasi halal yang sangat berbelit-belit, mulai dari sertifikat halal dari MUI dulu, baru nanti ke Kemendag, lalu ada BPOM, lalu apalagi tadi Kemenag ya *sorry* Kemenag, lalu nanti baru nanti ada sertifikasi dan terus terang jujur di beberapa langkah-langkah ini sudah akan mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, pikiran. Nah, itu yang sangat ribet. Kalau di Indonesia kalau saya bilang Pimpinan dan rekan-rekan anggota tidak perlu dikeluarkan produk halal. Di Indonesia seharusnya dan lazimnya dikeluarkan produk haram ya. Jadi, Indonesia kalo keluar produk semua itu mayoritas muslim 90% sertifikasinya produk haram baru dikeluarkan ya kan, orang bingung menentukan produk halal yang mana. Sebetulnya kalau saya bilang dari awal dulu kepada Mendag keluarkan saja produk sertifikasi haram. Nah, baru *ndak* makan gitu saja sudah. Kalau tadi bilang ada di Singapura rata-rata semua produknya halal kan susah ya kan berarti yang nggak ada halalnya haram kalau di Indonesia mau bagaimana mau membedakannya, keluarkan saja produksi itu juga saya usulkan kepada Kemenag kepada Gus Yaqut. Rubah saja regulasi sistem kita sertifikasi haram selesai sudah, mau kosmetik kek ya kan, mau makanan dan minuman kek dan semuanya selesai ya ya. Ini jadi catatan ini buat asosiasi kalau perlu sampaikan kepada ke pemerintah kalau perlu, itu yang pertama.

Lalu kebutuhan juga dari mebel. Kami kemarin kunjungan Pak ke beberapa negara, ke Rusia waduh Pak luar biasa mereka *welcome* betul dengan produk-produk mebel kita, tetapi itu kembali lagi kualitas-kuantitas. Mereka sangat suka dengan karya-karya kita. Nah, ini di sini ada saudara kita Pak Akim itu, itu yang punya mebel di Pasuruan Pak, itu sudah mengeksport beberapa negara Eropa dan ya kan, tapi permasalahannya di situ di kontainer, di apa masalahnya di situ ya dan mereka butuh secara langsung Pak, karena apa ternyata, dari Indonesia menuju pembeli di luar negeri bisa sampai sepuluh tangan, dari harga 10 ribu menjadi 100r ibu Pak bayangkan. Nah, ini yang harus dijadikan regulasi pembahasan kita bersama yang dimaksud pemerintah, OSS satu pintu percepatan ekspor itu bagaimana, nah ini harus ditata dengan benar nanti kita ke depan, itu dalam itu semua ya bukan cuma mebel, produk-produk pakaian produk apa semua dari yang khususnya kosmetik. Saya kenal betul Pak kosmetik dengan kosmetik *tjefuk* dulu ya kan ada kan. Nah, itu kan dia banyak produk-produk, produk herbalnya itu. Kebetulan dari rekan-rekan saya juga banyak itu produksi yang membuat itu kerja samanya produksi herbal kosmetik, obat kuat, herbal Indonesia itu banyak Pak ya kan, itu banyak dan itu diekspor tapi apa ternyata harus adanya benar, itu di kosmetik. Di *tjefuk* itu kosmetik tapi

banyak produknya juga termasuk produk obat kuat, obat poles, dan lain-lain dan di Indonesia yang terkenal Pak gitu loh ya kan. Nah, tetapi ternyata apa permasalahannya satu ya kan, tentang higienisnya, tentang jaminannya keamanannya di luar negeri. Nah, itu yang harus kita di Indonesia lebih benar-benar maksimal jadi seandainya nanti ada pengecekan di luar negeri itu sudah *settle* semuanya aman ya kan, nah itu yang harus ke depan termasuk makanan dan minuman, mie. Mie goreng itu di luar terus-terang lebih terkenal daripada ya kan disini ada teman itu ada Pak Ami Hekal itu Pak Pimpinan itu dia produksi mienna itu di Saudi Arabia Pak luar biasa Pak, orang endak mau makan punya Asia lain kecuali mie Indonesia. Nah, itu *continuitas*, regulasi, kuantitas itu yang harus kita perhatikan, pengiriman oke nah itu.

Yang ketiga Pak, kembali kepada teman-teman gabungan asosiasi di makanan dan minuman Pak. Masyarakat saya itu masyarakat petani tebu, jagung, garam yang nasibnya sampai sekarang Pak kasihan Pak. Saya butuh Bapak/Ibu biaya asosiasi dengan minuman ini saya pengen data Pak. Kebutuhan data sebetulnya itu dalam makanan-minuman untuk impor nah sekarang saya tanyakan, karena terus terang interaksi dengan regulasi dari Kementerian Perdagangan saya Pak, untuk menjadi pembelajaran buat saya. Saya mohon minta data Pak baik di hari ini atau nanti dikirim ke Komisi kepada Pimpinan. Saya butuh data impor kebutuhan dari makanan-minuman yang masuk di asosiasi itu global ya Pak ya, tidak usah detail ya kita tidak perlu detail. Kebutuhan makanan-minuman sebetulnya yang dibutuhkan dari asosiasi itu berapa banyak Pak. Bahan bakunya gula ya, jagung ya, lalu garam karena terus-terang dianggap kurang terus kan Pak, saya pengen tahu datanya itu tolong Pak. Kebutuhan dari asosiasi makanan-minuman ketiga ini saja gula, garam, dan jagung, saya pengen data globalnya saja, dari kebutuhan asosiasi ini butuh sekian, dari ini sekian, sekian, sekian. Jadi, kami bisa menata nanti dengan Kementerian Perdagangan sehingga regulasi kita impor itu bisa benar-benar tertata masyarakat juga bisa terbantu Pak. Karena kasihan Pak garam-garam kita semua kan dari luar rata-rata makanan-minuman itu, gulanya juga dari luar, tambahan lagi kuota rafinasi juga sekarang semakin besar. Nah, ini yang kami butuhkan nanti Bapak asosiasi makanan-minuman ya, saya mohon nanti datanya itu Pak ya, baik itu nanti mau disebutkan mau disebutkan kalau ada *monggo* totalnya berapa atau tertulis bisa dikirimkan kepada Pimpinan Komisi VI. Itu yang kita harapkan ke depan sehingga nanti kita bisa membahas di Kementerian Perdagangan Pak.

Saya kira itu, intinya kesimpulannya Pimpinan dan Anggota yang kami banggakan dan Bapak/Ibu asosiasi, kami berharap bagaimana kita bisa memaksimalitaskan nilai ekspor kita. Saya tahu kalau impor kita minim pengaruhnya dari kontainer kita, kita ada solusi sebetulnya. Kita maksimalkan regulasi bagaimana menciptakan kemandirian kontainer pengiriman lebih maksimal daripada kita menunggu impor yang datang, itu tinggal bagaimana diatur nanti Pak. Ya tidak ada alasan, kalau tidak ada impor tidak bisa ngirim

tidak ada alasan Pak saya yakin bisa ko semua itu . Nah itu pengembangan UMKM di daerah itu kita butuhkan, dukungan dari asosiasi lain itu yang terpenting. Contoh Pak, sekarang di kampung saya Pak ada namanya tape tau kan tape, Bapak tidak akan pernah makan dan semua teman semua anggota disini belum tentu semua makan kecuali Pak Hekal mungkin. Itu ada namanya tape *krispy* Pak, itu istimewa Pak *krispy* tapi dari tape. Itu produknya bagus dan luar biasa saya bawa ke Rusia kemarin Pak, orang Rusia makan itu bingung apa ini dari mana, nah itu, itu yang harus kita kembangkan untuk ekspor. Itu kalau bisa benar-benar dijaga luar biasa dan banyak lagi hal lain yang bisa kita lakukan.

Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Saya perpanjang dulu setengah jam 30 menit, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Kita lanjut ke Pak Ichsan Firdaus silakan Pak.

F-GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Baik terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Perkenalkan saya anggota baru Pak Hekal, Pak Martin, dan teman-teman Komisi VI. Nama saya Ichsan Firdaus saya dari dapil bareng sama Pak Tomy Kurniawan satu, oh satu dapil, oh *mic*-nya ya *sorry*. Baik makasih

Saya cepat saja terkait dengan HIP apa namanya tadi HIMKI, HIMKI ya, ini terkait dengan SVLK ini Pak. Saya kebetulan agak lama di Komisi IV Pak terkait dengan SVLK ini kan agak menarik karena kami sering bedebat terkait dengan SVLK ini. Saya mau tanya secara utuh saja, saya percaya Pak, bukan percaya ya saya khawatir mensinyalir bahwa bahan baku mebel kita sesungguhnya boleh jadi saya khawatir ini tapi datanya memang saya belum punya, saya khawatir hampir setengahnya mungkin juga khawatirnya ilegal itu Pak, khawatirnya begitu. Nah, menurut teman-teman pengusaha di mabel SVLK

ini bukan mempermudah apa namanya usaha disektor permabelan tapi malah menghambat, akhirnya kemudian muncullah ruang-ruang ilegal yang kemudian harus di apa namanya, dipaksa untuk menggunakan bahan-bahan ilegal itu.

Nah, yang saya mau tanya ini terkait dengan SVLK, apakah kemudian SVLK ini menjadi persyaratan ekspor atau tidak si sebenarnya, apalagi kemudian kita bicara *green* ekonomi, kita bicara terkait dengan *global warming* gitu ya. Ini kan negara-negara ekspor atau negara penerima bahan mabel kita ini, ini sering kali apa namanya mempertanyakan bagaimana kemudian industri permebelan kita ini menjadi malah justru merusak hutan kita gitu. Artinya di satu sisi SVLK ini kita butuhkan untuk mengatakan bahwa kita ini masih peduli dengan kelestarian hutan kita, tapi di sisi lain menurut teman-teman pengusaha tadi saya baca bahwa ini menghambat ekspor. Nah, saya mau tanya teman-teman HIPKA apa namanya HIPKI, HIMKI gitu ya. Ini kira-kira untuk menanggulangi, mencari solusi terkait dengan hal itu sarannya apa Pak. SVLK ini apakah kemudian kita hilangkan saja, tapi saya sebenarnya nggak setuju kalau SVLK ini dihilangkan begitu, atau apa yang menjadi kendala selama ini untuk HIMKI ini. Karena saya sekali lagi mengatakan bahwa di tengah keterbatasan bahan baku, di tengah kemudian ketatnya per apa namanya, persoalan kelestarian hutan kita begitu, tapi teman-teman di industri permebelan ini perlu didorong dan saya juga waktu pas di kehutanan gitu hampir lebih dari 80% kasus kehutanan itu lebih banyak ke *illegal logging* dan itu hampir setengahnya itu SVLK Pak, Bapak/Ibu semua yang di HIMKI ini. Jadi, saya minta saran saja gimana solusinya itu terkait dengan SVLK itu, karena saya ngerti bahwa kemudian industri mebel kita juga perlu bahan baku yang cukup besar, itu yang pertama Pak Ketua.

Yang kedua terkait dengan kosmetik ini, serbuan kosmetik impor yang kemudian di sini kan sudah ada 6,3, US\$6,3 miliar atau hampir 90 triliun itu satu tahun marketnya ya. Saya mau tanya berapa sesungguhnya tekanan terkait dengan kosmetik impor ilegal ini, yang sekarang sesungguhnya beredar di Indonesia ini, kelemahan-kelemahan kita di BP POM, kelemahan-kelemahan kita di pengawasan di bandara dan sebagainya, saya mendengar justru serbuan produk-produk melalui media *online* itu, eh bukan media *online*, melalui apa namanya *e-commerce* itu, saya malah mensinyalir hampir 60% produk kosmetik yang beredar di Indonesia ini impornya berasal dari impor ilegal saya *sinyalimen* saja. Nah, tapi saya mau tanya apa dampak terkait dengan impor ilegal ini untuk industri kosmetik kita, karena waktu pas saya, saya juga diskusi dengan BP POM memang BP POM juga nggak bisa menggali terlalu jauh Pak saya dengar itu. Kepolisian pun juga agak kendalinya agak kurang gitu. Nah, saya mau tanya dampaknya apa terkait dengan beredarnya impor ilegal, apalagi pas masa pandemi ini kan luar biasa saya melihatnya begitu, saya minta datanya.

Yang terakhir Pak Ketua tadi sudah disampaikan oleh teman-teman apa itu namanya Perkosmi dan PPA Kosmetik gitu ya. Hampir 80% bahan baku kita impor Pak. Republik ini sudah merdeka lebih dari 50 tahun tapi ko belum ada

pelaku usaha yang kemudian khusus untuk bahan baku kosmetik ini. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi Pak, Bapak/Ibu semua. Apakah memang tidak ada insentif atau karena memang kita malas melakukan risetnya. Sepengetahuan saya Kementerian Kesehatan dan BP POM itu sedang mengembangkan yang namanya kosmetik dan obat-obatan tradisional, seberapa efektifkah itu sebenarnya Pak dan apa pengaruhnya terhadap industri kosmetik kita gitu, 80% Pak bahan baku kita impor. Padahal, tadi sudah dijelaskan sebenarnya misalnya bahan apa namanya kelapa begitu kita punya melimpah kelapa tapi kemudian raw materialnya kita ekspor ke Cina. Cina kemudian setelah disuling dan sebagainya kita terima impor lagi, sereh wangi, terus kemudian ada lagi sepengetahuan saya daun kelor gitu ya, yang daun kelor tidak ada harganya di sini ternyata kemudian pas diekspor begitu tiba-tiba kemudian sudah jadi bahan baku kemudian diimpor lagi ke kita. Apakah kemudian memang pengusaha kosmetika ini agak malas begitu untuk membangun apa namanya bahan baku itu atau memang tidak ada insentif sama sekali, artinya apa, apakah Lembaga Riset kita misalnya sekarang BRIN begitu atau apa tadi katanya Batan gitu ya Batan (Badan Atom Nasional) atau apa tadi saya lupa Puspitek ya. Apakah kemudian memang tidak ada hasil-hasil penelitian sepengetahuan saya, saya alumni IPB banyak itu Pak tapi tidak pernah dikembangkan gitu. Apakah kemudian risetnya di perusahaan-perusahaan kosmetik memang tidak ada itu atau gimana saya nggak ngerti juga saya minta tanggapannya. Jadi apakah 80% ini bisa kita kurangi nggak ketergantungan kita ini, caranya gimana begitu, apakah perlu ada insentif pajak atau ada daya dorong apa dan sebagainya begitu. Itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Apa masih ada dari anggota yang virtual sebelum ke Pimpinan?

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Izin Pimpinan, Melani.

KETUA RAPAT:

Siapa itu?

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Melani.

KETUA RAPAT:

Oh iya, iya, iya silakan Bu Melani.

ANGGOTA KOMISI VI:

Ibu Melani juga pengguna kosmetik ini.

KETUA RAPAT:

Kita juga calon pengguna kosmetik ini.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati juga kepada Ketua Umum dari Asosiasi Perkosmi, PPAK
Indonesia, GAPMMI, dan HIMKI,**

Sudah banyak yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian saya tidak mau mengulang lagi tetapi tadi ada yang menanyakan tentang untuk mebel ya yang industri mebel dan kerajinan Indonesia. Benar yang tadi rekan saya ada yang menanyakan kenapa kita tidak bisa bersaing dengan IKEA atau Informa dan Ace Hardware karena dengan adanya pandemi ini orang banyak yang membeli produk-produk yang bolak-balik saya lihat penuh yang membeli apa produk-produk mebel. Nah, itu kendala apa maksudnya kita nggak bisa menciptakan seperti produk-produk Indonesia tapi yang seperti IKEA, Informa atau Ace Hardware kendalanya seperti apa. Ini juga yang menyangkut di perusahaan kosmetik yang Perkosmi kalau saya melihat di gerai-gerai besar misalnya di Sogo dan sebagainya kita melihat semuanya merk yang merk luar negeri, merk Indonesia malah cuma yang satu dua ya.

Nah saya mau menanyakan juga dengan *brand-brand* luar negeri itu apa juga sudah kerja sama dengan *brand* yang ada di Indonesia atau mereka *pure* memang kita impor yang dari luar negeri itu, karena sayang sekali. Jadi, saya terpaksa memakai produk-produk yang bermerk di luar negeri ya, karena apa namanya kadang-kadang saya mau mencari yang lokal itu di misalnya kaya Sogo dan sebagainya itu tidak ada.

Kemudian, saya setuju tadi yang rekan saya menanyakan apakah produk kosmetik itu untuk pabrik-pabriknya, untuk riset itu berapa persen yang dikeluarkan karena kalau dengan tadi ada Puspitek atau dengan kerja sama dengan universitas-universitas yang bisa meneliti produk-produk apa bahan

bakunya yang bisa kita ambil dari dalam negeri jadi tidak banyak produk yang kita impor.

Terus sudah gitu kemudian dengan GAPMMI makanan dan minuman saya mau menanyakan apakah juga di sini kan katanya meningkat ya setelah pandemi ini, apakah dengan minuman-minuman yang tradisional daerah misalnya kalau di DKI Jakarta terkenal dengan bir pletoknya. Nah, itu sudah dikembangkan seperti apa dan apakah ada peminatnya untuk ke diekspor dari apa namanya minuman-minuman yang khas, khas daerah di Indonesia.

Kemudian, sementara itu dulu ya. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Kalau tidak ada lagi dari teman-teman anggota kita ke Pimpinan masih ada? Nggak ada ya?

F-PDIP (ARIA BIMA / WAKIL KETUA):

Pimpinan saya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, makanya ini Mas Bimo.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Pimpinan sebentar ada yang ketinggalan.

KETUA RAPAT:

Oh boleh, boleh, boleh.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Yang dari untuk Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia yang saya tanyakan tadi kan yang selain bir pletok apakah ada pelatihan untuk UMKM yang bergerak di makanan-minuman.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik Bu Melani.
Silakan Mas Bimo Pak Arya Bima.

F-PDIP (ARIA BIMA / WAKIL KETUA):

Terima kasih Pimpinan rapat.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI Pak Martin dan juga Pak Hekal,
Yang saya hormati kawan-kawan Anggota Komisi VI yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara fisik,
Dan selamat datang yang terhormat pada Ketua Gabungan Asosiasi Mebel, Asosiasi Kosmetik, maupun Asosiasi Industri Makanan dan Minuman,**

Luar biasa pertemuan hari ini setelah pasca pandemi Covid-19 *Insha Allah* nanti kita bisa lahir kembali dan tumbuh berkembang dan salah satu ujung tombak yang kita harapkan adalah dari industri-industri dalam skala besar, menengah, dan UKM. Hari ini kita mendengarkan betul, mencermati betul salah satu hal yang Komisi VI terus berkonsentrasi selain mengatasi virusnya dengan vaksinasi dengan berbagai industri farmasi.

Kita juga bagaimana terus mengendalikan penularannya, tapi satu hal yang tidak kalah pentingnya dan sangat super penting adalah menghadirkan kembali *recovery* ekonomi pasca pandemi, baik dalam skala regional, nasional, maupun pasar global. Kami sangat berharap pertemuan hari ini sebagai langkah awal yang nanti bisa kita tindak lanjuti terus-menerus dengan berbagai asosiasi-asosiasi industri, karena memang betul daripada bangunan kesejahteraan sosial itu ada tiga yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara, yang kedua adalah koperasi, dan yang ketiga adalah sektor *private* yaitu swasta lainnya baik dalam skala besar, menengah, dan UMKM.

Menarik sekali dari sektor hulu hampir semua ada kendala tapi di industri makanan-minuman, industri kayu, dan industri kosmetik adalah bagaimana menyediakan *stock* bahan baku yang memberikan nilai tambah dalam artian *cost* produksi. *Cost* produksi kita tidak kompetitif di pasar ekspor, di pasar global karena adanya regulasi aturan yang, yang semuanya baik dari dalam dan luar negeri itu tidak mendukung mengecilnya *cost production*, ini saya kira menjadi catatan kami yang terus akan kita cermati mungkin tidak kita hanya di Komisi VI. Ketua, Pimpinan DPR yang membidangi kita Pak Rahmat Gobel saya kira nanti akan kita inisiasi untuk rapat gabungan karena tadi ada di sektor perizinan di BP POM, kemudian juga ada di perindustrian, juga ada di berbagai kendala termasuk pajak di Komisi XI ini perlu kita lucuti semua apa yang sebenarnya mempertinggi *cost* di hulunya.

Satu per satu dari industri kosmetik saya kira saya belum tahu kosmetik itu yang mana Bu ya batasannya apakah kalau muka saya di *facial* itu juga bagian kosmetik, kalau pakai *hand body lotion* itu apakah juga pakai kosmetik atau yang mana Bu, *opo* yang tampak di muka saya di sini saja itu yang kosmetik, saya kira itu perlu batasan dan perlu ada satu strategi pasar lokal, bahkan desa itu Bu kalau dulu Viva itu sudah masuk sampai ke desa-desa Bu, sekarang Vivanya sudah ganti apa saya nggak ngerti, yang penting struktur pasar berubah Bu, semua duitnya dibawa ke kesehatan dan struktur makanan maka kosmetik yang murah dan sehat saya kira itu penting.

Waktu kecil saya dilatih untuk di *bobo* pakai beras putih dicampur kencur apa itu muka saya itu supaya katanya kulit saya halus kalau mau tidur Ibu saya itu *diblonyohi* saya pakai, pakai bedak apa itu tutu itu beras itu kosmetik Bu, larilah yang ke yang *nature* alam kita yang kita punyai Bu. Saya disuruh minum, minum, minum temulawak sampai sekarang supaya kulit saya terawat dengan baik dan kalau malam *dibobo* gundul saya sini supaya rambut saya cepat tumbuh. Jadi, Ibu kembalilah ke *nature* alam kita yang, yang jangan, jangan terlalu teknologi yang canggih-canggih tapi Ibu bisa itu dijadikan sebagai satu industri tapi sadarkan bahwa kekayaan alam masuk di laut kita ada bahan kosmetik, mau masuk di dalam tanah ada bahan kosmetik, mau masuk ke hutan ada bahan kosmetik. Nah, itu mohon diangkat Bu sebagai kearifan lokal kita yang mana putri-putri keraton kita juga tidak mengenal apa yang namanya, apa yang namanya bahan impor Bu, mulai ratus mulai semuanya itu yang saya berharap tadi ada keluhan sebagian besar bahan impor itu kita kembalikan ke alam seperti juga jamu-jamu kita yang di Sukoharjo itu sudah jamu organik asli 1000% adalah bahan-bahan alam kita.

Memang nanti bagian fisik *development* perlu lebih membawa ke hal-hal yang menyuling bunga melati, menyuling bunga mawar, menyuling, menyuling, dan menyuling saya kira itu yang saya berharap dan industri kosmetik, industri mebel, industri makanan. Industri mebel terminal bahan baku rotan dan terminal bahan baku kayu Pak tolong itu disiapkan betul di masing-masing cabang ASMINDO, persoalan bahan baku ini baik itu kayu rakyat, kayu BUMN, itu betul-betul banyak kendala yang *costnya* juga membuat produksi jadi mahal, ini yang penting bagaimana kerja sama dengan dinas-dinas koperasi dan mungkin Dinas Perindustrian beserta Perhutani, beserta PTPN, beserta Kementerian KLH sampaikan Pak itu Pak, sudah ada model lagi, kayu-kayu rakyat ini *ndak* bisa keluar karena izin satu surat *under table* itu 3juta Pak per truk itu.

Semacam-semacam ini Bapak harus rapat dan sampaikan ke publik sekarang media sosial, media *online*, semua bisa menyampaikan supaya hal-hal yang menyangkut hambatan-hambatan terhadap proses pengembangan industri nasional kita yang sudah dikasih pondasi infrastruktur lima tahun kemarin itu supaya lebih produktif dan yang kedua Pak jangan berpikir secara klasikal Indonesia sentris. Bapak bikin lagi Papua Pak bikin lagi Kalimantan Pak. Bapak

harus mengembangkan industri permebelan itu supaya dekat dengan baku di Kalimantan Pak, sudah ada pelabuhannya, sudah ada jalan *pass*-nya, sudah ada telekomunikasinya, listriknya, jangan *nguplek* saja Bapak tidak mendukung konsep sentralisasi yang Bapak terapkan, tidak bagaimana membangun Indonesia yang lebih menyeluruh dengan infrastruktur yang sudah tertata dan itu juga akan menambah tambahan infrastruktur tambahan Pak, industri harus keluar jangan hanya *nguplek* di sekitar Jabodetabek apalagi di sekitar Jakarta, apalagi hanya di sekitar Jawa Barat, ini saya penting, kemudian juga industri makanan.

Mengenai pemasaran saya sepakat dengan teman-teman konsentrasikan strategi pemasaran lokal kita. Seperti dulu industri itu harus untuk kebutuhan nasional, untuk substitusi impor, dan kemudian ekspor tapi sekarang tidak bisa begitu, kualitas ekspor, substitusi, maupun pasar lokal itu harus sama. Maka kami harapkan saya agak, agak *meri* untuk kosmetik, untuk mebel, untuk industri makanan bahan-bahan yang disini yang di mebel saya ini saya cari sendiri-sendiri Pak, di Jogja, kemudian ada di sekitar Surabaya dapat mebel Pak. Kalau itu di katalogisasi ASMINDO punya katalog kaya IKEA Pak. Industri kosmetik punya katalog kaya IKEA, industri makanan punya katalog seperti IKEA.

Saya beli sriping pohung dari Wonogiri Pak, kemarin keripik tempe dari Klaten, saya kemarin dikirim apa itu Pak durian yang sudah divakum dingin dari Metese Solo Pak dan makanan padang dari Padang, kok nggak dikatalogisasi. Jadi, jangan mikir hanya yang industri menengah Pak, industri gabungan makanan. Yang UMKM-UMKM dan *burem* ini dipikirkan Pak, dia nggak ngerti pasar Pak. Infrastruktur ini harus mempercepat sesmen pasar Pak. Katalogisasi akan korelasi dengan sistem cara pembelian *online*. Nah ini, ini kita bisa memanfaatkan paradiaspora kita seperti yang dilaksanakan oleh ekspor-ekspor BNI Pak, ASMINDO harus punya kantor-kantor, kosmetik harus punya kantor-kantor, industri makanan harus punya kantor-kantor yang langsung di sini, ada seperti rapat RDP ini Pak Bapak bisa ketemu saya, saya di rumah ini makannya masuk angin Pak. Ibaratnya saya *buyer* dan *user* bersama paradiaspora di Prancis, di Cina, Jepang *ndak* usah atase, atase kesulitan dia nggak kreatif, mempertemukan *buyer* dan *user* saya pengen ketemu ASMINDO Pak bahan perurutan rotan ASMINDO siapkan Pak sudah dengan model semacam ini. Mungkin pameran menjadi sesuatu yang mendekatkan antara produsen dan *user* dan *buyer*, tapi telekomunikasi sekarang bisa Pak, dia bisa mempresentasikan bagaimana kerajinan-kerajinan semacam ini dijelaskan bahan bakunya apa, dia bisa jelaskan proses produksinya (rekaman terputus) ke BSD nggak saya buka-buka saja dan *servicanya good* Pak, barang yang nggak benar diambil Pak. Begitu barang datang dua jam, tiga jam atau besok, tergantung kita *deal* dia akan pasang Pak. Saya kira ini menjadi suatu pemikiran dan Ibu-ibu kosmetik itu di desa-desa Bu *online* semua Bu. Ibu harus bikin katalogisasi yang langsung dibuka dan dijamin halal, dijamin kalau produknya benar saya kira ini dengan harga yang murah karena pendapatan masyarakat kita juga turun.

Pak ASMINDO, kemarin saya beli empat kursi dengan kayu dan rotan harganya 1,2 juta, empat kursi Pak dari Jogja, saya hitung dapat untung dari mana ini ya tapi dia dapat Pak karena kayunya trembesi Pak, bagus kursinya kalau pakai duduk bisa untuk baca-baca sambil tidur. Maksud saya bahwa betapa yang namanya masyarakat kita soal kreatifitas luar biasa. Saya kira ASMINDO yang masalah sekarang soal desain. ASMINDO kasih desain sajalah, itu rakyat bisa bikin semua Pak baik yang rotan maupun kayu, dia minim desain ya dia minim desain, digitalisasi. Ini saya kira akan *spectrum* pasar akan semakin luas dan terintegrasi. Ini untuk salah satu cara kita membayar dan harga kita tetap murah. Mana mungkin 1,2 juta kok saya dapat empat kursi Pak, ini satu luar biasa dan rotan lagi, tak lihat kayu-kayunya kalau nggak akasia trembesi itu. Ini bentuknya sudah bagus Pak cara motongnya sudah melengkung itu, seperti pakai alat yang secara khusus.

Itu yang bisa kami sampaikan dan kami butuh masukan regulator-regulator masalah di Komisi VI ya. Tapi, bagaimana era *recovery* pandemi Covid ini tentu banyak kendala-kendala dan Komisi VI akan memfasilitasi Bapak nggak usah pakai undangan-undangan kalau perlu langsung datang saja H-1 untuk kami terima yang penting masukan-masukan dan ini luar biasa kadang kita hanya dapat laporan-laporan yang baik-baik saja ternyata yang *tingperintil* yang kecil-kecil itu masih cukup banyak yang sebenarnya membuat kita tidak kompetitif. Narasi besar Pak Jokowi membangun ideosentris membangun daya saing, membangun supaya kita tidak hanya menjadi obyek pasar tapi menjadi subyek untuk ikut menentukan pasar dalam negeri dan ekspor ini saya kira ujung tombaknya adalah di *panjenengan* semua Bapak-bapak yang hadir di sini dan tentunya kami sangat berharap terima kasih rakyat-rakyat kita sudah menjadi karyawannya Bapak-bapak, pajak sudah masuk, investasi akan mempertinggi PDB kita dan tentunya kalau kebutuhan dalam negeri Bapak cukupi maka impor juga akan mengecil. Itu semua kita wakil-wakil rakyat ini sangat bergantung suksesnya itu dari Bapak-bapak. Yang dari rakyat dan oleh rakyat sudah *nyoblos* kami 9 April 2019 Pak, yang untuk rakyatnya inilah tentunya Bapak-bapaklah yang menjadi ujung tombak kami semua.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA / WAKIL KETUA):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik terima kasih saya rasa sudah semua ya tinggal saya saja. Saya ini harus menggantikan Pak Martin karena beliau harus ada acara berikutnya. Mungkin sebelum saya minta tanggapan saya ingin menyampaikan juga beberapa catatan atau permintaan dari kami. Kami ini kan undang Bapak/Ibu

sekalian karena memang kami sadari selama ini kita sering bermitra dengan Pemerintah dalam hal ini membentuk regulasi padahal yang akan terdampak adalah Bapak/Ibu sekalian. Nah, tentu kita ingin yang memberi makan kepada rakyat Indonesia ini kan sebetulnya komponennya cuma dua Pak dan Ibu-ibu adalah satu negara, yang kedua adalah swasta baik itu wiraswasta ataupun korporasi ataupun UKM mikro dan seterusnya ini kan sebetulnya bebannya lebih besar ada di teman-teman swasta. Hari ini kita sering dengar pemerintah mengundang dan menggelar karpet merah kepada investor-investor asing padahal kita ada pengusaha-pengusaha lokal pun yang kita harus besarkan, karena Bapak/Ibu yang nanti kita harapkan untuk bisa meningkatkan ekspor pemasukan devisa, pembukaan lapangan pekerja, dan seterusnya.

Kalau dari yang kami pantau selama ini saya *alhamdulillah* sudah dua periode di Komisi VI jadi Pimpinan, sering kali ada kepentingan masyarakat itu yang tabrakan juga dengan kepentingan industriawan. Mohon maaf kaya tadi saya dengar teman-teman dari kosmetik menyampaikan bahwa bahan bakunya kurang lebih 90% masih impor. Nah, begitu juga setahu saya kaya di makanan dan minuman itu banyak sekali komponen impornya baik dari apa yang disampaikan Pak Nasim, jagung kadang-kadang beras, tepung, gula, garam ini kan masih banyak konten impornya. Kalau *furniture* juga kita tahu presiden kita ini kan anggota Bapak. Jadi, harusnya ini yang bisa kita dorong. Saya juga nggak sempat nanya ini kita dulu kursinya sama semua Pak kayu semua seperti itu, tahun kemarin diganti ini saya nggak tahu ini buatan lokal atau buatan asing gitu kan, tapi ya kita ingin semuanya maju jadi mungkin saya kalau boleh tanya tadi mungkin dari asosiasi ini saya minta dipertegas saja dua hal, satu dari asosiasi kosmetik baik yang kosmetik *brand* lokal. Kan begini Bapak/Ibu, *brand* lokal memang *brand* lokal, tapi *brand* lokal pun ketergantungan pada bahan baku impornya sangat tinggi, apalagi yang bukan *brand* lokal mungkin lebih banyak lagi konten impornya.

Kalau GAPMMI mungkin kita juga mau nanya presentase sebetulnya komponen impor dalam produk-produk yang Bapak, anggota-anggota Bapak ini produksi itu berapa persen gitu kan sekaligus juga terhadap yang HIMKI, karena ini yang kita dulu periode lalu mungkin Bapak/Ibu kita Kementerian Perindustrian dulu mitra kita sekarang pindah ke Komisi XI tapi saya ingat diawal Pemerintahan periode Pak Jokowi yang kedua salah satu dorongan besar adalah substitusi bahan baku impor. Saya juga pernah mempersoalkan mengenai jagung. Mohon maaf jagung ini kan kita pernah ada dorongan besar untuk nanam jagung dimana-mana ternyata jagung kita tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini yang kita mau cari jalannya supaya industri tetap bisa berjalan bagus tapi juga sebagian ini kita alihkan, karena dorongan dari Kementerian Perindustrian dan saya rasa Bapak/Ibu sering ketemu juga dengan Kementerian Perindustrian adalah substitusi bahan baku impor dan targetnya kalau nggak salah waktu itu sampai 35% gitu kan. Nah, itu sampai di mana.

Karena begini, kalau pengolahan seperti yang Bapak/Ibu lakukan tentunya ini kan membuka lapangan pekerjaan tapi ini kan membuka lapangan pekerjaan di sektor menengah atau hilir, yang kita harapkan ini bisa menjalar ke hulunya dan bagaimana kebijakan yang bisa kita terapkan supaya Bapak/Ibu tetap kompetitif karena kita juga banyak sekali tanda tangan perjanjian dan itu diratifikasinya semua disini. Seharusnya, setiap kali kita ratifikasi perjanjian dagang dengan negara lain yang kita membuka fasilitas bebas biaya, kita buka fasilitas mempermudah proses sistem bea cukai dan seterusnya itu kita konsultasi juga dengan Bapak/Ibu sekalian. Kira-kira masalahnya Pak, ancamannya apa, karena yang kita terima ini kan dari pihak versi pemerintah. Mohon maaf kita pernah beberapa kali undang beberapa pengusaha ke sini, kalau kita dudukin berjejer dengan pemerintah biasanya nggak berani ngomong karena takut menyinggung atau tidak sejalan dengan pemerintahnya. Jadi, kemarin masa sidang ini kita bilang coba kita undang mereka tapi tanpa ada pemerintahlah supaya kita kan mewakili rakyat termasuk Bapak/Ibu sekalian gitu kan, termasuk Bapak/Ibu karyawan yang Bapak/Ibu pekerjakan gitu kan. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa ini.

Jadi, mungkin kalau boleh saya ingin tanya tadi penegasan lagi di apa namanya kosmetik kira-kira apakah benar tadi angkanya 90% bahan baku impor, di GAPMMI berapa, di HIMKI berapa dan kemudian kira-kira regulasi apa yang Bapak/Ibu rasakan kurang bagus, penerapan daripada undang-undang, penerapan daripada peraturan pemerintah yang misalnya belum lancar atau perlunya ada pemikiran baru yang Bapak/Ibu bisa usulkan supaya kita bisa rembukan dengan pemerintah.

Mungkin itu saja yang saya mau minta, kalau boleh nanti saya kasih kesempatan masing-masing asosiasi jawab sebentar saja sebelum kita tutup rapatnya, karena mudah-mudahan materi ini yang akan kita gunakan pada saat kita berapat kerja dengan pemerintah.

Mungkin kita balik ya ini sudah cukup dari saya. Dari yang paling kiri dulu, ini nggak ada singkatannya ya asosiasi yang Bapak dan Ibu ini?

KETUA PPAK (SOLIHIN SOFIAN):

Ada, PPA Kosmetika Indonesia.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

PPA?

KETUA PPAK (SOLIHIN SOFIAN):

Kosmetika Indonesia.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Kosmetika Indonesia.
Silakan pak.

KETUA PPAK (SOLIHIN SOFIAN):

Baik makasih Bapak Pimpinan sidang.

Saya mulai sedikit dari produk ilegal, produk yang importasi disebut impor ilegal itu sebetulnya ada dua bagian Pak, satu yang diproduksi di lokal seperti terakhir ini ditangkap oleh aparat di Banten pemalsuan sampo, kemudian juga produk ilegal yang sifatnya adalah importasi. Yang sifatnya importasi ini lebih sulit di deteksi, karena biasanya Badan POM melakukan *post market*. Kalau sifatnya adalah *online* itu dari impor dari luar masuk ke paket kemudian sampai ke rumah pembeli. Jadi, *link* tadi itu sulit sekali di-*tracking*. Nah, kami memprediksi bahkan sebetulnya ada 80% sampai 85% itu ilegal yang berada di bawah radar bermain di *online*.

Nah, hal-hal ini berapa persen sebetulnya produk ilegal mempengaruhi pasar kosmetika Indonesia, sebelum ada penggalakan banyak *shifting* ke *online* produk ilegal sudah mengambil porsi 20% dari produk beredar. Berapa banyak sebetulnya produk ilegal yang, yang terdaftar kita nggak bisa *ngecacad* Bapak/Ibu, kenapa, kalau ketangkap baru ada data kalau tidak ketangkap tidak ada data, bagi yang ketangkap baru tiga bulan saya usaha, baru dua hari, jadi sulit sekali untuk mencacah persoalan ini. Nah, sehingga kerugian apa yang ditimbulkan, satu adalah kalau pemalsuan maka kerugian adalah pemegang *brand* tadi akan rugi karena intelektualnya diambil, kedua yang rugi adalah masyarakat karena produk kosmetik yang beredar itu tidak mendapatkan izin Badan POM atau belum mendapatkan, sehingga fungsi mutu dan keamanannya itu tentu menjadi resiko yang harus ditanggung oleh masyarakat yang membeli atau memakai.

Tadi kalau saya tidak salah ada seseorang yang dari sini juga ya mengatakan, aku lagi diterapi karena setelah pakai produk yang salah di pewarna rambut seperti apa jadi akhirnya alergi, salah satunya itu. Selanjutnya terakhir tentu adalah pajak penerimaan negara, negara akan rugi. Dia tiga hal tadi itu mengakibatkan kerugian yang terjadi di industri kosmetika. Kemudian kenapa produk tadi itu nggak bisa *listing* di seperti kita yang di IKEA ataupun di Sogo, ke mana-mana di sini saya katakan biaya *listingnya* itu tinggi sekali Bapak/Ibu sekalian. Praktis tidak mampu dilakukan oleh pelaku UKM, bisa mencapai jutaan Pak mungkin 500 juta sampai 1 miliar juga bisa. Bagaimana bisa, akhirnya hanya bisa di karena bagi seperti kita tahu ada namanya *trading term* segalanya itu banyak sekali, ada *black bonus* ya, *black margin* ya itu semua

besar sekali, sewa gondola, sehingga pemain-pemain ataupun lokal *brand* tadi menjadi sulit. Pemanfaatan bahan baku dasar alam sifatnya matematis ini yang sedang PPA Kosmetika galakkan, tapi kita juga perlu satu yang namanya *national character building*, tadi saya katakan saya bangga buatan Indonesia, kalau bangga saja mungkin kurang tapi pakai. Apa jadinya misalnya, istri saya kalau cantik ya kulitnya halus pakai apa, daun kelor nggak keren loh Bapak/Ibu, tapi oh saya oh cantik karena saya pakai produk ini viral, jadi *education, how educated* masyarakat sebagai konsumen ini menjadi penting.

Badan POM juga menginisiasi dengan duta kosmetik aman, bekerja sama dengan putri Indonesia. Di samping saya ada Ketua Harian PPA Kosmetika, ini sangat tahu mengenai putri Indonesia dan beliau juga sangat tahu bagaimana pemanfaatan bahan dasar alam yang ada di Indonesia sudah dimanfaatkan. Nanti mungkin bagian ini saya akan minta kepada Ibu Kusuma Ida Anjani membantu saya menjelaskan. Boleh? Terima kasih.

F-PDIP (ARIA BIMA / WAKIL KETUA):

Bu Kusuma kalau ada dewan-dewan juri putri Indonesia kita bisa dilibatkan Bu.

PPA KOSMETIKA (KUSUMA IDA ANJANI):

Siap Pak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang.

Yang terhormat yang kami muliakan Bapak Pimpinan Komisi DPR VI beserta jajaran,

Terima kasih, tadi sempat disampaikan oleh Bapak Ketum kami perihal pemanfaatan bahan baku alam, mungkin sedikit *introduction* di Indonesia itu 70% dari tanaman obat yang ada di dunia itu ada di Indonesia, jadi sebetulnya potensinya sangat besar untuk dikembangkan, tidak hanya untuk minuman herbal tapi juga untuk kosmetika. Dan kami melihat sesungguhnya tren penggunaan bahan baku ini sudah mulai terjadi banyak di anggota-anggota kami contohnya tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Ketum, bahkan daun kelor itu digunakan untuk kosmetika dan beberapa banyak dari anggota kami yang juga memenangkan seperti kosmetik *day* itu juga menggunakan bahan-bahan, bahan baku seperti rumput laut. Nah, hal ini menunjukkan sebuah USV seperti tadi disampaikan bahwa ke depan akan banyak sekali pembukaan *opportunity* baik untuk ekspor atau impor dan kita harus bersiap-siap. Penggunaan bahan baku alam Indonesia ini bisa menjadi USV untuk kosmetik Indonesia baik termasuk kosmetik halal untuk memperkenalkannya ke dunia jadi ini menjadi sebuah

keunikan kepada *citizen* di luar negeri untuk penggunaan kosmetik di Indonesia, sehingga saat kita keluar kita bisa memperkenalkan, oh kosmetik ini dari bahan alam asli Indonesia yang hanya ada di Indonesia dan di daerah tertentu dan secara tidak langsung ini juga akan memperkenalkan daerah atau pariwisata ke daerah tersebut.

Dan mungkin kalau kami boleh sampaikan perihal bahan baku tidak hanya bahan baku *row material* tapi juga *packaging material* yang perlu diperhatikan. Bagaimana harga-harga *row material* dan juga *row material* yang dikembangkan di industri di Indonesia ini mungkin bisa lebih dioptimalkan, sehingga bahan produk-produk akhirnya bisa memiliki harga yang berdaya saing kuat, tapi kalau kita bicara tentang produk-produk lokal asli Indonesia kebetulan PPAK 80% merupakan UMKM kosmetik Ibu/Bapak itu luar biasa dan unik dan juga tidak kalah saing dengan produk-produk dari luar, karena bisa kita lihat juga tadi sempat disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa sekarang itu untuk membuat kosmetik itu bisa dilakukan dengan maklon. Jadi bisa menggunakan dan mengoptimalkan maklon dari perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia tanpa harus pergi ke luar negeri, sehingga bila kita berbicara tentang bahan baku alam mungkin bila ada inisiatif atau insentif untuk menggunakan untuk para pelaku untuk bisa menggunakan bahan baku alam Indonesia lebih banyak atau lebih besar lagi itu bisa membangun karakter. *Character building* seperti yang Bapak Ketua sampaikan dan menjadi keunikan tersendiri produk-produk kosmetika Indonesia di luar negeri.

Terima kasih banyak semoga ini bisa menjadi sebuah masukan dan bisa membangun industri kosmetika dan juga para petani lokal yang ada di Indonesia.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin Pimpinan.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Iya silakan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya saya sedikit saja saya kira kan ini tentu hal yang sangat kompleks ya karena terkait bahan baku, lalu ekosistem dari apa namanya industri-industri. Yang kami ingin dengar sebenarnya dari apa namanya organisasi Bapak/Ibu sebenarnya apa sih yang bisa kita dorong ya apakah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, lalu sekarang sudah BRIN misalnya ya Badan Riset kita, karena itu salah satu kelemahan dari kita ini yang punya banyak *row material plasma* tapi kita di apa namanya di *researchnya* itu rendah sekali jelek. Kami ingin Pak kira-kira regulasi seperti apa yang bisa kita dorong

ya melalui Komisi VI sehingga ini bisa mendorong ini harapan dari para asosiasi, dari para pelaku industri, dan sebagainya.

Lalu yang kedua Pak, yang kedua saya melihat kita ini memang jago kandang Pak. Jadi, kita sudah tahu kita sudah punya banyak apa namanya bahan dasar, bahan baku gitu ya, untuk apa namanya untuk kosmetik ataupun yang lainnya, tetapi kita kadang-kadang di *market place* itu juga cara *placement* kita narasi yang kita bangun kemampuan kita untuk bersaing berkompetisi dengan asing itu, itu rendah sekali gitu loh Pak. Jadi, alih-alih kita menyalahkan persoalan di hilir misalnya serbuan produk asing tapi persoalan kita di hulu tadi baik itu bahan baku, kebijakan, dan sebagainya tapi di tengah juga Pak pelaku industri juga menurut saya gagal untuk memanfaatkan apa namanya ruang-ruang teknologi, ruang-ruang manufer dan segala macam yang sebenarnya juga harus didorong gitu.

Jadi, saya berharap Pak mari kita jangan menyerah sama keadaan kita, mari kita ini identifikasi regulasi apa yang kita butuhkan, ekosistem kaya apa yang bisa mendukung tapi disisi lain juga apa namanya perusahaan-perusahaan ini pelaku-pelaku ini juga benar benar harus mampu bersaing di apa namanya karena *market place* itu demokratis Pak *one you placement* bagus, *packaging* bagus, narasinya bagus *everybody will buy* gitu loh. Nah ini kan juga kelemahan di kita saya kira perlu koreksi juga.

Terima kasih Pimpinan.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Baik terima kasih.

Kita lanjut ke Asosiasi Kosmetik Perkosmi.

KETUA BIDANG PERDAGANGAN PERKOSMI (SHELLY TAURHESIA):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Terima kasih Bapak Pimpinan, tadi apa rekan asosiasi sebelah saya yang kosmetik juga sudah menyampaikan mengenai masalah ilegal produk palsu atau pun mem-*promote* ya produk lokal ya. Dan selama diskusi memang ada mengenai bahan baku itu yang saya tertarik dengan masukannya Pak Haris Turrino Bapak. Pak, nggak soalnya apa namanya mulai dari pendidikan gitu ya. Pak kalau boleh Pak saya apoteker Pak, kita lagi memang berencana untuk memberikan masukan mengenai ketahanan farmasi Pak, artinya apa namanya bagaimana ya kita menyediakan bahan baku gitu bukan hanya kosmetik, bukan hanya obat, bukan hanya itu bahkan sampai alat kesehatan dan lain-lainlah itu Pak ya ketahanan farmasi Pak gitu ya itu satu. Nah, yang kedua sebagai contoh ya mohon maaf Bapak karena kita bukan enggak terbiasa dengan ide-ide baru terus punya apa gitu ya jadi kita biasanya itu dengan data menganalisa *text time*-lah jadi jawaban singkat kami kali ini adalah kita melihat ada titik terang untuk

regulasi yaitu OSS RBA itu. Namun, dalam enam bulan ini dari bulan Juli sampai sekarang gitu ya yang lama di apa dideaktifasi gitu yang baru belum, itu saja si Pak kesulitan kita.

Jadi, kalau misalnya memang apa Komisi VI bisa membantu kami dalam rangka titik terangnya ini terealisasi itu aduh sangat membantu kami atau ada *interim solution* ya. Jadi, dalam waktu dekat ini jadi pengampu pindah dari Kemenkes ke Kemenperin yang Kemenperinnya masih kita masih belum lihat sehingga kita kan nggak bisa melakukan perluasan ya Pak ya, semula kita mau bukan hanya produksi *shampoo* saja tapi mau main ke yang lain itu kan jadi agak terhambat, itu saja si ya Pak ya.

Nah, kalau untuk bahan baku Pak Haris bantu saya lagi Pak. Jadi, ceritanya sebagai contoh ya soalnya tadi banyak Ibu Nevi, Ibu Intan Fauzi semuanya ini bahan baku ni Pak ya banyak banget. Di samping itu nanti Perkosmi atas usulan yang pertama tadi saya lupa namanya dari sebelah sini itu akan menulis surat ya detail, masukan secara detail gitu ya, karena mungkin presentasi terbatas 7 menit dari yang kita sudah siapkan nggak semua bisa kita tampilkan, oke. Contoh Pak, bahan baku obat ya dulu ada investor yang di bahan baku obat gitu ya. Obat itu kalau Bapak lihat bahan aktifnya itu hanya satu atau dua Pak pokoknya *very limit* selebihnya itu hanya bahan penunjang yang nggak penting-penting amat pun total maksimal empat ya, kosmetik lipstik yang sederhana kecil 30 *ingridient* Bapak. Jadi, dari segi kuenpeti gitu ya itu, itu apa namanya *very-very small* gitu ya.

Jadi, siapa yang mau *take a risk* gitu ya Pak ya untuk gitu pembelinya ini siapa gitu ya jaminannya gitu dan *cosmetic lifecycle* analisisnya ya Pak ya sekarang ya daur produknya itu berapa cepat si, tiga bulan, karena memang kosmetik itu dekoratifnya *di-drive* oleh fashion ya, fashion itu setiap musim, musim berganti warna pun berganti gitu ya, itu ini yang dekoratif ya Pak. Jadi, dalam waktu tiga bulan kita invest lama-lama di bahan baku pun dia hanya sepertiga puluh, kalau dikaliin kuanpetinya mungkin juga 0,0 sekian gitu loh Pak. Itu ya Pak kendalanya yang kita, bukannya-bukannya apa pesimis ya tapi itu tuh kenapa saat ini tidak ada yang tertarik untuk bermain di situ. Saya punya kesempatan bahkan Pak untuk melihat proposal-proposal penelitian ini ya Pak ya, itu kebanyakan langsung dari apa ya hulu ya *ngejam* langsung ke aplikasi Pak ya. Padahal, yang kita butuhkan si bahan ini bisa dipakai manakala data-data *safety*-nya ada gitu loh Pak, baik itu *infitro* ya apa namanya hanya nggak pada hewan ataupun manusia gitu ya, hanya bagaimana si gitu ya itu agak detailah, mungkin ini di Komisi IX ya kalau kita bicara ini, tapi di Komisi VI ini tadi sekali lagi regulasi kita *happy* tolong di apa ya dibantu dalam masa transisi ini bagaimana supaya kita tetap bisa apa berbisnis.

Yang kedua bahan baku contoh adalah jaminan pasar, terutama untuk kosmetik itu *ingridient*-nya banyak sekali.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Baik terima kasih.
Dari GAPMMI.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Makasih

Bapak Pimpinan sidang yang terhormat dan Bapak/Ibu semua Anggota Komisi VI,

Dari GAPMMI kami terima kasih sangat banyak pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian baik melalui ruangan ini maupun secara virtual. Jadi, kami mungkin bisa kelompokan menjadi beberapa kelompok yang pertama adalah bahan baku Pak. Bahan baku tadi kami menyambut baik ya permintaan tadi seperti dari Pak Supratman, Pak Haris Turino kita akan segera susun Pak masukan tertulisnya mungkin berupa matriks, kami akan langsung ini saja secara detail dan spesifik peraturan apa yang perlu ditinjau misalnya, kebijakan apa yang perlu dibuat.

Kemudian dari berikut *cluster* berikutnya adalah masalah logistik.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Maaf Pak, tadi kalau bisa selain regulasi dan peraturan yang perlu direvisi mungkin juga kebutuhan sebenarnya

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Betul Pak.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Sebab mohon maaf salah satu isu yang sering muncul di Komisi VI ini adalah kayak GAPMMI ini kan banyak menggunakan bahan baku impor yang sering diindikasikan merembes. Nah, ini mungkin bukan pelakunya bukan di tempat Bapak

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Betul.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Cuma kan akhirnya ditunggangi, kebutuhan Bapak ini ditunggangi oleh pelaku-pelaku yang merembes mengganggu akhirnya pasar petani dan pasar masyarakat gitu kan. Padahal, semuanya dengan judul ceritanya untuk memenuhi kebutuhan GAPMMI. Nah, atau ada lagi kebutuhan atau hasil produksi daripada masyarakat rakyat kita ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan yang GAPMI. Nah, ini kan konyol. Ambil contoh jagunglah, jagung ini katanya ada alfa toxinya terlalu tinggi gitu kan. Nah, padahal, itu kan tinggal dibina supaya bisa masuk ke sini atau pun kentang dan seterusnya gitu kan.

Mungkin kalau bisa rincian seperti penggunaan daripada kebutuhan bahan baku ini sebetulnya berapa kalau dari *user* Bapak yang jadi kan ketahuan kita bisa *matchingin* sama urusan produksi nasionalnya berapa ketimbang kebutuhannya gitu kan.

ANGGOTA KOMISI VI:

Izin Pimpinan, Pimpinan izin sedikit, biar tidak loncat ke yang lain Pimpinan.

Jadi, GAPMMI juga seperti tadi yang saya sampaikan Pak, saya minta secara detailnya paling tidak ya dari setiap titik kebutuhan dari itu ini untuk mengatasi kerembesan ini Pak jadi kebutuhan GAPMMI itu di gula, bukan hanya jagung ya, gula, jagung, dan garam. Nah, kalau nanti jagung kekurangannya apa, masalahnya di mana, gula apa, garam itu kenapa masalahnya, gula, garam lokal kita kenapa. Nah, ini yang kita mesti cari solusi ke depannya harus bagaimana kita untuk mengatasi ini. Nah, karena kan sayang kaya petani-petani garam kita ini. Pak di sudah banyak ada berapa ribu ton itu Pak puluhan ton apa ratusan ton kalau tidak salah itu mangkrak Pak itu Pak di Madura, di NTT, di apa itu kan kasihan, malah kita terus-terusan mengimpor. Nah, ini kita butuh kebutuhan itu secara detailnya gambarannya gimana jadi biar kita tahu gitu Pak.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Iya makasih.

Betul Pak beberapa contoh saja bahan baku kan seperti gula itu 100% impor Pak, tapi bukan kami yang menggunakannya tapi produsen rafinasi, bahan bakunya 100% impor. Garam, garam itu perkiraan kami di atas 70% impor, 30%-nya itu beli garam petani di-*refine* oleh produsen garam dalam negeri. Kalau produksi petani kita sendiri itu sudah habis Pak buat mungkin *table salt*. Garam meja saja sudah habis. Nah, itu yang terjadi di di sisinya di sisi yang hulu sekali.

Kemudian,

ANGGOTA KOMISI VI:

Sebentar Pak sebelum pindah ke tempat lain.
Pimpinan ini barusan Bapak GAPMMI mengatakan bahwa 100% GAPMMI tidak menggunakan produk impor

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Kami membeli 100% dari lokal rafinasi

ANGGOTA KOMISI VI:

Nah, sedangkan di informasi kita itu apa namanya impor kita itu untuk kebutuhan makanan dan minuman. Ini yang perlu kita nanti *crosscheck* di sini nanti.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Mungkin itu diklarifikasi sedikit, setahu kami kan.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Kami klarifikasi dulu Pak maksud saya begini.
Kami itu tidak boleh mengimpor gula rafinasi langsung, kami harus membeli di lokal. Nah, produsen gula rafinasi lokal itu ada 11 mereka adalah pabrik gula rafinasi. Bahan baku mereka itu adalah *rowsugar* yang mana itu 100% impor. Jadi, jadi kalau tengah ini dihilangkan ya kami menggunakan bahan baku impor 100% Pak, berupa berbentuk *rowsugar* diolah dulu oleh industri dalam negeri yang jumlahnya ada 11 pabrik dan kami wajib beli di situ. Ada Pak, ada diberi kesempatan untuk mengimpor langsung gula pasir, gula rafinasi tapi hanya untuk kebutuhan medis misalkan produk kebutuhan medis atau produk yang digunakan untuk diekspor kembali. Jadi, kita hanya mengolah di sini terus kita ekspor itu namanya QT, kemudahan impor tujuan ekspor, selebihnya kami harus beli lokal 100%.

ANGGOTA KOMISI VI:

Berarti Bapak mengambil produk itu untuk, untuk makanan-minuman itu lokal melalui kepabrikan itu tadi

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Betul Pak.

ANGGOTA KOMISI VI:

Pabrik itu yang melakukan impor

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Betul

ANGGOTA KOMISI VI:

Nah di situ data yang kami butuhkan Pak ya.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Iya

ANGGOTA KOMISI VI:

Nanti dibantu Pak, terima kasih.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Iya, iya.

ANGGOTA KOMISI VI:

Nanti dibantu Pak, terima kasih.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Makasih Pak.

Mungkin Bapak bisa nanti *next* juga bisa mengundang AGRI namanya (Asosiasi Gula Rafinasi).

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Tapi kan *user*-nya sebenarnya pasukannya di GAPMMI kan, *user*-nya daripada produksi mereka ini.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Produksi mereka penggunanya adalah kami, betul.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Justru itu kita perlu data dari Bapak seberapa banyak sih sebenarnya dari anggota Bapak itu belinya gitu kan, bukan hanya itu tapi bukan hanya gula tapi garam.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Betul Pak garam juga adalah komoditas yang kami butuhkan dan itu juga selalu apa selalu setiap tahun ya terjadi, terjadi diskusi panjang tentang itu

ANGGOTA KOMISI VI:

Pak coba jelaskan sedikit Pak masalah garam itu Pak, kenapa garam lokal kita tidak bisa Pak.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Baik Pak.

Garam itu memang menarik Pak, kami itu hanya membutuhkan sedikit secara *volume* maupun secara nilai tapi kami menciptakan nilai tambah yang luar biasa besar, tapi kalau itu tidak ada produknya nggak jadi. Contoh saja Pak mie instan satu bungkus itu kami cuma butuh garamnya paling 6 gram satu bungkus. Kalau kita rujuk satu 6 gram garam berapa rupiah sih, tapi kami bisa menciptakan nilai tambah satu bungkus mie instan itu kami ekspor atau kami jual domestik mungkin harganya 1.500, 6 gram garam itu berlipat-lipat Pak *value* editnya. Jadi, itu yang apa yang menarik ya seperti garam.

Nah, pertanyaannya garam itu kita lautannya luas kok garam kita masih harus impor, ternyata Pak kami bertanya dengan pakarnya garam, produsen garam di dunia ini Pak Amerika Serikat, Australia gitu ya, Kanada atau negara-negara yang lain. Okelah biar perbandingannya tepat kita gunakan garam laut mereka ada yang tambang juga kan. Garam laut itu Pak saya tanya ke produsen garam Australia sama Amerika, kok mereka bisa jadi produsen garam di dunia, eksportir di dunia. Garam itu Pak katanya kalau dihitung biaya tanah itu harus masuk investasi tidak akan ada investasi yang *visible*. Jadi, tanah itu jangan beli karena butuh ladang yang luar biasa luas kan Pak.

Terus kedua, garam itu Pak butuh curah hujan yang rendah, itu kedua, ketiga garam itu butuh sinar matahari yang panjang. Kita di negara katulistiwa curah hujan kita di sini surganya Pak, terus yang kedua sinar matahari yang panjang diatas 44 di atas 14 jam tidak pernah terjadi di kita, tapi kalau di negara di subtropis itu kaya Australia dan Amerika Serikat, mereka siangnya bisa 16 sampai 18 jam. Jadi, di situlah ya tapi Pak kita kan jangan kecil hati kita punya komperatif *advantage* misalkan, tidak ada yang menyaingi produksi kelapa sawit kita di dunia.

Jadi, seperti itu si Pak kita dijelasin oleh pakar, jadi cuma kita memang nggak bisa jadi judieksius kalau garam nggak bisa, bisa Pak tinggal bagaimana mengundang, mengundang *player* untuk invest di sini nah itu mungkin sekalian menjawab pertanyaan dari Ibu Intan Fauzi.

ANGGOTA KOMISI VI:

Maksud kami Pak GAPMMI kenapa tidak menggunakan garam lokal itu kekurangan garam lokal yang ada sampai sekarang tidak tergunakan terbuang-terbuang itu Pak itu apa alasannya, apa kandungannya atau apa bagaimana dan apa solusinya untuk bisa menampung itu semua itu loh.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Baik Pak.

Kami membeli garam itu membeli ke produsen garam rafinasi, sama Pak produsen garam rafinasi itu membeli garam dari petani dan mengimpor juga bahan bakunya dari, dari luar Pak ya. Nah, secara *volume* Pak ini mungkin teman saya bisa membantu membenarkan, secara *volume* produksi nasional kita itu Pak paling sekitar 30% habis, 70%-nya nggak ada secara *volume* Pak secara *volume*. Nah, kualitasnya mungkin diskusinya beda lagi. Kami membutuhkan kualitas garam dengan tingkat kemurnian 95% ke atas NACL-nya, itu soal kemurnian Pak ya, terus kadar air juga, terus yang ketiga adalah tingkat cemaran. Nah, sayangnya ya Pak ya tingkat pencemaran itu salah satu yang kita lihat adalah logam berat, mercury biasanya ya terus beberapa timah hitam. Sayangnya lumbung garam kita Pak di Indonesia biasanya kan dari Madura. Nah, itu tingkat cemaran logam beratnya sudah tinggi Pak. Nah, kalau tingkat cemaran logam beratnya yang relatif rendah itu di Nusa Tenggara Timur tapi kejauhan banget jaraknya ke, ke pusat sentra-sentra industri pengolah garamnya. Jadi itu juga jadi PR juga Pak.

Dan yang ketiga Pak yang saya bilang tadi tanah. Kita Pak petani-petani kita itu kan sudah punya tanah turun-temurun sepetak-sepetak gitu. Kalau industri mau invest Pak dia harus beli itu tanah, dia nggak bisa masuk Pak, itu yang disampaikan oleh si produsen garam yang mengolah garamnya petani. Jadi kalau mau invest butuh ladang garam berapa ribu hektar nggak sanggup mereka, nggak akan balik modalnya, jadi harus ada semacam tanah disewakan oleh pemerintah atau apa, sementara di Indonesia itu kan cukup berat Pak ya.

ANGGOTA KOMISI VI:

Berarti intinya Pak kalau untuk *stock* saya yakin kalau garam kita ada buktinya terbuang-buang itu satu kalau untuk *stock* Pak ya, saya kira tidak akan

kekurangan makannya saya butuh data di situ. Kalau masalah kualitas, nah, itu yang perlu kita pelajari untuk kualitas.

Yang ketiga kalau masalah transportasi kaya dari NTT dengan memenuhi kebutuhan produsen. Nah, ini yang harus kita pikirkan transportasinya. Kenapa dari luar negeri bisa nyampe ke Indonesia ya kan *costnya*, kenapa yang dari di dalam Indonesia sendiri tidak bisa, nah itu yang perlu kita pelajari Pimpinan ke depan.

Terima kasih.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Terimakasih Pak.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Yang kita minta dari Bapak mungkin data dari anggota Bapak *user-nya* ya.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Baik Pak kami akan, akan kirimkan.

Terus kemudian berikutnya adalah soal energi, energi ini ya menjadi apa menjadi harapan kami juga untuk, untuk bisa ada solusi seperti tarif daftar listrik yang terus-menerus naik dan ya mungkin akan naik lagi di tahun ini ya. Kemudian gas. Presiden sudah menginstruksikan mungkin dua tahun yang lalu gas untuk industri itu harus \$6 per Mmbtu dan ini sudah dinikmati oleh industri di Thailand, di Malaysia, di Singapur sejak bertahun-tahun lalu. Sementara, kami di Indonesia industri sebenarnya tidak cuma mamin semua Pak ya, kisarannya masih harus membeli gas 9 sampai \$10 per Mmbtu. Jadi, itu juga menjadi apa menjadi harapan kami.

Terus kemudian energi baru terbarukan, sebenarnya ini kami sudah naik Pak apa keinginan untuk ini sekaligus menjawab juga dari pertanyaan Ibu sebelumnya soal peran kami di *green* ekonomi seperti apa. Kami sangat ingin membuat listrik yang *green* diatas kami PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Kami bersyukur pemerintah sudah berani ya bikin Permen ESDM yang banyak terobosannya, misalkan tarif ekspor ke luar itu 100% bisa, kami bisa ekspor listrik itu 100% dari tenaga surya. Perizinannya akan dipangkas terus kemudian juga tarif *charge-nya* juga akan dikurangi. Nah, ini kan sempat di *freezing* kemarin tapi kami dapat kabar baik dari media bahwa pemerintah tetap akan jalan terus jadi kami sangat berharap itu.

Terus kebijakan tentang *packaging*, semua produk mamin Pak itu wajib dikemas untuk keamanan pangannya dan tidak ada yang menyaingi sampai saat ini tidak ada yang menyaingi keamanan, efisiensi baik dari sisi berat ya, dari sisi



volume dibanding plastik, jadi seperti itu. Nah, kebijakan mengenai perplastikan di Indonesia kelihatannya memang mengarahnya ke para industri pengguna plastiknya. Nah, ini yang kami ingin ini ditinjau juga Pak contohnya Pak diarahkan oleh pemerintah ini melalui Permen LHK 75 bahwa dalam 10 tahun tidak boleh lagi ada yang namanya kemasan *sachet* yang di bawah 100 gram misalkan, tidak boleh ada lagi kemasan botol plastik yang di bawah 1 liter dan seterusnya. Padahal, menurut hemat kami, kalau kita lihat ini kan berarti kan dianggap sumber, sumber penyakit sampah kita itu ada di konsumsi dan produksi, termasuk pertanyaan Ibu tadi ya Ibu Intan atau Ibu, Ibu Neti yang menanyakan dengan kenaikan *delivery online* sampah plastik meningkat. Pertanyaannya adalah jumlah konsumsi plastik per kapita per tahun Indonesia, per kapita per tahun kisarannya belum mencapai 20 kg per kapita per tahun Pak. Sementara, negara tetangga kita Malaysia, Thailand, Filipina itu kisarannya sudah di atas 40 kg per kapita per tahun dua kali lipat kita. Singapura, negara Eropa Barat, Jepang, Amerika Serikat sudah di atas 100kg per kapita per tahun konsumsi plastiknya. Pertanyaannya, kalau sumber penyakit sampah kita itu ada di konsumsi dan produksi maka yang paling penyakitannya adalah Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan berikutnya adalah Thailand, Malaysia, dan Filipina, tapi kenyataannya tidak. Nah, jadi menurut hemat kami yang perlu kita lihat adalah yang perlu kita lihat adalah apakah manajemen persampahan kita ini sudah mumpuni, sudah memadai atau belum jadi itu masukan dari kami.

Kemudian mengenai integrasi ke hulu, sekali lagi secara statistik di dunia industri yang sanggup dan berhasil melakukan integrasi ke hulu itu sangat minor. Misalkan kami industri katakanlah pengolah susu, kami mengintegrasikan ke hulu sampai ke perternakannya, pakannya, dan sebagainya itu bukan kompetensi kami Pak dan kami tidak mungkin tidak akan berani untuk eksplorasi ke sana misalkan atau kami mendirikan perkebunan tebu itu mungkin kami menyerahkan pada ahlinya. Di sinilah mungkin PR kita bersama siapa ahlinya berani investasi di Indonesia misalkan untuk investasi perkebunan tebu, pertanian jagung, dan sebagainya.

Kemudian masalah berikutnya adalah kerja sama perdagangan internasional. Menurut kami kerja sama perdagangan internasional kita nggak bisa menghindar, karena ini kan sudah komitmen pemerintah kita sejak puluhan tahun yang lalu mungkin sejak, sejak Bali *concord* kalau saya tidak salah ya tahun 80-an kemudian kita jadi anggota WTO dan seterusnya. Cuma memang kita harus lebih jeli di mana kita bisa melakukan secara agresif perjanjian kerja sama perdagangan internasional ini. Misalkan saja produk kakao produk kita unggul Pak produk berbasis kakao kita. Cuma mau menembus Uni Eropa mau menembus Inggris kita kena 15% biaya masuk. Produsen kakao *best* produk seperti Ghana ya, Sri Lanka, dan sebagainya mereka 0% kenapa, karena mereka negara persemakmuran, misalkan Pak ya dan mereka kena 0%. Bayangkan kita sudah dihadang oleh 15% tarif. Jadi, di situlah mungkin kita bisa menembus dengan kerja sama perdagangan internasional.

Nah, sekarang di Pemerintahan Presiden Jokowi ini kita sudah terus mendekati putaran akhir Indonesia namanya Indonesian Uni Eropa Economic Partnership Agreement. Nah, ini kalau nanti ini terjadi kita bisa Pak tembus karena sampai saat ini tadi data membuktikan dengan negara-negara Uni Eropa itu kita surplus semua perdagangannya jadi itu itu contohnya, tapi untuk hal-hal yang lain memang harus hati-hati misalkan produk-produk yang kita masih minus ya pedagangannya dengan, dengan negara *partner* dagang.

Pasar domestik dan ekspor sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Joni Erizal tadi bahwa kita jangan sampai hanya mikirin ekspor saja, ini ibarat kalau main bola nyerang saja gawangnya kita lupa, kita kebobolan. Nah, Pak untuk industri mamin kami cukup percaya diri untuk menyatakan gawang Indonesia kami jagain dengan baik Pak. Bapak bayangkan misalkan ya kami harus membeli gula, itu mungkin 50% lebih mahal daripada kompetitor kami dari, dari negara Malaysia, Thailand, Vietnam dan sebagainya, karena kami membeli gula refinasi yang ya terpaksa harus tinggi ya kan harus dibeli di lokal, tapi produk mereka bisa kami halangi Pak, bukan dengan minta perlindungan ya, produk mereka ya terbatas untuk bisa apa melawan dari produk-produk kita. Jadi, kalau secara presentase memang industri mamin hanya mungkin mengekspor 20% *volume*, 80%-nya untuk jaga gawang Pak dan memang untuk mencukupi kebutuhan di republik ini, jadi seperti itu.

Terus masalah perizinan, perizinan itu ada dua Pak kalau kami kategorikan, perizinan investasinya dan yang kedua perizinan operasionalnya. Perizinan investasi, ya kita sangat bersyukur ya dengan adanya terobosan OSS RBA, cuma ya betul kata teman saya bahwa PR-nya hanya berilah waktu transisi yang cukup, jangan mendadak semua harus jalan, malah akibatnya menghambat, misalkan daerah belum siap tapi mereka nggak berani melayani lagi Pak itu contoh ya. Atau institusi yang lain misalkan, izin edar BP POM itu harus integrasi elektronik ke dalam OSS tapi kenyataannya belum siap akibatnya bagaimana kalau BP POM nggak boleh melayani registrasi tidak melalui OSS misalkan itu contohnya Pak. Jadi, seperti itu, kemudian semoga sudah *tercover* semua tadi.

Logistik Pak, logistik setuju sekali yang disampaikan oleh Pak tadi bahwa Pak Supratman ya kalau saya nggak salah dan juga tadi Pak Haris Turino juga menyinggung soal ini. Logistik seperti kontainer yang langka, *shipping, shipping cost* yang meningkat gila-gilaan itu adalah sistemik, seluruh dunia mengalami, tapi ada hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia misalkan memperlonggar kebijakan peraturannya terkait penegakan hukum *Over Dimension Over Loading* Pak (Odol). Kan Pemerintah melalui Kemenhub akan tetap melaksanakan Januari 2023. Memang kami sepakat waktu itu dibikin Pak itu bulan Februari 2020, kita nggak tahu ada covid ini. Jadi, kita sudah siap-siap untuk bikin *roadmap* Pak ya biar Januari 2023 truk-truk itu nggak ada yang

obesitas misalkan ya, muatannya tidak *over loading*. Tapi Pak dua tahun terakhir itu *mode* kami adalah bertahan hidup *survival*, sama berusaha bangkit *recovery*, nah kami masih dalam proses itu. Jadi, belum bisa mendandani armada kami dan armada ini Pak, kan harus membutuhkan truk tambahan satu, terus kedua membutuhkan operator, supir dan kernetnya. Supir Pak untuk bisa punya sim B2 itu secara alamiah dia butuh waktu dua tahun nggak bisa lompat Pak. Untuk mendidik seorang supir biasa dia harus punya sim A dulu, kemudian dia naik kelas jadi sim A umum, terus kemudian dia baru naik kelas jadi sim B1, baru kemudian naik kelas menjadi sim B1 umum, kalau untuk truk yang besar dia harus sim B2 dulu baru naik kelas ke sim B2 umum, secara alamiah dia butuh minimum dua tahun Pak secara alamiah ya bukan, bukan dengan hal yang luar biasa. Jadi ini juga yang kami butuh pemerintah mempertimbangkan, karena kami khawatir Pak kalau dipaksakan odol yang ada adalah truk-truk ditangkapi nggak ada solusi, nanti berjejer dipinggir jalan truk-truk ditangkapi terus industri nggak jalan Pak, karena misalkan mamin bahan baku kami truknya banyak yang odol Pak, misalkan kami butuh apa bahan dari kelapa sawit ya, kami butuh bahan dari perkebunan. Kenapa Pak odol itu terpaksa di Indonesia terjadi, tadinya bisa diangkut satu truk kalau dengan *zero* odol perlu diangkat dua truk Pak dengan berat yang sama, berarti biaya truknya jadi dua kali lipat. Nah, itu kan yang menanggung siapa, hanya ada dua kemungkinan pengusahanya yang nanggung atau *urunan* dengan konsumen, tapi dua-duanya itu meningkatkan biaya ekonomi.

Jadi, seperti itu Pak kira-kira saya harap teman saya yang lain menambahkan dari Bu Karina mungkin, Bu Ribus, Bu Krisma, dan Bu Geby silakan, mohon izin ya Pak.

GAPMMI:

Mohon Izin Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mungkin ini saya hanya menambahkan terkait dengan komoditas bahan baku, sebetulnya untuk data komoditas bahan baku karena kami itu tidak mengimpor langsung baik untuk garam, gula maupun susu. Perantaranya adalah industri yang mengelola kembali, di seperti kalau gula itu dengan gula pabrikan, gula rafinasi, kalau garam itu kemudian juga dengan pabrikan garam rafinasi.

Untuk mendapatkan perizinan impor itu mereka harus menyampaikan data-data kebutuhan dari pabrikan makanan, minuman dan itu berupa kontrak. Jadi, mohon maaf Bapak Pimpinan bilamana memang diperlukan data yang lebih akurat sebetulnya yang mempunyai data lebih lengkap dan pasti itu ada di Kementerian, baik itu Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan. Terkait carut marut komoditas bahan baku baik itu gula maupun garam, mengapa di



hulunya banyak tersendat, mungkin kita sama-sama harus melihat bagaimana sulitnya berinvestasi di hulunya tersebut, baik dari kebijakan, kemudian dari sudut sumber daya manusia, kemudian juga dari sudut lahan, dan yang terakhir tentunya teknologi yang ada. Kita sudah paham bagaimana gula ini selalu menjadi percakapan dan garam menjadi percakapan setiap akhir tahun, setiap akhir semester, dan setiap awal tahun. Bagaimana antara petani dan industri ini saling tarik-menarik jadi seperti itu Pak kira-kira yang bisa saya tambahkan.

Mungkin kalau terkait dengan komoditas bahan baku ada baiknya kita punya diskusi yang tersendiri karena ini cukup panjang untuk pembahasan ini.

ANGGOTA KOMISI VI:

Izin Pimpinan sedikit Pimpinan.

Bapak/Ibu GAPMMI,

Kami paham kalau data dari kementerian kita sudah jauh sejak dari dulu sudah ada secara globalnya sudah ada. Kami hanya butuh dari gabungan GAPMMI itu kebutuhan yang selama ini diminta, di situlah nanti kita akan *balance* kita akan *crosscheck*. Itu yang kami butuhkan kalau data di Kementerian sama Pedagangan, Perindustrian, dan lain-lain kita sudah ada, nah itu yang kita butuhkan nanti detailnya. Dari jadi kami tahu nanti rembesannya di mana permasalahannya apa, bagaimana, itu yang kita butuhkan ya.

Terima kasih Pimpinan.

GAPMMI:

Iya terima kasih Pak.

Insyah Allah kami nanti akan memberikan datanya secara global karena yang kami punya saat ini itu.

Terima kasih.

ANGGOTA KOMISI VI:

Iya paham ya Bu ya maksud saya dari gula, garam, jagung itu yang kami butuhkan, makasih.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Sebetulnya membeinya Bapak dan Ibu kan bisa menyampaikan kan mereka setiap tahun ambalnya berapa gitu kan, kan kelihatan dari situ kan.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Izin Pimpinan untuk GAPMMI

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Iya.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

GAPMMI ini saya mau menanyakan adakah pelatihan-pelatihan untuk para UMKM untuk makanan-minuman dan apakah produk-produk dari daerah misalnya kaya DKI bir pletok sudah pernah dicoba ekspor atau bagaimana.

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Bir pletok ya.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Terima kasih Bu.

Terima kasih pertanyaannya, iya mengenai pelatihan-pelatihan memang GAPMMI anggota kami mayoritas adalah UMKM juga. Jadi, kami punya satu Wakil Ketua khusus menangani UMKM ini dan kami mengadakan Bu pelatihan memang sesuai kapasitas GAPMMI. Biasanya pelatihan kami itu bentuknya pelatihan tentang prosedur cara produksi pangan olahan yang baik jadi itu kita lakukan di anggota-anggota kita diberbagai daerah Bu ya. itu yang bisa kita lakukan termasuk membantu sosialisasi peraturan-peraturan dari pemerintah kepada para anggota kami tersebut. Selanjutnya, juga pelatihan juga mengenai proses produksi halal, ini juga kami berikan kepada para anggota kami Bu. Itu yang bisa saya sampaikan.

Kemudian selanjutnya mengenai minuman-minuman ya produk-produk khas daerah seperti bir pletok, apakah sudah ada yang memasuki pasar ekspor. Jadi, Bu, produk-produk UMKM yang kami bina itu banyak Bu yang sudah mengekspor, mungkin termasuk bir pletok, bir pletok ini atau pun jenis-jenis minuman yang lain jadi ada Bu dan sebagai informasi juga buat Ibu dan Bapak/Ibu semua sekalian di sini, GAPMMI diminta pemerintah menjadi partner juga untuk kampanye internasional kampanye dunia *spice up the world*. Jadi, pemerintah itu punya program untuk apa kepada seluruh dunia untuk seperti kita begini Pak *kitchen of the worldnya* Thailand, karena Thailand itu kan punya ambisi luar biasa di setiap negara harus ada minimum satu buah restoran Thailand. Nah di Indonesia ambisi pemerintah bersama-sama industri adalah paling tidak kita disetiap di apa di internasional itu ada masakan dan bumbu khas Indonesia yang berada di negara tersebut misalkan rendang, sate ayam, nasi

goreng, sama satu lagi gado-gado. Jadi, itu Pak dan kita sekarang sedang terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah dan ini komprehensif dari sisi hulunya, kemudian pengolahannya, sama proses pemasarannya, itu contoh-contoh yang sudah kita lakukan.

Mungkin itu menjawab, silakan teman-teman ada yang menambahi mungkin, makasih. Semoga ini bisa menanggapi semua pertanyaan Bapak/Ibu semua dengan penuh rasa hormat kami tidak bisa satu-satu ya.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Pak saya belum tadi jawaban untuk masalah itu Pak GAPMMI masalah itu termasuk kosmetik, termasuk mebel, mebel nggak ya. Masalah sertifikasi halal haram itu loh Pak itu bagaimana saya butuh jawaban.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Oh iya baik Pak, oh ini Pak oh ini luar biasa Pak, ini kami sangat-sangat mendukung ide yang *out of the box* ini dari Pak Nasim, karena kan secara maaf saya bukan ahli agama saya orang awam tapi yang kami pahami Pak ya yang kami pahami, Al-Quran itu sendiri kan sebenarnya prinsipnya semua boleh kamu konsumsi kecuali yang diharamkan. Nah, tapi undang-undang kita yang baru ini Pak, tanda kutip terbalik, semuanya tidak boleh kecuali kamu dihalalkan dulu melalui sertifikasi. Jadi, prinsipnya *everything* itu *forbidden*.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Bapak ini NU ya?

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Saya, saya anggota NU Pak

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Oh iya.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Menteri Agamanya teman dia

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Dan masukan kami Pak 15 tahun terus-menerus kerja sama berkomunikasi dengan pemerintah mestinya seperti itu, artinya, artinya begini artinya, mestinya pemerintah jangan terlalu fokus kepada sertifikasi halal yang jumlahnya puluhan juta Pak, puluhan juta, kenapa tidak fokus yang sedikit saja, karena kan hukum dasar kita kan gitu Pak dari Tuhan kan bahwa semuanya itu anda dibolehkan kecuali yang dilarang

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Cerdas berarti Pak GAPMMI ini.
Nah, saya mohon bantuan GAPMMI

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Pak ini *out of the box* Pak. Kami

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Ini tidak perlu *out of the box* kalau perlu kita ini sampaikan, Pimpinan sampaikan kepada masyarakat teman-teman anggota juga kalau perlu ada pers di sini sampaikan, bahwa ternyata kita ini mayoritas muslim, mayoritas makanan halal, kenapa kita dipersulit ya kan, ya kan sudah jelas kalau sudah ada yang halal ya kan kenapa harus diharamkan, nah yang nggak haram jadi halal. Nah, sertifikasi kalau kita mau ekspor misalkan Pak ke luar negeri boleh kita sertifikasi halal karena kapasitasnya tidak besar ya kan. Nah, kalau yang di lokal ini sebetulnya cukup sertifikasi haram, ini juga sudah pernah saya sampaikan ke menteri. Nah, gabungan-gabungan asosiasi ini juga bisa menyampaikan, apa, otomatis supaya tidak memakan waktu, biaya, tenaga, kasihan UMKM kita bangsa kita ini ya kan gitu loh. Itu sebetulnya Pimpinan menjadi catatan ini Pimpinan kalau perlu dalam RDPU ini ada catatan-catatan kesimpulan Pimpinan ya kan. Catatan kesimpulan masalah kita Komisi VI mendukung sertifikasi haram untuk di lokal, sertifikasi halal untuk ekspor selesai, ya kan, termasuk tadi pendataan dari para teman-teman gabungan semua.

Saya kira itu Pimpinan menjadi catatan. Terima kasih.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Kalau itu jangan dibawa ke komisilah itu silakan disuarakan sendiri.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Terima kasih Pak Nasim, terima kasih Pak.
Sebenarnya aspirasi industri banget itu Pak jadi sebenarnya kami memberi masukan dengan cara berbeda. Jadi, pemerintah kenapa tidak

mengejar yang men-*declare* saja jadi sertifikasi halal wajib kami setuju bagi yang men-*declare* kehalalan. Jadi, kan yang berani *declare* dia harus dikejar sampai ke lubang semut untuk melakukan sertifikasi, tapi kalau yang nggak *declare* mestinya jangan dipaksa mungkin dia belum siap. Karena Pak sertifikasi halal kami saya secara PD bahkan bilang hampir seluruh anggota GAPMMI itu sudah melakukan sertifikasi halal, kenapa, karena kami pertama siap, terus yang kedua kami merasakan ada nilai tambah dengan kami mengklaim men-*declare* kehalalan, tapi jangan sampai tukang pisang goreng, tukang bakso misalkan yang ada di tetangga kita dikejar juga gitu loh. Jadi, mereka sebenarnya kan tidak harus men-*declare* kehalalan misalkan, misalkan ini contoh saja Pak atau produsen kerupuk misalkan atau produsen keripik pisang dan seterusnya, itu adalah contoh-contohnya Pak Nasim.

Terima kasih Pak.

ANGGOTA GAPMMI:

Izin, izin menambahkan Pak.

Ini karena kebetulan saya harus me-*lead* asosiasi untuk halal pada saat RUU Cipta Kerja, itu sebetulnya kami sudah mengusulkan ada dua *sorry* tiga hal, yang pertama adalah mengeluarkan industri-industri yang tidak berbasis hewani *alhamdulillah* itu dipenuhi, kemudian yang kedua terkait dengan usul Pak Nasim tadi bahwa kita mengeluarkan semua jadi hanya sertifikasi halal. Namun, sayangnya itu ditolak Pak, kemudian usulan ketiga adalah membuat sertifikasi halal bersifat *volunteer* dan ini juga kebetulan ditolak. Jadi kira-kira itu yang sudah kami perjuangkan dulu selama RUU Cipta Kerja. Mohon izin kalau misalkan memang ini mau diangkat kembali demi keberlangsungan rekan-rekan khususnya industri UMKM mohon ini untuk dipertimbangkan kembali untuk disampaikan kepada pemerintah.

Terima kasih Pak.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Yang menolak siapa Bu waktu itu?

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Siapa Bu, saya ingin tahu karena di sini ada PPP juga mendukung sebetulnya Bu.

ANGGOTA GAPMMI:

Dari BPJPH, kemudian juga dari waktu itu dari Kementerian Agama dengan menteri sebelumnya Pak.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Kementerian Agamanya itu dari mana itu Bu?

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Jadi *alhamdulillah* hari ini memang

ANGGOTA GAPMMI:

Padahal kami rapat RUU untuk halal ini cukup insentif dan sampai larut malam juga namun akhirnya terakhir ditolak juga.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Tapi terima kasih Bu itu adalah termasuk bahasa dari benar-benar dari hati nurani para masyarakat, khususnya para produsen pada semua ya masyarakat yang untuk pengusaha minuman. Sebetulnya masalah politik itu seharusnya jangan masuk ke ranah itu sebetulnya, seharusnya ini benar-benar bermanfaat untuk sertifikasi ini karena apa, kalau kita jujur berarti orang jualan yang tidak punya sertifikasi bagaimana, nah itu yang sebetulnya perlu Ibu perjuangkan, GAPMMI perjuangkan, asosiasi perjuangkan saya yakin gitu

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Cukup ya ini rapat sudah sampai setengah tiga ini, ini sudah pada duduk lama jangan dipanjang-panjangin, tapi tadi kan yang bicara Pak Supratman itu Ketua Baleg ini yang baru masuk adalah Wakil Ketua Badan Legislasi juga dan mereka sudah komit untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja mungkin nanti beberapa masukan ini kita sampaikan lagi,

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Sertifikasi halal.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Ya oke Pak Nasim bikin *statement* pribadi dulu itu.

KETUA GAPMMI (RAHMAT HIDAYAT):

Mungkin menambahkan satu lagi Pak, koordinasi antar instansi itu adalah perizinan yang berlapis-lapis, contoh Pak ya kalau kami mau impor bahan baku produk asal hewan misalkan susu atau daging gitu ya dan olahannya, kami harus pertama minta izin dulu ke Kepala Daerah tingkat II Pak, sesudah itu kami meminta izin dulu ke Kepala Daerah tingkat I, sesudah itu kami minta izin lagi ke

Kementerian Pertanian, sesudah itu kami minta izin ke Badan POM, sesudah itu yang terakhir kami minta izinnnya ke Kementerian Perdagangan. Jadi, kami waktu itu ngusul, waktu Undang-Undang Cipta Kerja di-*draft* Pak ya kami berharap itu bisa diterima dipangkas saja, misalkan cukup dua dari rekomendasi Kementerian Pertanian misalkan, terus kemudian di-*goal*-kan oleh Kementerian Perdagangan tapi ya ditolak, jadi seperti itu contohnya Pak, kalau ini bisa dipangkas juga ini akan sangat membantu industri mamin.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Jadi perizinan yang berlapis-lapis ya.
Baik mungkin terakhir ke Pak ini asosiasi mebel.

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Baik Pak, terima kasih.

Giliran terakhir, cukup puas, nanti juga ada apa namanya sertifikat halal untuk mebel ya kalau tidak, itu namanya SVLK gitu kan. Jadi, saya coba akan menyoroti dari dua sisi dulu Pak. Pertama saya ingin membuat *statement* yang sangat prinsip bahwa kalau industri tanpa dukungan bahan baku yang sustain itu pasti *sunset* Pak ya. Nah, industri mebel dan kerajinan kita ini hidup di negara *tropical forest* yang paling besar di dunia nomor tiga setelah Brazil dan Zaire, mestinya bahan baku kita melimpah tapi faktanya di lapangan justru bahan baku kita itu sangat sedikit.

Saya ingin tadi memberikan jawaban terhadap *statement* dari rekan-rekan di DPR mengenai, sebenarnya industri mabel itu jangan-jangan 50% itu diekspornya itu adalah ilegal bahan bakunya. Saya mau mengatakan bahwa kami ekspor 100% halal ya, karena gini dari total penggunaan kayu di Indonesia mungkin ini yang tidak dipahami oleh teman-teman. Industri mebel itu hanya menggunakan 7% saja Pak, sisanya 93% itu adalah *pulp and paper* paling besar ya, hutan bisa gundul sama mereka dan yang kedua adalah di *sontimber* ya atau industri panel yang membelah yang mengekspor bahan baku dalam bentuk balok dan papan yang hari ini meminta perluasan penambang. Kami mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Industri Nomor 3 2014 yang mewajibkan hilirisasi, seharusnya mengurangi luas penambang dijadikan barang seperti kami di mebel, itu yang paling mendasar sebetulnya sehingga seperti di industri kami ini apa melakukan pembalakan liar. Coba Bapak dan Ibu sekalian kita undang semua lengkap saya akan presentasikan bagaimana sebetulnya yang harus dibela itu industri mebel dan kerajinan, karena dia selain di hilir mempunyai nilai tambah tinggi dan dia melibatkan lapangan kerja sangat besar, total 2,1 juta lapangan kerja di industri kami ya dan itu pundi-pundi suara untuk para politisi ke depan nanti setelah Pak Jokowi lengser barang kali ya. Mungkin saya bisa menjamin karena kami adalah apa namanya kekuatan yang solid Pak di lapangan.

Terus yang kedua tadi Bapak dan Ibu sekalian mengatakan tentang IKEA ya, gampang saja IKEA tapi Bapak dan Ibu itu IKEA itu umurnya lebih tua daripada republik ini. Bagaimana dia dengan tiga prinsip seperti sangat jadi sangat efisien jadi memproduksi dengan harga yang termurah ya, *volume* terbesar dan harga jual juga termurah akan sulit disaingi dengan industri kita. Total ekspor mereka sudah 50 *billion* Pak ya jadi mungkin UMKM kita bukan lawannya mereka, lawannya mereka adalah mungkin negara. Jadi, kalau mau negara membangun satu konsorsium yang besar saya kira misalnya di Indonesia punya yang namanya Sarinah dan yang lain sebagainya itu dibangun besar-besaran untuk barangnya dari UMKM. Aturannya sudah jelas memang IKEA atau para perusahaan-perusahaan asing itu bisa menggunakan produk lokal, ya katakanlah 80%, tapi mungkin tidak ada kontrol dari kementerian terkait, sehingga posisinya mungkin mereka jadi 90% barang impor. Kita bisa lihat data Pak hari ini impor produk mebel dan kerajinan itu mendekati angka 15 triliun ya, mungkin Bapak dan Ibu membeli di IKEA dengan nyaman dan sebagainya, ada Informa. Kami ekspor baru 45 triliun, sayang kan, nah itu. Jadi, sebetulnya memang mereka bukan lawan kami, lawan kami adalah UMKM-UMKM yang barang kali secara spesifik *dinis market*, maka dari itu ekspor kami ke seluruh dunia itu sebetulnya di wilayah-wilayah yang tidak digarap oleh IKEA sebenarnya ya, kelas-kelas premium itu masuk di barang-barang yang seperti solid seperti ini. IKEA memproduksi dengan bahan yang mungkin *engineering wood* yang sangat apa namanya efisien sekali di lapangan.

Nah, jadi saya setuju dengan masukannya bahwa kita harus kuasai market dalam negeri dan mungkin malah kami mendorong pemerintah bisa membantu dengan membuka gerai yang besar saja. Misalnya Sarinah itu jangan hanya mentereng gedungnya gitu ya tapi isinya adalah produk-produk *furniture* yang 100% barang dalam negeri bertarung dengan IKEA dan lain sebagainya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu dan mungkin selebihnya saya serahkan ke Ibu Herlina mengenai beberapa regulasi yang harus disoroti.

Silakan Bu Herlina.

HIMKI (HERLINA):

Terima kasih.

Selamat sore,

Fokusnya itu tadi Bapak ada tanya mengenai SVLK ada apa baiknya. Sebenarnya SVLK ini kita sudah bahas itu sudah ketinggalan itu sudah hampir 10 tahun Pak. Kita mulai dari tahun 2012 itu SVLK itu sudah kita protes dan pada saat itu kita sudah ada *on and off* dibatalkan dan diterbitkan lagi, dibatalkan diterbitkan lagi, hampir dua atau tiga kali. Kondisinya sebenarnya sih kita juga sudah tahu Pak kalau di dalam SVLK itu tidak semua negara memerlukan SVLK.

Nah, kalau kita lihat Pak dari kita punya ekspor itu, *oriented*-nya itu 57% itu ke US sedangkan US itu nggak perlu. Misalkan kita harus mengikat diri itu ke aturan di F

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Mandatori

HIMKI (HERLINA):

FPA yang ada, itu untuk mencapai itu di Eropa itu hanya *market* kita disana itu *ekspor* itu nggak sampai 14%. Jadi, saya yang kita sesalkan itu bukan kita tidak mau menurutnya mengenai *green* untuk SVLK tapi kita punya prinsip Pimpinan kalau itu bisa menghambat itu kalau memang diperlukan untuk *green* sebaiknya itu dilakukan di hulu. Makanya prinsip kita itu utamakanlah di hilir itu, beri kebebasan supaya mereka juga bisa memacu. Bahkan kita itu menggunakan itu produknya itu juga kecil-kecil yang tadi Bapak sebut itu adalah *furniture* itu 7% untuk bahan bakunya paling padat itu juga yang kita gunakan. Nah, untuk yang *craft-craft* itu yang kecil itu juga harus SVLK dan biaya SVLK itu juga besar. Jadi, kalau kita harus mikirkan itu industrinya itu yang mereka harus perjuangkan itu harus gimana *cost*-nya itu mereka itu rendah baru bisa bersaing, itu Pak yang jadi konsen. Nah, kita itu utarakan disini itu karena kita sudah berjuang itu sudah hampir 10 tahun Pak jadi nggak

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Bu/Pak saya ingin menyampaikan agak lebih spesifik di forum yang terhormat ini. Jadi, sebetulnya kita kan tahu bahwa anggota kami kurang lebih sekitar 5 ribu totalnya, yang *tereregister* 2.500 karena kondisi sekarang ini. Bapak bisa bayangkan kalau itu dikali 40 juta per *company* untuk sekali pendaftaran SVLK dan tadi setiap *shipment* kami adalah 100ribu. Kami punya perhitungan hampir setengah triliun angka disitu. Nah, kalau disertifikasinya hanya di hulu kan cuma belasan HPH Pak, yang nggak ada uangnya maksud saya begitu, kalau di tengah cuma paling banyak 70 HPH, di bawah Pak besar sekali. Jadi, saya mau mengatakan jangan-jangan ini regulasi atau bahasa lainnya jangan-jangan ini korupsi yang dibungkus regulasi gitu, nanti Bapak coba klarifikasi ada apa dengan ini. Memang ngomongnya ada *low green* siapa yang tidak *green* kalau kita ngomong *green* mari kita tanam kayu besar-besaran ya kan. Karena kami membeli bahan itu dari Perhutani Pak berarti kami menggunakan HTE dan kalau perhutani nggak cukup, kami beli dari rakyat yang berarti HTR. Kami bukan nebang pohon liar. Nah, itu jadi prinsipnya harusnya bukan SVLK tapi jawabannya adalah mari menanam pohon, reboisasi kita lakukan. Bukan secarik kertas yang di *iwir-iwir* yang sebetulnya Eropa juga nggak minta, hanya kita yang minta sebetulnya agar kita dikenal sebagai negara yang arif bijaksana,

mengendalikan hutan tapi di lapangan dibiarkan penebangan liar besar-besaran seperti itu, kira-kira begitu.

ANGGOTA KOMISI VI:

Ketua boleh sebentar

HIMKI (HERLINA):

Pak izin tambahan.

F-GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Mau merespon SVLK ini, Bu Ibu dari HIPKI ya

ANGGOTA KOMISI VI:

HIMKI.

F-GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Artinya gini SVLK itu berarti *high cost* ekonomi sebenarnya ya, betul ya?

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Tempatnya tentu Pak

F-GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Artinya memang saya yang saya tahu kasus *illegal logging* kita itu hampir 80% itu sebenarnya persoalannya SVLK Pak, artinya sesungguhnya dikarang-karang saja SVLK ini

HIMKI (HERLINA):

Pak di lapangan juga ada yang bisa dia lakukan transak, untuk melegalkan itu lakukannya itu dengan transaksi

F-GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Oh.

HIMKI (HERLINA):

Jadi sebenarnya kita melihat tidak ada *impact* yang sangat baik juga sebenarnya.

F-GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Justru menghambat ekspor itu justru SVLK itu sebenarnya.

HIMKI (HERLINA):

Iya betul.

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Kecuali gini Pak, Cina, Malaysia, Vietnam sama-sama tidak bisa ekspor ke seluruh dunia ke Eropa khususnya, lah engga ini mereka bisa melenggang ekspor masuk, kami yang diikat di sini kan, kan nggak *fair*. Berarti kan negara dimaksud atau tujuan ekspor kita tidak pernah meminta itu namanya SVLK atau *flagty*.

HIMKI (HERLINA):

Tambahan lagi Pak satu ya.

Kalau seandainya memang mempunyai SVLK dan Indonesia diuntungkan seperti umpamanya importir di sananya itu dengan SVLK di Indonesia dia punya *duty* bisa turun berapa. Jadi, kita menjadi peluang kita masuk *kesana* itu harus melebihi dari pada negara lain gitu loh tapi ini kenyataan kita punya *cost* sudah lebih tinggi, orang lain dengan gampangya itu masuk, ya kita begini saja perjuangannya bisa dilakukan nanti *support*-nya.

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Ini Pak sebelum ditutup, untuk yang terhormat Pak Aria Bima, beliau kelihatannya sangat paham ya industri mabel jadi 2016 Pak Aria Bima kami sudah melebur menjadi HIMKI namanya ya. Jadi, beliau keliatannya pecinta mebel itu ya nanti kami kirimkan beberapa set mebel yang beliau sukai untuk dipilih mana yang terbaik kira-kira begitu.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Beliau itu temannya Pak Jokowi itu.

KETUA HIMKI (ABDUL SOBUR):

Iya, iya, iya jadi mungkin di memory beliau masih ASMINDO tadi ya. Padahal, sudah melebur kita.

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / WAKIL KETUA):

Baik terima kasih.

Saya rasa ini rapat sudah cukup panjang sekali, ini saya tadi ada mencatat apa yang disampaikan. Jadi, mungkin saya mau minta konfirmasi saja bahwa yang saya catat tadi ini akan menjadi catatan rapat, ini kan cuma namanya rapat dengar pendapat umum yang kita gunakan masukan-masukan dari Bapak/Ibu sekalian untuk kita berdiskusi dengan pemerintah dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini, mudah-mudahan Bapak/Ibu nggak bosan. Kita ingin sebetulnya memperbanyak supaya komunikasi kita *stakeholder* dengan pemerintah bisa ada yang bantu juga untuk, karena kan kita paham juga kadang-kadang Bapak ini kalau berhadapan sama pemerintah kalah *set* lah gitu kan nah itu peran kitalah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memberikan masukan yang bagus, tadi saya catat ada beberapa hal mungkin yang pertama adalah terkait teman-teman yang bisnisnya di retail itu kontrol terhadap *market place* karena banyak sekali barang ilegal yang masuk dan mungkin tidak terkena pengawasan sebagaimana harusnya antara misalnya BP POM, SNI, dan seterusnya gitu kan. Kebetulan BSN juga mitra kita, kemudian ini saya catat yang berikutnya adalah insentif yang bisa mungkin diberikan oleh pemerintah atau biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penggunaan bahan-bahan baku lokal terutama misalnya dalam halnya kosmetik karena tadi menarik juga perputarannya terlalu cepat untuk perusahaan kosmetik harus ini. Nah, itu memang mungkin kita harus cari sisi pasnya dimana mungkin pemerintah yang harus masuk, karena kan pengembangan bahan baku kita ini seperti mohon maaf kalau bicara kelapa sawit, dulu yang dicari mungkin cuma minyaknya sekarang sudah habis itu dari cangkangnya apa ini semua sudah habis bisa terpakai. Nah, bagaimana formalnya formulasi pasnya pembebanan ini nanti kita bisa bicarakan juga.

Kemudian penggunaan OSS yang terutama ini pakai *risk based approach* ini bisa dipercepat, karena akhirnya ide bagus kalau hanya menjadi ini akhirnya malah sangkut, hanya menjadi obstikel yang tidak bisa terpakai, akhirnya malah Bapak/Ibu yang kesulitan untuk menggunakan sistem-sistem baru. Kita di Indonesia ini sering bikin sistem-sistem baru yang akhirnya nggak jalan gitu kan, nah itu nanti kita juga tekankan kepada mitra-mitra kita.

Kemudian tadi, ya tentu kebijakan terhadap energi TDL dan gas itu akan mungkin Ibu/Bapak juga dengar ramai-ramai apalagi teman-teman GAPMMI ini masalah harga minyak sawit, ini kan kurang lebih sama juga dengan kondisi batu bara ini juga sulit buat kita, kita juga berkomunikasi dengan teman-teman kita di Komisi VII karena ujung-ujungnya akan terkena bebannya adalah masyarakat dan industri dan menjadi komponen biaya.

Kemudian regulasi mengenai plastik tadi itu menarik juga kebetulan saya juga punya kawan yang bisnis industri plastik. Kita ini kadang-kadang seperti yang Ibu keluhkan soal SVLK, kemajuan sendiri yang seharusnya belum kita lakukan kita sudah lakukan duluan. Padahal, kalau lihat urutan kita harusnya di belakang ini untuk mengajukan.

Kemudian, *vertical integration* seperti yang disampaikan ini menarik juga. Dulu di industri minerba kita memaksakan untuk *vertical integration* jadi seperti Bapak ini atau Ibu ini bikin di hilir produk kita paksakan untuk masuk ke hulu. Nah, itu dulu dilakukan untuk para penambang dipaksakan ke hilir tidak terjadi, karena memang bukan bidangnya gitu kan. Mereka ahlinya di nambang, ini ahlinya di *proccesing* ini kan kurang lebih sama ini nah kita jangan sering mengulang hal-hal seperti itu nanti ini, ini menarik ini buat kita kaji. Kemudian mengenai sertifikasi halal ini menarik mungkin kita bicarakan untuk halal yang diwajibkan bagi yang men-*declare*.

Nah kalau soal usulan Pak Nasim kita suruh dia klarifikasi dulu dengan partainya dulu sebelum di-*semprit* nanti tapi kan kita cari yang jalan tengah buat semua ya. Ini kan bisa juga buat produk kosmetik saya dengar banyak seperti yang pakai sertifikasi halal. Kemudian perizinan yang berlapis-lapis ini sebenarnya salah satu yang kita upayakan pada Undang-Undang Cipta Kerja tapi memang itu pun dengan kendala-kendalanya memang harus dikoreksi ulang dan ini komitmen DPR untuk membahas ulang tapi salah satu dorongan waktu Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memangkas lapisan perizinan, tapi ada juga kan kita harus cari titik temu dipangkasnya sampai ketinggian apa. Kalau tadi misalnya sepuluh lapisan mungkin bisa cukup dua lapisan gitu kan. Nah ini juga perlu sedikit pembahasan antara beberapa *stakeholder* karena memang ada juga yang merasa keberatan, misalnya wewenangnya mereka dipangkas dan seterusnya.

Kemudian kalau tadi bicara buat *show case* seperti Sarinah. Memang Sarinah kan memang habis dibangun ulang, itu memang kita harapkan menjadi *show case* untuk produk Indonesia, apa saya dengar gedungnya sudah jadi sekarang kita akan bicarakan untuk kontennya. Memang itu dulu Sarinah itu kan sebagai *mall* tidak berkembang, sebagai tokolah tidak berkembang, bisnisnya lebih banyak *ngurusin* impor-impor yang aneh-aneh, minor, terus apa beras gitu kan. Nah, sekarang kita lagi rubah itu kebetulan di bawah Kementerian BUMN dan kita tentunya maunya produk-produk lokal jangan hanya mebel tapi termasuk kosmetik dan seterusnya bisa dipromosikan dan kita minta kerja sama dengan ITPC dan APDAT untuk bisa mempromosikannya dalam negeri maupun luar negeri.

SVLK kebetulan saya juga pengusaha hutan. Saya sudah kenal ini lama gitu kan. Saya baru tahu bahwa ini sekarang sampai di hilir. Kita ini dagang hutan ini kaya orang jual narkoba setiap kapal keluar ini harus dicap, setiap

Polres, setiap Polsek, setiap Polda gitu kan nah ternyata dibebankan juga ke Bapak/Ibu. Saya penasaran juga apa yang menjadi latar belakang ini karena memang janjinya dari Kementerian Kehutanan dulu dengan ini kita bisa jual harga lebih mahal, nyatanya nggak ada gitu kan. Nah, ini yang masukan-masukan ini kita memang nggak mungkin semuanya kita bisa temukan solusinya dalam waktu sesingkat-singkatnya tapi kita menjadi bahan diskusi menuju ke pengaturan regulasi yang lebih baik.

Atas waktu Bapak/Ibu menghadiri undangan kami, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, kepada Asosiasi, Presidium Himpunan Industri Mabel Kerajinan Indonesia, kepada Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, dan Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita mengambil kebijakan untuk Indonesia lebih baik ke depan.

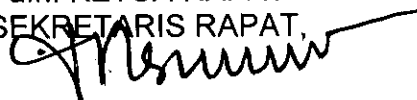
Dengan ini rapat saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.44 WIB)

Jakarta, 24 Januari 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



DEWI RESMINI, S.E., M.SI.
NIP. 197104071992032001